



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 60c/LHP/XV/05/2017
Tanggal : 18 Mei 2017

BPK RI

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUIIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	3
1.1. Temuan - Pengelolaan PNBK pada 46 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun serta Pengelolaan Piutang pada 21 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp3,82 Triliun Belum Sesuai Ketentuan.....	3
1.2. Temuan - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Piutang Kepada Wajib Pajak sebesar Rp879,02 Miliar.....	14
1.3. Temuan - Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan.....	18
2. Belanja	27
2.1 Temuan - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penatausahaan Utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun Tidak Memadai.....	27
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Klasifikasi Permasalahan PNPB	4
Tabel 2. Tabel Daftar Wajib Bayar yang Terkendala Penyelesaiannya	8
Tabel 3. Daftar KL terkait Penatausahaan Piutang	10
Tabel 4. Rincian Pengembalian Pendapatan Pajak	15
Tabel 5. Perkembangan Tindak Lanjut s.d. 4 Mei 2017 atas Saldo Piutang	17
Tabel 6. Nilai Tanggapan dan Kontra Tanggapan Piutang dan Kompensasi Seharusnya	17
Tabel 7. Hibah Barang pada Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (UO TNI AD) yang Belum Dilaporkan kepada Kemenkeu	20
Tabel 8. Hibah Langsung berupa Barang pada Kemenkominfo atas Penerimaan Tahun 2014-2016 yang belum memiliki BAST	21
Tabel 9. Hibah Langsung berupa Jasa pada Bappenas yang Belum Memiliki BAST	21
Tabel 10. Hibah Langsung Berupa Jasa pada Bappenas atas Penerimaan Hibah Tahun 2012-2015 yang BAST-nya Tahun 2016	22
Tabel 11. Perbedaan Realisasi Penerimaan dan Belanja Hibah Tahun 2016	23
Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos	27
Tabel 13. Rincian Permasalahan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos	29
Tabel 14. Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukkan Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos	29
Tabel 15. Rincian Pelanggaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal	30
Tabel 16. Rincian Pelanggaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang	30
Tabel 17. Permasalahan Pengelolaan Utang	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Rekapitulasi PNBPN Terlambat Disetor Tahun 2016 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.2	Rekapitulasi PNBPN Yang Tidak Dipungut Tahun 2016 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.3	Rekapitulasi PNBPN Kurang Pungut Tahun 2016 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 1.1.4	Rekapitulasi PNBPN Tanpa Dasar Hukum Dan Digunakan Langsung Untuk Kegiatan Operasional Tahun 2016
Lampiran 1.1.5	Permasalahan Signifikan Lainnya Yang Terkait Dengan PNBPN (Aspek Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan)
Lampiran 1.2.1	Rincian pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan piutang pajak belum dilunasi melalui kompensasi
Lampiran 2.1.1	Rekapitulasi Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.2	Rekapitulasi Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang Tahun 2016 pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.3	Rekapitulasi Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.4	Rekapitulasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.4a	Rincian Nilai dan Penjelasan Permasalahan Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.4b	Rincian Nilai dan Penjelasan Permasalahan selain Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.5	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.5a	Rincian Nilai dan Keterangan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.5b	Rincian Nilai dan Keterangan atas Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.5c	Rincian Nilai dan Keterangan atas Realisasi Belanja Barang Tidak didukung Keberadaannya atau Kegiatanannya (Fiktif) pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.5d	Rincian Nilai dan Keterangan atas Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.6	Rekapitulasi Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016

g l b uth

Lampiran 2.1.6a	Rincian Nilai dan Keterangan atas Perjalanan Dinas yang belum ada Bukti Pertanggungjawaban pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.6b	Rincian Nilai dan Keterangan atas Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan oleh Satu Orang dalam waktu bersamaan ke dua tempat yang berbeda pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.6c	Rincian Nilai dan Keterangan atas Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.6d	Rincian Nilai dan Keterangan atas Nama dan Tiket Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Manifest, Harga Tiket Tidak Sesuai dengan Ketentuan, dan Perjalanan Dinas Fiktif pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.7	Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya terkait Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.8	Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya terkait Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.9	Rekapitulasi Permasalahan Dalam Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.9a	Rincian Nilai dan Keterangan Belanja Bansos Yang Belum Disalurkan Kepada Yang Berhak pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.9b	Rincian Nilai dan Keterangan Kelebihan Belanja Bansos Belum Disetor Ke Kas Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.9c	Rincian Nilai dan Keterangan Dana Bansos Belum Ada Pertanggungjawaban pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.9d	Rincian Nilai dan Keterangan Kekurangan Volume/Kelebihan Pembayaran atas Penggunaan Dana Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.9e	Rincian Nilai dan Keterangan Permasalahan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan atas Kegiatan Dana Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016
Lampiran 2.1.9f	Rincian Nilai dan Keterangan Penggunaan Dana Bansos Tidak Tertib/Tidak Sesuai Ketentuan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

7 6 2 1



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 60a/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 dan LHP Sistem Pengendalian Internal Nomor 60b/LHIP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat Tahun 2016. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan PNB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan Piutang pada 21 Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan;
2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Piutang Kepada Wajib Pajak sebesar Rp879,02 Miliar;
3. Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan; dan
4. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan

76 to u

USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar.

- a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBK;
- b. Mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara;
- c. Direktur Jenderal Pajak menetapkan mekanisme konfirmasi melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak;
- d. Mengkaji dan menyempurnakan pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Uraian selengkapnya mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2017
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Anggota



AGUS JOKO PRAMONO *7*
Register Negara Akuntan No. RNA 72

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. **Pendapatan Negara dan Ilibah**
- 1.1. **Temuan - Pengelolaan PNBП pada 46 Kementerian/Lembaga Minimal Sebesar Rp1,30 Triliun serta Pengelolaan Piutang pada 21 Kementerian/Lembaga Sebesar Rp3,82 Triliun Belum Sesuai Ketentuan.**

Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan realisasi PNBП Lainnya sebesar Rp117.955.377.742.599,00 dan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp41.945.888.535.965,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat menyajikan realisasi PNBП Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (*audited*) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp157.317.644.684.473,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp34.405.512.144.647,00..

LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBП pada K/L yaitu PNBП terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp45.819.549.322,00, PNBП kurang/belum/tidak dipungut sebesar Rp163.672.513.461,00, PNBП telah dipungut dan belum disetor sebesar Rp23.748.092.332,00 dan USD11.670.594,00; HKD150,00; CNY927,00, PNBП sesuai tarif namun digunakan langsung sebesar Rp89.328.932.188,00, PNBП belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp88.786.822.562,00, dan permasalahan PNBП signifikan lainnya sebesar Rp24.845.827.891,00.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar: (a) meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBП pada K/L; (b) mempercepat proses pemantauan tindak lanjut atas PNBП yang belum diterima/belum dipungut; (c) melakukan sosialisasi Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik secara massif sehingga dapat mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan PNBП pada K/L; (d) memantau pelaksanaan penyisihan piutang yang dikelola oleh K/L; dan (e) memerintahkan Jaksa Agung untuk memperbaiki pengamanan atas dokumentasi Piutang PNBП.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) mengundang K/L terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBП serta pemantauan tindak lanjut atas PNBП yang belum diterima/belum dipungut; (b) melakukan sosialisasi/*Focus Group Discussion* yang melibatkan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan serta sosialisasi mengenai SIMPONI kepada Satker, Wajib Bayar, dan Pemda; (c) mengundang K/L terkait untuk meminta data piutang yang dikelola K/L, memantau penyisihannya, dan memonitor tindak lanjut penyelesaian piutang sesuai dengan temuan BPK; serta (d) melakukan koordinasi dengan Kejaksaan RI, untuk memperbaiki pengamanan atas dokumentasi Piutang PNBП.

766 2

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBП pada 46 K/L sebesar Rp1.306.311.629.556,38 yaitu:

Tabel 1 Klasifikasi Permasalahan PNBП

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1.	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut		
	a. PNBП terlambat disetor	20	602.216.223.596,67
	b. PNBП belum disetor	7	11.635.865.595,55 SAR52.500.00
	c. PNBП tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
	d. PNBП kurang pungut	9	19.550.963.397,78
2.	Pungutan sesuai tarif PNBП namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
3.	Pungutan melebihi tariff PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41.581.484.973.00
5.	Permasalahan PNBП signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 SAR52.500

Permasalahan PNBП Tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut.

- 1) PNBП terlambat disetor terjadi pada 20 K/L diantaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp489.150.089.327,00 yang berasal dari pendapatan layanan pendidikan;
 - b) Kementerian Pertanian sebesar Rp70.494.552.381,00 yang bersumber dari PNBП Lainnya atas pendapatan jasa yang terlambat disetor ke kas negara yang terjadi pada 11 satker terlambat disetor selama 443 hari;
 - c) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp12.719.653.341,00 yang bersumber dari Dana Pendidikan Strata Dua (S-2) yang terlambat disetor ke kas Negara selama 30 hari;
 - d) Kementerian Perindustrian sebesar Rp12.528.669.635,00 yang bersumber dari PNBП lainnya atas jasa pendidikan, pelayanan dan informasi yang terlambat disetor ke kas Negara selama 48 hari;
 - e) Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp4.396.309.260.00 yang bersumber dari pendapatan sewa penggunaan ruangan untuk kantor dan ATM Bank Mandiri yang terlambat disetor ke kas Negara selama 88 hari;
 - f) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp3.608.645.498,24 yang berasal dari pengelolaan PNBП lainnya atas paten dan pendaftaran

Handwritten signature/initials

merk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) terlambat setor karena penerapan metode *official assesment* tidak konsisten;

- g) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp1.748.028.427,00 yang bersumber dari PNBP lainnya atas pendapatan jasa pengujian yang terlambat disetor ke kas Negara selama 2 s.d 105 hari; dan
- h) Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/BIG sebesar Rp1.457.731.015, yang bersumber dari PNBP lainnya yang terlambat disetor ke kas Negara selama 4 s.d 94 hari.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.1*

2) PNBP belum disetor terjadi pada tujuh KL yaitu.

- a) Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp9.972.946.982,78 atas PNBP Lainnya atas denda tilang, biaya perkara dan uang rampasan belum disetor ke kas Negara;
- b) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp609.860.066,00 atas PNBP Lainnya yang bersumber dari pendapatan jasa analisa laboratorium yang belum disetor;
- c) Kementerian Pertanian sebesar Rp465.020.321,00 yang bersumber dari PNBP Lainnya atas kelebihan pembayaran dan pendapatan sewa pada empat satker yaitu sisa bantuan belum dikembalikan oleh kelompok tani dan sewa ruangan belum dibayar;
- d) Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp382.208.369,55 yang bersumber dari PNBP Lainnya atas pendapatan jasa giro dari lembaga keuangan seperti TAFISA World, INASGOC dan ASPROV Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki izin dari Kementerian Keuangan sehingga belum disetor ke kas Negara; dan
- e) Kementerian Luar Negeri sebesar SAR52,500.00 eq Rp187.071.150,00 yang bersumber dari PNBP Lainnya atas penggunaan dokumen keimigrasian atas perbedaan jumlah pemakaian dokumen keimigrasian.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.2*.

3) PNBP tidak dipungut terjadi pada 10 K/L diantaranya terjadi pada:

- a) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.071.789.930,00 yang bersumber dari pendapatan jasa tambat, labuh dan kebersihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawatanan TA 2016 yang tidak dipungut; dan
- b) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp521.030.660,09 atas PNBP Lainnya (PNBP BLU) atas pendapatan Kerjasama Operasi (KSO) jasa pandu dan jasa tunda serta penetapan tarif jasa belum sesuai peraturan kepala BP Batam sehingga PNBP tidak dipungut.

7 6 10 11

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.3*.

- 4) PNBK kurang dipungut terjadi pada sembilan KL diantaranya terjadi pada:
- a) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp16.399.689.330,00 yang bersumber dari pendapatan pendidikan dan pemanfaatan aset. Atas pendapatan yang kurang dipungut tersebut, selanjutnya telah dipungut dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp9.666.665,00, sehingga masih terdapat pendapatan yang kurang pungut sebesar Rp16.390.022.655,00; dan
 - b) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang sebesar Rp44.490.630,00 yang bersumber dari pendapatan sewa lahan dan jasa sewa dan bangunan yang belum dipungut.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.4*

b. Pungutan PNBK sesuai tarif Peraturan pemerintah (PP) namun digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp255.228.777.264,09 dan untuk non operasional sebesar Rp108.764.500,00.

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp255.120.012.764,09 terjadi pada enam K/L yaitu (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp133.929.071.910,29 yang bersumber dari pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan yang belum sesuai ketentuan, (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp632.366.400,00 bersumber dari pendapatan jasa dan uji sertifikasi, (3) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp117.177.989.972,80 yang bersumber dari pendapatan layanan pendidikan serta kerjasama dan pemanfaatan aset, dan (4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.146.526.031,00 yang bersumber dari pendapatan sewa gedung, wisma dan penerimaan hasil panen dan pemanfaatan lahan atas benteng rotterdam, (5) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia sebesar Rp234.058.450,00 yang bersumber dari pendapatan sewa penggunaan kantin, dan (6) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp108.764.500,00 atas pendapatan lain-lain.

Sedangkan pendapatan yang digunakan langsung untuk kegiatan non operasional sebesar Rp134.037.836.410,00 terjadi pada dua K/L yaitu, 1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp133.929.071.910,00 yang bersumber dari pemanfaatan BMN, dan 2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp108.764.500,00 yang bersumber dari pendapatan lain-lain.

c. Pungutan PNBK melebihi tarif Peraturan Pemerintah (PP) namun digunakan langsung untuk kegiatan operasional pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp17.417.773.000,00.

Kementerian Perhubungan memiliki PNBK Lainnya yang bersumber dari layanan pendidikan atas pendaftaran calon taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ), penerimaan atas jasa layanan diK/Lat Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) tangerang dan penerimaan atas pungutan layanan diK/Lat pada Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) yang dipungut

7 4 4 4

melebihi ketentuan pada PP nomor 11 Tahun 2015, PP nomor 15 tahun 2016 dan pungutan yang tidak diatur pada PMK tentang tarif layanan BLU.

- d. Pungutan belum memiliki dasar hukum digunakan untuk operasional dan non operasional sebesar Rp41.581.484.973,00 diantaranya digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp22.647.552.657,00 dan kegiatan non operasional sebesar Rp77.000.000,00.**

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp22.647.552.657,00 terjadi pada delapan K/L diantaranya terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp20.720.364.554,23 yang bersumber dari pendapatan sewa ruang akomodasi asrama haji satker non BLU.

Sedangkan pendapatan yang digunakan langsung untuk kegiatan non operasional sebesar Rp77.000.000,00 terjadi pada tiga K/L yaitu (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp61.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan sewa lahan kantin yang belum diatur pada PP No.8 Tahun 2015 tentang PNPB Kementerian Pemuda dan Olahraga, (2) Badan Informasi Geospasial sebesar Rp16.000.000,00 yang bersumber dari PNPB lainnya dan (3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp1.050.000,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.5.*

- e. Permasalahan lainnya terkait PNPB sebesar Rp352.596.558.691,89 terjadi pada 29 KL diantaranya terjadi pada:**

- 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp146.691.697.142,87 terkait dengan pemotongan pajak atas jasa giro dan bunga deposito BLU selama tahun 2016;
- 2) Kementerian Agama sebesar Rp41.794.516.669,16 terkait dengan penggunaan tarif yang ditetapkan oleh satker Kemenag tanpa mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan;
- 3) Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp15.860.798.000,00 terkait pendapatan sewa yang tidak mencantumkan metode dan waktu pembayaran;
- 4) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp36.949.698.197,00 atas pengelolaan dan penatausahaan pendapatan non siaran yang tidak memadai; dan
- 5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.888.559.601,23 terkait dengan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang belum teridentifikasi apakah merupakan pembayaran kewajiban tahun berjalan atau merupakan pembayaran piutang atas tunggakan tahun sebelumnya.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada *Lampiran 1.1.6.*

Selain itu, pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3.826.086.751.829,28 dengan rincian sebagai berikut.

Handwritten signature/initials

- a. Penyelesaian Piutang pada enam K/L sebesar Rp2.392.767.271.566,50 berlarut-larut.

1) Kementerian Komunikasi dan Informatika

CaLK D.2.14 Neraca LKPP Tahun 2016 (*audited*) mengungkapkan bahwa Piutang Bukan Pajak pada Kemenkominfo sebesar Rp1.995.086.538.116,00 yang berasal dari Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda. Dari nilai tersebut, diantaranya:

- a) Piutang enam wajib bayar sebesar Rp1.603.443.377.932,00 yang terkendala penyelesaiannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Daftar Wajib Bayar yang Terkendala Penyelesaiannya

No	Nama Wajib Bayar	Nilai Piutang (Rp)	Periode Piutang	Keterangan
1	PT Bakrie Telecom	1.437.720.691.926,00	2010-2016	Sudah ada Surat Peringatan (SP) Terakhir tetapi belum ada kepastian penyelesaian
2	LPP TVRI	57.873.648.627,00	1991 s.d. 2012	Sudah ada SP Terakhir dan pemantauan penyelesaian Piutang telah dilimpahkan ke KPKNL untuk mempercepat penyelesaian piutang tersebut
3	PT Smartfren	42.448.440.528,00	2010 dan 2011	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
4	PT Indosat	15.857.576.099,00	2009 s.d. 2015	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
5	PT Jasnita	1.802.947.374,00	2015 dan 2016	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
6	PT Sampoerna Telekomunikasi	47.739.071.378,00	Tim OPN	Sudah terdapat Surat Penagihan dan Peringatan
	Jumlah	1.603.443.377.932,00		

- b) Perbedaan jumlah Piutang Kemkominfo ke PT Bakrie Telecom (BT) per Semester I Tahun 2016 antara Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) sebesar Rp678.918.231.778,00.

Piutang PT BT per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.437.720.691.926,00. Piutang tersebut merupakan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Siaran Radio (ISR) dan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR). Berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian Piutang BHP frekuensi tersebut tidak mendapat prioritas penyelesaian oleh PT Bakrie Telecom, tetapi disamakan dengan kreditur PT Bakrie Telecom lainnya, dan jangka waktu penyelesaian Piutang selama 10 Tahun. *Surety Bond* yang dikeluarkan oleh Asuransi SM hanya menjamin pembayaran BHP IPFR Tahun 2010 s.d. 2013 sebesar Rp539.322.641.568,00 dan jatuh tempo pembayarannya baru akan dilakukan setelah 60 bulan sejak penggabungan usaha yaitu 31 Oktober 2019. Selain Piutang PT Bakrie Telecom yang telah dijamin dengan *surety bond* yang perlu diperhatikan adalah penyelesaian putusan pengesahan perdamaian

Handwritten signature/initials

(homologasi) oleh PT Bakrie Telekom dan Piutang PT Bakrie Telekom yang belum dicakup dengan *surety bond* maupun homologasi sebesar Rp678.918.231.778,00; dan

- c) Gugatan hukum atas Piutang BHP Frekuensi sebesar Rp103.040.778.961,00 yang terdiri gugatan oleh PT Indosat atas Piutang BHP Frekuensi Kominfo sebesar Rp13.644.632.237,00, gugatan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp47.739.071.378,00 dan Piutang Denda PT Smart Telekom yang tidak diakui sebesar Rp39.432.598.757,00 dan Rp2.224.476.589,00 karena dianggap merupakan salah satu obyek gugatan yang dimenangkan PT Smart Telekom

Terkait piutang di atas, selama tahun 2015 dan 2016 Kemenkominfo belum memberikan sanksi yang tegas atas wajib bayar yang tidak melakukan pelunasan BHP Frekuensi terutama sanksi pemberhentian operasional blok pita dan pencabutan izin.

2) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan piutang bukan pajak pada BNP2TKI sebesar Rp3.006.827.244,00. Piutang tersebut diantaranya merupakan piutang macet sebesar Rp2.997.741.500,00 dari Balai Pelayanan Kepulangan (BPK) TKI Selapajang Tangerang yang telah diberhentikan operasionalnya sejak tanggal 1 Oktober 2014. Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut Rencana Aksi Tata Kelola TKI. Penyelesaian piutang tersebut melalui KPKNL mengalami kendala karena (1) penyewaan gedung/ruangan tidak ada ijin penyewaan dari KPKNL, dan (2) gedung/ruangan yang disewakan tersebut milik Kementerian Tenaga Kerja yang dipinjam pakai oleh BNP2TKI sewa gedung/ruangan, konsesi usaha, dan tagihan biaya listrik di BPK-TKI;

Terkait dengan PNPB terutang yang harus dibayar oleh wajib bayar, pemerintah telah menerbitkan PP No.29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNPB yang Terutang. PP tersebut antara lain mengatur mengenai penyelesaian PNPB terutang termasuk penyerahannya kepada Instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara (DJKN) dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan wajib bayar tidak melunasi kewajibannya.

3) Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp1.455.419.255,00 atas piutang air pada satker BLU PPKK yang tidak jelas nama debiturnya sehingga tidak dapat ditagih;

4) Badan Tenaga Nuklir Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp1.799.282.000,00 atas piutang sewa tanah kepada PT INUKI yang berpotensi tidak tertagih;

5) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp970.190.140,50 atas piutang yang berasal dari TA 2015 sehingga tidak jelas penyelesaiannya; dan

7 6 6 2

6) Kementerian Pariwisata

Kementerian Pariwisata sebesar Rp142.250.000,00 atas pelunasan piutang biaya pendidikan STP Nusa Dua Bali berlarut-larut dan berpotensi tidak tertagih.

Berlarut-larutnya penyelesaian piutang menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pada enam K/L di atas belum sepenuhnya memadai untuk memastikan seluruh piutang negara dapat terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No.29 Tahun 2009.

b. Piutang pada Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri tidak didukung dengan sumber dokumen sebesar Rp858.585.461.344,00.

LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan piutang PNBK pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp30.128.880.207,00 yang diantaranya berasal dari Piutang Biaya Pendidikan Mahasiswa Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebesar Rp22.293.797.200,00. Piutang tersebut telah diterbitkan Surat Penagihan (SPn) pada Tahun 2016, namun dokumen penagihannya tidak didukung dengan bukti penyampaian dan pengiriman kepada debitur/wajib bayar. Oleh karena itu, status pengiriman SPn tersebut tidak diketahui. Selanjutnya, terdapat dua SPn yang diterbitkan oleh dua bagian yang berbeda, yaitu SPn yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Bidang Administrasi, Umum, dan Keuangan yang dilengkapi dengan rincian nominal tunggakan dan SPn yang ditandatangani oleh Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan yang hanya menyajikan informasi tunggakan per semester.

Selain itu, terdapat permasalahan terkait berkas putusan piutang uang pengganti yang tidak dalam pengelolaan pihak kejaksaan selaku eksekutor sebesar Rp836.291.664.144,00.

c. Permasalahan piutang TP/TGR belum memadai terjadi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp487.443.592.000,00 terkait bagian lancar TP/TGR ikatan dinas yang sama sekali belum pernah dibayar/diangsur karena pengendalian yang tidak memadai.

d. Selain permasalahan di atas, terdapat pula permasalahan terkait dengan penyajian dan pengungkapan piutang sebesar Rp87.290.426.918,78 terjadi pada tujuh K/L.

Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar KL terkait Penatausahaan Piutang

No	Nama KL	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
1.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.939.216.865,88	Pencatatan piutang belum sesuai dengan dokumen sumber sehingga belum menggambarkan nilai yang sebenarnya
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	15.892.109.671,43	Hasil pemeriksaan Tim OPN-BPKP dan hasil cckit berdampak pada perhitungan kontribusi KPU/USO sebesar Rp15,89 miliar belum ditindaklanjuti untuk penagihan

764 me

No	Nama KL	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
3.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7.057.062.540,00	PT DAS dan PT NBA belum menyelesaikan seluruh kewajiban dan tanggung jawab kepada BPPT atas KSO Pesawat yang sudah berakhir
4.	Kementerian Hukum dan HAM	2.110.900.000,00	Penatausahaan piutang Paten pada Ditjen KI kurang memadai sehingga terindikasi dimanfaatkan oleh konsultan KI saat proses pemeliharaan paten dari pemegang Paten, yang mengakibatkan PNBP Ditjen KI tidak masuk ke kas negara sebesar Rp2,1 Miliar
5.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.147.557.537,00	Penatausahaan Piutang Jasa Siaran tidak tertib. Piutang tidak dicatat karena prosedur untuk mencatat piutang tidak ada
6.	Kementerian Luar Negeri	1.032.081.318,47	Cicilan BPPR yang telah dibayar belum menjadi pengurang Piutang Bukan Pajak
7.	Kementerian Dalam Negeri	111.468.986,00	Penentuan kualitas Piutang dan pembentukan penyisihan Piutang TidakTertagih tidak sesuai ketentuan
TOTAL		87.290.426.918,78	

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP

- 1) Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa PNBP yang terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pasal 2
 - a) ayat (2) yang menyatakan bahwa kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa jenis PNBP yang belum tercakup dalam kelompok PNBP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa tarif atas jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan;
- 4) Pasal 4 yang menyatakan bahwa seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;
- 5) Pasal 5 yang menyatakan bahwa seluruh PNBP dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

Handwritten signature/initials

- 6) Pasal 11 yang menyatakan bahwa Wajib Bayar membayar jumlah PNBP yang terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya, berwenang (huruf d) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - 3) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
 - 4) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/ daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/ daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.; dan
 - 5) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa Piutang negara/ daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara pada:
 - 1) Pasal 2 Piutang Negara yang menyatakan bahwa pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
 - 2) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:
 - (a) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/ tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara;

7 6 4 1
v

- (b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan/atau;
 - (c) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
- 3) Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp25.634.946.236,69 atas PNBPN yang kurang dan tidak dipungut (6.083.983.138,91+19.550.963.097,78);
- b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp11.635.865.695,55 dan SAR52,500.00;
- c. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN secara tepat waktu atas tertundanya setoran PNBPN sebesar Rp602.216.223.695,67;
- d. Penggunaan langsung PNBPN untuk kegiatan operasional dan non operasional sebesar Rp272.646.550.264,09 (255.228.777.264,09+17.417.773.000,00) tidak transparan dan akuntabel;
- e. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPN dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.581.484.973,00 karena pungutan PNBPN tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional;
- f. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- g. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum memiliki sistem dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN;
- b. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga; dan
- c. Belum optimalnya koordinasi antara DJKN sebagai Instansi yang berwenang dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan kemudahan dalam penyetoran penerimaan negara secara elektronik yang diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara elektronik (SIMPONI). Terkait setoran PNBPN, Kementerian Keuangan telah menyediakan SIMPONI sebagai bagian dari MPN G2 sebagai sarana pembayaran PNBPN. Melalui sistem tersebut selain sebagai sarana penyetoran, K/L juga dapat melakukan monitoring PNBPN yang diterimanya, sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring atas potensi PNBPN. Kemudahan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan *stakeholder* dalam menyetorkan penerimaan negara.

7 6 2

- b. Pemerintah sedang melakukan proses revisi UU No. 20 Tahun 1997 dengan pokok-pokok perubahan antara lain:
 - 1) Peningkatan peran APIP dalam pengawasan pengelolaan PNBp;
 - 2) Penetapan tarif (tarif yang sering berubah ditetapkan PMK) untuk mengurangi pungutan tanpa dasar hukum dan pungutan tidak sesuai tarif;
 - 3) Pengaturan ijin penggunaan (dapat digunakan lintas satker);
 - 4) Pengaturan verifikasi dan pemeriksaan (ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi PNBp); dan
 - 5) Pemberian sanksi yang lebih tegas kepada Wajib Bayar dan Wajib Setor yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.
- c. Kementerian Keuangan akan meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* dan memantau penyelesaian temuan pada masing-masing K/L dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pengelolaan PNBp.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBp;
- b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBp dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;
- c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara; dan
- d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian terkait PNBp yang bersumber dari pemanfaatan BMN.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan kajian terkait sistem dan kebijakan PNBp dan berkoordinasi dengan DPR untuk proses penyelesaian RUU PNBp;
- b. Meminta seluruh KL untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBp dan penyelesaian piutang pada KL;
 - 2) Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBp; dan
 - 3) Mengoptimalkan penggunaan SIMPONI.
- c. Berkoordinasi dengan KL terkait untuk penyelesaian temuan BPK;
- d. Berkoordinasi dengan seluruh K/L agar menyerahkan piutang macetnya kepada PUPN; dan
- e. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBp yang bersumber dari pemanfaatan BMN antara lain melalui sistem pengawasan dan pengendalian yang terintegrasi.

7 4 16 12

1.2. Temuan - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Piutang Kepada Wajib Pajak sebesar Rp879,02 Miliar.

Neraca LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan Piutang Perpajakan sebesar Rp105.656.377.094.983,00, dengan nilai Penyisihan Piutang tak Tertagih sebesar Rp72.741.904.616.236,00 sehingga nilai bersih Piutang Perpajakan yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp32.914.472.478.747,00. Realisasi pengembalian pendapatan pajak Tahun 2016 (*audited*) sebesar Rp102.359.185.243.482,00 termasuk di dalamnya pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp101.503.315.597.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Pengembalian Pendapatan Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan PPh	37.508.488.235.055,00
2	Pendapatan PPN	63.391.799.539.098,00
3	Pendapatan PBB	567.738.804.518,00
4	Pendapatan Pajak Lainnya	35.289.019.180,00
Total		101.503.315.598.851,00

Pengembalian pendapatan pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) yang terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak lain. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) akan diberikan setelah diminta oleh Wajib Pajak dengan dilakukan serangkaian prosedur atau pemeriksaan sebelumnya.

Salah satu prosedur yang ditempuh yaitu kompensasi utang pajak dimana restitusi diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Wajib Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili dan/atau KPP lokasi. Kompensasi dilakukan apabila Wajib Pajak diketahui masih memiliki utang pajak baik yang ditatausahakan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar (domisili) atau di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha Wajib Pajak tersebut (Wajib Pajak Cabang). KPP melakukan konfirmasi utang pajak baik secara internal di KPP domisili ke Seksi Penagihan maupun ke KPP lokasi. Kompensasi tersebut dilakukan dengan mengirimkan surat konfirmasi secara tertulis untuk internal KPP dari Seksi Pelayanan kepada Seksi Penagihan dan untuk eksternal ditujukan kepada kepala KPP tempat WP Cabang terdaftar.

Berdasarkan hasil pengujian antara piutang pada data Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada data Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) diketahui terdapat permasalahan yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak Tahun 2016 kepada 1.952 Wajib Pajak yang belum memperhitungkan piutang kepada wajib pajak domisili dan cabang sebesar Rp879.024.287.211,00. Rincian pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan piutang pajak yang belum dilunasi melalui kompensasi dapat dilihat dalam **Lampiran 1.2.1.**

FLP
12

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 11 menyebutkan bahwa:
 - 1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut; dan
 - 2) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- b. PMK Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 - 1) Pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi";
 - 2) Pasal 7 yang menyatakan bahwa:
 - a) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak, dan dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan;
 - b) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMKP dan/atau transfer pembayaran, dan dianggap sah apabila:
 - (1) Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP); dan
 - (2) Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP);
 - 3) Perdirjen Pajak Nomor PER-7/PI/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, "kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperhitungkan terlebih dahulu

7 6 16 12

dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi”; dan

- b) Ayat (6) yang menyatakan bahwa, “utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut:
- (1) Utang Pajak yang mendekati tanggal daluwarsa penagihan;
 - (2) Utang Pajak yang bernilai paling besar; dan
 - (3) Utang Pajak yang dikompensasikan melalui potongan SPMKP.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan terlambatnya penerimaan negara sebesar Rp879.024.287.211,00.

Permasalahan tersebut disebabkan mekanisme konfirmasi yang dilakukan saat ini belum dapat menjamin bahwa seluruh piutang kepada Wajib Pajak telah diperhitungkan dalam pemberian pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Atas permasalahan tersebut Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa DJP telah menginstruksikan tindak lanjut temuan dimaksud kepada Kantor Wilayah (Kanwil) dan KKP terkait sesuai surat Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S-100/PJ.08/2017 tanggal 17 April 2017 hal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI.

Nilai sebesar Rp3.367.402.100.971,00 merupakan nilai saldo akhir piutang, sementara nilai sebesar Rp2.034.514.296.949,00 merupakan nilai yang seharusnya dikompensasi. Perkembangan tindak lanjut sampai dengan 4 Mei 2017 atas saldo piutang sebesar Rp3.367.402.100.971,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perkembangan Tindak Lanjut s.d. 4 Mei 2017 atas Saldo Piutang

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Telah dikompensasi berdasarkan Penelitian atas selisih SPMKP cikurangi SP2D lebih besar dari saldo akhir piutang	701.923.893.356
2	SKP terbit setelah 30 November 2016 masih proses SP2D (keadaan per tanggal 31 Desember 2016) dan SKP diterbitkan setelah SPMKP	1.396.867.881.101
3	Piutang sudah dibayar W/P	1.075.510.850.150
4	Tidak bisa kompensasi	64.404.170.635
5	Jawaban Konfirmasi Utang Pajak Nihil	92.267.596.004
6	Akan dikompensasikan pada SPMKP berikutnya dan/atau akan dilakukan penagihan aktif	35.783.294.504
7	Ketetapan Pembatalan	644.415.221
	Jumlah	3.367.402.100.971

Atas tanggapan tersebut, BPK menanggapi bahwa atas rincian dan sampel yang telah diberikan DJP, Tim Pemeriksa BPK melakukan penelitian dan menerima tanggapan nilai piutang sebesar Rp2.207.474.685.531,00 atau kompensasi seharusnya sebesar Rp1.155.490.009.738,00 dan telah dilakukan koreksi dalam kondisi sehingga nilai temuan menjadi piutang sebesar Rp1.159.927.415.440,00 (Rp3.367.402.100.971,00 – Rp2.207.474.685.531,00) dan nilai kompensasi yang belum memperhitungkan piutang

7682

pajak seharusnya sebesar Rp879.024.287.211,00 (Rp2.034.514.296.949,00 - Rp1.155.490.009.738,00).

Tabel 6. Nilai Tanggapan dan Kontra Tanggapan Piutang dan Kompensasi Seharusnya

No	Tanggapan		Kontra Tanggapan	
	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Kompensasi Seharusnya (Rp)
1	Telah dikompensasi berdasarkan Penelitian atas selisih SPMKP dikurangi SP2D lebih besar dari saldo akhir piutang	701.923.893.356	321.953.367.390	263.252.698.310
2	SKP terbit setelah 30 November 2016 masih proses SP2D (keadaan per tanggal 31 Desember 2016) dan SKP diterbitkan setelah SPMKP	1.396.867.881.101	180.320.280.951	136.002.435.634
3	Piutang sudah dibayar WP	1.075.510.850.150	509.389.018.247	378.819.322.980
4	Tidak bisa kompensasi	64.404.170.835	46.633.595.177	16.193.133.652
5	Jawaban Konfirmasi Hutang Pajak Nihil	92.267.596.004	78.599.370.791	66.477.991.034
6	Akan dikompensasikan pada SPMKP berikutnya dan/atau akan dilakukan penagihan aktif	35.763.294.504	22.381.315.087	12.680.443.661
7	Ketetapan Pembatalan	644.415.221	598.261.940	598.261.940
8	Selisih Nilai Saldo Akhir pada LP3	-	72.227.857	-
Total		3.367.402.100.971	1.159.927.415.440	879.024.287.211

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk membuat mekanisme konfirmasi melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin Pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada WP; dan
- Memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan review atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak memperhitungkan seluruh piutang sebesar Rp879.024.287.211,00.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjuti dengan menyempurnakan sistem informasi dalam Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) terkait informasi tunggakan utang pajak dimana KPP Domisili dapat melihat saldo tunggakan WP pada KPP Lokasi dan KPP Lokasi yang satu dapat juga melihat saldo tunggakan KPP Lokasi lainnya.

Terkait hal tersebut di atas akan melakukan:

- Membuat konfirmasi melalui sistem informasi yang terintegrasi; dan
- Sosialisasi dan bimbingan teknis pada unit vertikal.

Handwritten signature/initials

1.3. Temuan – Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan.

Realisasi Penerimaan Hibah pada Laporan Realisasi APBN Tahun 2016 (*audited*) adalah sebesar Rp8.987.666.279.302,00 atau 455,03 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp1.975.172.660.000,00. Dalam CaLK B.2.1.3 dijelaskan bahwa penerimaan hibah tersebut diantaranya berasal dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam negeri sebesar Rp5.741.938.962.115,00 dan luar negeri sebesar Rp3.245.727.317.187,00.

Selain itu, pada Laporan Operasional (LO) Tahun 2016 (*Audited*) disajikan Pendapatan Hibah sebesar Rp12.367.365.185.655,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp6.355.283.192.623,00 atau 33,94 % dibandingkan Tahun 2015. Dalam CaLK E.2.1.1.3 dijelaskan bahwa pendapatan hibah tersebut diantaranya berasal dari hibah Langsung dalam bentuk Barang dan Jasa Dalam Negeri sebesar Rp6.596.606.103.223,00 dan Luar Negeri sebesar Rp5.431.119.494.185,00 serta Pendapatan Hibah langsung lainnya sebesar Rp339.639.588.247,00 yang merupakan pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang diterima di tahun 2016.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan hibah Pemerintah Pusat, yaitu a) proses konfirmasi dan rekonsiliasi penerimaan hibah dengan KL penerima hibah belum berjalan optimal karena Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit. EAS) tidak memiliki data penerimaan hibah per K/L sehingga tidak ada data pembandingan dari data penerimaan hibah yang diterima dari K/L dalam proses rekonsiliasi tersebut; dan b) konfirmasi terhadap pemberi hibah belum memadai karena data yang digunakan untuk konfirmasi bukan data yang final. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar melakukan perbaikan mekanisme pelaporan LKPP, LKBUN dan LKKL untuk menjamin pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas seluruh transaksi dan peristiwa/kejadian ekonomi pada tahun pelaporan; mengkoordinasikan APIP masing-masing LKKL/LKBUN untuk melaksanakan reuview atas Sistem Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan; dan menyempurnakan Aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) dalam rangka mendukung pelaporan transaksi keuangan yang akurat pada LKBUN dan LKPP.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah menindaklanjutinya dengan menerapkan aplikasi *e-rekon* yang dapat digunakan untuk memonitor perbedaan pencatatan transaksi antara K/L dan BUN. Aplikasi tersebut juga digunakan untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan kementerian/lembaga berdasarkan data transaksi akuntansi tingkat satuan kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 12 K/L sebesar Rp2.504.777.171.678,28 dan tidak dilaporkan dalam LKPP dengan rincian sebagai berikut:

a. Hibah Langsung Berupa Uang Sebesar Rp136.036.535.679,00 pada empat K/L.

Permasalahan hibah langsung berupa uang yang belum disahkan tersebut sebagai berikut:

Handwritten signature/initials

1) Kementerian Agama

Kementerian Agama menerima hibah langsung berupa uang sebesar Rp48.472.557.620,00 dimana hibah tersebut belum disahkan, belum dicatat, dan belum disalurkan kepada penerima hibah.

2) Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Terdapat hibah langsung berupa uang pada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah direalisasikan belanjanya pada tahun 2015 sebesar Rp85.156.636.221,00 akan tetapi belum dilakukan pengesahan kepada BUN.

3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Terdapat hibah langsung berupa uang sebesar Rp2.234.214.533,00 pada LIPI yang belum disahkan oleh BUN.

4) Badan Tenaga Nuklir Nasional

Terdapat hibah langsung berupa uang yang telah diterima dan digunakan selama tahun 2016, sebesar Rp173.127.305,00 namun tidak pernah dilaporkan dalam DIPA karena belum diregister.

b. Hibah Langsung Berupa Barang Sebesar Rp155.429.648.784,00, USD6,459,030.00 dan JPY29.092.000,00 pada Enam K/L.

Permasalahan hibah langsung berupa barang yang belum disahkan tersebut sebagai berikut:

1) Kementerian Pertahanan

Pada Kementerian Pertahanan juga terdapat hibah langsung berupa barang yang belum disahkan sebesar Rp1.882.506.060,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Hibah Barang pada Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (UO TNI AD) yang Belum Dilaporkan kepada Kemenkeu

No	Satker	Hibah Uang/Barang	Nilai (Rp)
1	Kodam XVII/Cen	Hibah Barang	493.878.000,00
2	Kodam II/Swj	Hibah Barang	1.388.630.060,00
	Jumlah		1.882.506.060,00

2) Kementerian Perhubungan

Hibah Langsung berupa peralatan dan mesin pada Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sebesar Rp670.410.954,00 belum diajukan pengesahannya kepada BUN.

3) Kementerian Agama

Hibah Langsung berupa barang sebesar Rp65.845.268.690,00 belum diajukan pengesahannya kepada BUN.

Handwritten signature/initials

4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pemeriksaan atas pengelolaan hibah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2016 dan hasil klarifikasi dengan Sub Direktorat Keterpaduan Pelaksanaan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman masih menunjukkan adanya hibah langsung dari *Advisor for Sewerage Management (Transfer Knowledge of STP and Piping Management)* dengan nilai komitmen JPY29.092.000,00 (JPY100=Rp11.540,49 atau eq.Rp3.357.357.896,20) yang sudah *closed* namun belum diserahterimakan sehingga belum dapat dilakukan pencatatan beban/aset

5) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

Terdapat Hibah Langsung berupa barang sebesar USD6,459,030.00 e.q. Rp86.783.527.080,00. Rincian nilai Hibah pada Kemenkominfo sebagai berikut.

Tabel 8. Hibah Langsung berupa Barang pada Kemenkominfo atas Penerimaan Tahun 2014-2016 yang belum memiliki BAST

No	Kegiatan	Nilai (USD)	Nilai (Rp)
1	<i>IT Capacity Building</i>	3,700,000	49.713.200.000
2	<i>PKI dan SER Consultation</i>	2,476,030	33.267.939.080
3	<i>Training Program in Korea</i>	283,000	3.802.388.000
Jumlah		6,459,030	86.783.527.080

Kegiatan yang belum mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan pada Kemenkominfo tersebut dilakukan pada periode tahun 2014, 2015 dan 2016.

6) Badan Narkotika Nasional (BNN)

Hibah Langsung berupa tanah tahun 2015 sebesar Rp247.936.000,00 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung.

c. Hibah Langsung Berupa Jasa Sebesar Rp2.213.310.987.215,28 pada Tiga K/L.

Pada tahun 2016 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menerima hibah langsung berupa jasa sebesar Rp808.617.567.629,28 dan belum diserahterimakan oleh pemberi hibah (belum ada Berita Acara Serah Terima) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Hibah Langsung berupa Jasa pada Bappenas yang Belum Memiliki BAST

No	Hibah	Donor	Realisasi belanja yang belum diajukan pengesahan pada tahun 2016 (Rp)	Tahun Kegiatan
1	<i>Indonesia Infrastructure Initiative (Indi) Phase I</i>	DFAT	478.724.597.387,00	2008-2011
2	<i>Indonesia Infrastructure Initiative (Indi) Phase II</i>	DFAT	328.128.531.901,00	2011-2015
3	<i>PBB Phase 2</i>	JICA	513.335.630,00	2016
4	<i>Paklim Phase 2</i>	GIZ	1.250.802.711,28	2015-2016
Total			808.617.567.629,28	

Handwritten signature/initials

Selanjutnya, Pertanggungjawaban Hibah Jasa *Project Assistance "Facilitation of Developing Potential MCC"* Tahun 2011 s.d. 2016 sebesar USD10.32 juta eq. Rp139.115.658.764,00 juga belum jelas. Selain itu, berdasarkan nilai realisasi hibah dalam laporan realisasi hibah dan pengesahannya diketahui terdapat hibah yang belum disahkan senilai Rp792.873.450.285,97. Bappenas juga menerima hibah langsung berupa jasa yang bersumber dari penerimaan hibah tahun 2012 s.d. 2015 yang BAST dan pengesahannya baru dilaksanakan tahun 2016 sebesar Rp375.091.124.574,47 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Hibah Langsung Berupa Jasa pada Bappenas atas Penerimaan Hibah Tahun 2012-2015 yang BAST-nya Tahun 2016

No	Hibah	Realisasi Hibah Tahun 2014 dan 2015 disahkan pada tahun 2016		
		Nomor MPHL	Nilai Realisasi (Rp)	Tahun Kegiatan
1	PRISMA	2016019017312001	134.774.546.268,00	2015
2	UNFPA Siklus 9 (2016-2020)	2016019017312021	2.127.395.750,00	2015
3	SAJI	2015019017312013	11.729.133.506,00	2015
4	CADEP-SSTC	2016019017312017	3.162.558.120,00	2015
			4.613.743.950,00	2014
			2.868.454.920,00	2013
			31.782.120,00	2012
5	SIAP-C-TA0013-INO	2016019017312023	154.927.022.640,45	2014 dan 2015
6	PBB Phase 2	2016019017312005	537.000.000,00	2015
7	SSTC-NGG	2016019017312016	691.926.400,00	2015
8	SUTIP	2016019017312029	645.298.365,84	2015
			2.301.796.576,55	2014
			5.100.665.910,95	2013
9	Social Protection Programme (SPP)	2016019017312007	51.579.800.035,65	2014-2015
TOTAL			375.091.124.574,47	

Sementara itu, terdapat pula penerimaan hibah langsung berupa jasa pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp2.684.842.704,79 yang belum dicatat dalam laporan keuangan karena Pemberi Hibah (*Austrac*) belum memberi nilai atas hibah tersebut sehingga belum dapat diajukan pengesahan kepada Menteri Keuangan selaku BUN. Permasalahan mengenai hibah langsung jasa yang belum disahkan juga dijumpai pada Kementerian Perdagangan sebesar Rp94.928.343.256,77.

Selain permasalahan ketidaktertiban pengesahan hibah langsung, hasil pemeriksaan juga menunjukkan beberapa permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan hibah langsung sebesar Rp253.040.511.630,00 yang terjadi pada enam K/L sebagai berikut.

a. Kementerian Pertahanan

Hasil penelusuran atas penerimaan hibah langsung di masing-masing UO Kemenhan dan TNI menunjukkan bahwa masih terdapat hibah langsung berupa uang dan barang/jasa yang belum dilaporkan pada Laporan Keuangan Kemenhan Tahun 2016. Terdapat pengesahan hibah langsung sebesar Rp23.325.262.997,00 yang dalam proses

Handwritten signature/initials

penyelesaian pengesahan di BUN terdiri dari hibah langsung berupa uang sebesar Rp15.849.261.937,00 dan berupa barang sebesar Rp7.476.001.060,00.

b. Kementerian Kesehatan

Pengelolaan Hibah Langsung Jasa terlambat disahkan sebesar Rp3.076.046.570,00 pada Direktorat Gizi Masyarakat dan Informasi.

c. Bappenas

Berdasarkan surat Nomor 046/Dt.6.2/04/2017 tentang tanggapan atas permintaan dokumen hibah pada Direktorat Transportasi menunjukkan bahwa dokumen atas pertanggungjawaban hibah tidak dapat diserahkan sebesar Rp7.022.491.356,00.

d. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pemeriksaan secara uji petik atas sebanyak 16 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang baru terbentuk di tahun 2016, terdapat tiga BNNK baru yang pada tahun 2016 mendapatkan hibah langsung berupa uang/barang/jasa, yaitu BNNK Sumbawa, BNNK Metro, dan BNNK Tebing Tinggi dengan total hibah sebesar Rp305.400.000,00. BNN belum membuat kebijakan akuntansi tentang perlakuan akuntansi atas hibah-hibah yang diterima satker yang belum memiliki DIPA/belum menjadi entitas akuntansi. Selain itu, BNN juga memiliki kebijakan akuntansi atas penerimaan hibah langsung yang terlambat disahkan sebesar Rp9.409.835.261,00.

e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dalam pengelolaan hibah pada Komnas HAM menunjukkan adanya perbedaan pelaporan nilai realisasi penerimaan dan belanja hibah langsung tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 11. Perbedaan Realisasi Penerimaan dan Belanja Hibah Tahun 2016

No	Sumber Data	Pendapatan Tahun 2016 (Rp)	Belanja Tahun 2016 (Rp)
1	Bagian Keuangan (S SKA)	11.012.089.384,00	12.278.453.147,00
2	Penyusun LK Komnas HAM TA 2016 (SAIBA)	11.012.089.384,00	12.324.729.645,00
3	OMSPAN	10.953.149.384,00	12.265.789.645,00
4	Koordinator Keuangan Komnas Perempuan	11.961.458.812,00	10.336.176.926,00
	Jumlah	44.938.826.964,00	47.205.149.363,00

Selama ini Komnas Perempuan hanya membuat pelaporan dan pertanggungjawaban hibah langsung luar negeri kepada lembaga-lembaga donor yang bersangkutan dan Bagian Keuangan Komnas HAM hanya menerima laporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana hibah langsung luar negeri TA 2016 yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan. Tidak ada proses rekonsiliasi antara Bagian Keuangan Komnas Perempuan dan Bagian Keuangan Komnas HAM terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah langsung luar negeri. Selain itu, rekonsiliasi hibah dengan BUN yang melaporkan pendapatan hibah tidak pernah dilakukan oleh PA/KPA Komnas Perempuan.

f. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pengelolaan hibah sebesar Rp198.889.386.062,00 pada KPU ditemukan permasalahan sebagai berikut.

g e l a t

- 1) Perbedaan pencatatan nilai kas lainnya dari hibah pilkada 2015 dan 2016 per 31 Desember 2016 antara nilai pada LK dengan rekening penampung dan buku pembantu kas tunai hibah pilkada sebesar Rp196.243.388.830,00.
- 2) Pada KPU Kabupaten Lamongan terdapat kas hibah sebesar Rp698.698.197,00 yang disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk menggarutnya serta telah diserahkan proses hukumnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan
- 3) Pada KPU Kabupaten Kolaka Timur terdapat selisih kurang saldo kas hibah sebesar Rp566.490.200,00 antara catatan pembukuan dengan saldo kas sebenarnya
- 4) Pada KPU Kabupaten Natuna dan Kabupaten Simalungun terdapat saldo kas hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan masing-masing sebesar Rp1.194.374.677,00 dan Rp186.434.158,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah:
 - 1) Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Menteri melaksanakan penatausahaan atas Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; ayat (2) Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah mencakup kegiatan administrasi pengelolaan dan akuntansi pengelolaan";
 - 2) Pasal 81 yang menyatakan bahwa, "Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah dilakukan oleh Instansi pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - 3) Pasal 83 yang menyatakan bahwa, "Menteri menyusun pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN";
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah:
 - 1) Pasal 15 yang menyatakan bahwa, "Satker penerima hibah di K/L selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memproses dokumen sumber atas transaksi a) saldo kas di K/L dari hibah; b) saldo aset tetap, aset lainnya, dan/atau persediaan dari hibah dalam bentuk barang; c) beban jasa dari hibah dalam bentuk jasa; d) belanja yang bersumber dari hibah dalam bentuk yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN; dan e) beban yang bersumber dari hibah dalam bentuk uang yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN";
 - 2) Pasal 19 yang menyatakan bahwa, "(a) K/L melakukan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulanan, (b) konfirmasi dapat dilakukan dari tingkat KL sampai dengan satuan kerja, (c) dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran, (d) hasil konfirmasi dituangkan dalam berita acara, dan (e) berdasarkan berita acara, DJPPR dapat melakukan koreksi pencatatan Pendapatan Hibah"; dan

Handwritten signature

- 3) Pasal 21 yang menyatakan bahwa, “(a) apabila diperlukan, DJPPR dapat melakukan konfirmasi kepada pemberi hibah atas realisasi Pendapatan Hibah, (b) dalam hal terjadi ketidakcocokan data, kedua belah pihak melakukan penelusuran, dan (c) berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJPPR dapat melakukan koreksi pencatatan Pendapatan Hibah”;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada:
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan NPHD;
 - 2) Pasal 19 Ayat (1) yang menyatakan bahwa BPP KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan: a) bukti-bukti pengeluaran KPU Kabupaten/Kota; dan b) bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP Ad hoc;
 - 3) Pasal 20 Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi;
 - 4) Pasal 57 yang menyatakan bahwa BPP KPU Provinsi dan/atau BPP KPU Kabupaten/Kota harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban BPP atas uang yang dikelolanya berdasarkan buku kas umum dan buku-buku pembantu yang telah diperiksa dan diuji oleh PPK dengan dilampiri salinan rekening koran sebagai pertanggungjawaban atas sejumlah dana yang diterima dari Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Pasal 63 yang menyatakan bahwa sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan dan jika tidak diatur dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan, sisa uang yang bersumber dari hibah langsung disetor ke kas negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan

- a. LKPP belum dapat menyajikan aset, pendapatan, dan belanja/beban yang berasal dari hibah langsung berupa uang/barang/jasa;
- b. Saldo kas yang berasal dari hibah langsung sebesar Rp196.243.388.830,00 belum dapat diyakini kewajarannya; dan
- c. Potensi kerugian negara sebesar Rp2.645.997.232,00 atas saldo kas hibah langsung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada KPU Kab. Lamongan, Kab. Kolaka Timur, Kab. Natuna, dan Kab. Simalungun.

Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa.

Handwritten signature

- a. Terkait hibah barang/jasa: 1) Periodisasi penandatanganan BAST tidak diatur dalam peraturan manapun; 2) Pengaturan periodisasi penandatanganan BAST diserahkan kepada pemberi dan penerima hibah; 3) Periodisasi penandatanganan BAST hibah ada yang tercantum dalam *grant agreement*, namun ada juga yang tidak; 4) Penandatanganan BAST dapat dilakukan di pertengahan proyek maupun di akhir proyek; 5) Dalam beberapa *grant agreement*, ditemui klausul yang menyatakan bahwa penandatanganan BAST dilakukan setelah proyek selesai, dengan pertimbangan barang masih digunakan sampai proyek selesai sehingga penyerahan dilakukan setelah proyek selesai. Oleh karena itu, Periodisasi penandatanganan BAST tidak dapat ditentukan secara pasti apabila tidak diatur dalam *agreement*, karena masing-masing proyek hibah mempunyai ciri khas masing-masing dan sesuai PMK Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, untuk melakukan pengakuan atas hibah barang/jasa yang diterima, maka harus dimulai dengan penandatanganan BAST. Tanpa BAST maka pemerintah RI tidak akan mencatat adanya pengakuan penerimaan hibah walaupun pemberi hibah telah mengeluarkan dana untuk kegiatan/proyek.

Penandatanganan BAST terkadang tidak dapat dilakukan seketika setelah proyek selesai, melainkan diperlukan proses administrasi oleh pemberi hibah atas dana yang telah mereka keluarkan dalam proyek dimaksud, mengingat kegiatan hibahnya dilakukan melalui pihak ketiga yang ditunjuk pemberi hibah. Di sisi lain penerima hibah juga perlu melakukan proses verifikasi atas hibah yang akan diserahterimakan.

b. Kementerian Kominfo

Hibah langsung *Korea International Cooperation Agency* (KOICA) yang tercantum dalam *Record of Discussion* (RoD) berakhir pada tanggal 26 Maret 2017 dan masih dalam proses review oleh KOICA. Badan Litbang SDM telah berkirim surat kepada KOICA dalam rangka percepatan finalisasi BAST terkait agar dapat segera dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Kominfo. Finalisasi dan penandatanganan BAST oleh para Pihak diharapkan dapat diselesaikan pada minggu III April 2017 untuk dapat segera diajukan pengesahannya kepada DJPPR dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Kominfo.

c. Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas yang mengatur tahap pengelolaan hibah, sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan akuntansi hibah. Untuk memudahkan teknis pengelolaan hibah, maka Kementerian PPN/Bappenas menyusun konsep Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2016. Sampai dengan saat ini, konsep Juklak pada tahap *legal drafting*.

Terkait permasalahan pengelolaan hibah tersebut, Inspektorat Utama selaku APIP telah melakukan pengawasan pada tahun 2016 antara lain melalui: 1) Sosialisasi/*knowledge sharing* temuan pemeriksaan BPK; 2) Melakukan pendampingan/penugasan *Liaison Officer* dalam rangka akselerasi pengesahan hibah langsung non kas; 3) Berkoordinasi dengan Unit Kerja Penerima Hibah dan DFAT terkait akselerasi BAST hibah DFAT; dan 4) Memberikan masukan dalam penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala

Handwritten signature

Bappenas Nomor 6 Tahun 2016 serta konsep Juklak peraturan tersebut. Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pemantauan proses penerbitan BAST, pengesahan hibah langsung (kas, barang, dan jasa) secara berkala serta finalisasi Juklak atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2016.

Sementara, atas permasalahan mengenai pengelolaan hibah langsung pada PPATK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, BNN, Komnas HAM, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu belum mendapatkan tanggapan dari Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mengkaji dan menyempurnakan pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada KL; dan
- b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan percepatan penyelesaian penerbitan PMK mengenai administrasi pengelolaan hibah yang saat ini tengah dalam proses di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
- b. Berkoordinasi dengan APIP K/L untuk meminta APIP K/L melakukan pemantauan dan pengawasan atas setiap penerimaan dan pelaksanaan hibah K/L yang hasilnya disampaikan kepada Dit. EAS, DJPPR.

2. Belanja

- 2.1. **Temuan - Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penatausahaan Utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun Tidak Memadai.**

LKPP Tahun 2016 (*audited*) menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2016 sebesar Rp1.154.018.222.035.109,00. Termasuk di dalam Belanja Pemerintah Pusat tersebut adalah Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yang masing-masing anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2016 (*Audited*)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% realisasi terhadap anggaran
Belanja Barang	304.241.814.530.000	259.646.886.544.136	85,34%
Belanja Modal	206.567.406.444.000	169.474.230.324.273	82,04%
Belanja Bansos	53.403.770.551.000	49.613.539.133.477	92,90%

g l b a t

Selain itu, Neraca LKPP Tahun 2016 (*audited*) juga menyajikan nilai Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp22.438.518.540.842,00 yang merupakan dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Modal dan Belanja Barang, yaitu ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya, kelebihan pembayaran pada Belanja Barang dan Belanja Modal, anggaran Belanja Barang tidak sesuai peruntukannya, denda keterlambatan pada Belanja Barang dan Belanja Modal belum dipungut, Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak, Belanja Barang atas pekerjaan yang sebenarnya tidak dilaksanakan, penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas, Belanja Barang yang belum didukung bukti pertanggungjawaban, pemborosan dalam realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang, dan permasalahan signifikan lain terkait Belanja Modal dan Belanja Barang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar (a) menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk melakukan kajian dan evaluasi atas permasalahan kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai temuan BPK serta menetapkan langkah strategis dan/atau kebijakan perbaikan sesuai hasil kajian dan evaluasi atas temuan berulang terkait kesalahan klasifikasi penganggaran dan pelaksanaan Belanja Barang dan Modal; (b) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan kapasitas APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran K/L untuk menjamin ketepatan pengklasifikasian anggaran dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran; (c) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai; (d) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/simpangan pelaksanaan Belanja Modal dan Barang sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (e) meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengoptimalkan peran APIP dalam evaluasi pelaksanaan belanja khususnya belanja terkait kegiatan utama di K/L terkait, sehingga permasalahan pelaksanaan belanja yang merupakan temuan berulang dapat diminimalisasi.

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut dengan melakukan perbaikan kebijakan melalui (a) pengaturan jenis klasifikasi belanja (2 digit) oleh DJA melalui PMK Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Klasifikasi Anggaran yang antara lain mengatur klasifikasi belanja (2 digit) dan pengaturan revisi anggaran melalui PMK Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016; (b) meningkatkan kapasitas APIP dalam mereviu RKAKL untuk menjamin ketepatan pengklasifikasian anggaran dan menjadikan hasil reviu sebagai dasar penyusunan anggaran; (c) meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungannya dan dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan jenis belanja

sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai; (d) pemulihan kerugian negara dan melakukan upaya pendisiplinan dan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terlihat dalam pelanggaran ketentuan pelaksanaan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial; dan (e) menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dalam rangka meminimalisasi potensi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran.

Namun, dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal, Belanja Barang, dan Bantuan Sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Rincian Permasalahan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos

No	Permasalahan	Belanja Modal (Rp)	Belanja Barang (Rp)	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Total Nilai Temuan (Rp)
1.	Kesalahan penganggaran/peruntukan	105.766.227.013,65	212.372.310.624,75	31.833.150.000,00	349.971.687.638,40
2.	Kelebihan Pembayaran Belanja dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Kontrak	428.374.344.111,10	540.162.893.041,70	-	968.537.237.152,80
3.	Penyimpangan belanja perjalanan dinas	-	30.203.806.836,18 USD1,299.20	-	30.203.806.836,18 USD1,299.20
4.	Permasalahan dalam peryaluran dan penggunaan dana Bansos	-	-	465.550.241.387,36	465.550.241.387,36
5.	Permasalahan lainnya terkait dengan belanja	9.271.148.321.041,38	333.340.811.564,57	-	9.604.489.132.605,95
	Jumlah	9.805.288.892.166,14	1.116.079.822.067,20 USD1,299.20	497.383.391.387,36	11.418.762.106.620,70 USD1,299.20
	Jumlah KL	70	73	5	

Permasalahan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp105.766.227.013,65 pada 21 K/L, kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dengan realisasinya sebesar Rp212.372.310.624,75 pada 27 K/L, dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Bansos dengan realisasinya sebesar Rp31.833.150.000,00 pada 2 K/L rincian sebagai berikut:

Handwritten signature/initials

Tabel 14. Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukkan Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos

Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL	Rincian
Belanja Modal	Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang	70.088.943.228,65	15	Lampiran 2.1.1
	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal	13.626.786.965,00	6	
	Salah penganggaran antar akun dalam Belanja Modal	22.050.496.800,00	2	
Nilai Permasalahan Belanja Modal		105.766.227.013,65		
Belanja Barang	Belanja Barang dianggarkan pada Belanja Modal	28.279.985.780,00	3	Lampiran 2.1.2
	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang	53.055.560.626,75	16	
	Salah penganggaran antar akun dalam Belanja Barang	131.026.764.218,00	16	
Nilai Permasalahan Belanja Barang		212.372.310.624,75		
Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada Belanja Belanja Barang	133.700.000,00	1	Lampiran 2.1.3
	Anggaran Belanja bantuan sosial digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Bantuan Sosial	31.699.450.000,00	1	
Nilai Permasalahan Belanja Bansos		31.833.150.000,00		
Total nilai permasalahan		349.971.687.638,40		

Rincian atas kesalahan penganggaran/peruntukkan Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial masing-masing disajikan dalam **Lampiran 2.1.1, Lampiran 2.1.2, dan Lampiran 2.1.3.**

- b. Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal sebesar Rp428.374.344.111,10 pada 66 K/L, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Pelanggaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Kelebihan Pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksihonestan Spesifikasi Teknis	102.526.729.273,46	13
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	38
Jumlah	428.374.344.111,10	

Handwritten signature/initials

Rincian pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.4, 2.1.4a, dan 2.1.4b.**

- 2) Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Barang sebesar Rp540.162.893.041,70 pada 57 K/L dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Pelanggaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang

Permasalahan	Nilai (Rp)	Jumlah KL
Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	474.795.067.930,36	49
Kekurangan volume pekerjaan	35.492.506.813,95	28
Realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	8.574.814.633,82	8
Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda	20.300.503.660,55	22
Jumlah	540.162.893.041,70	

Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Barang dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.5, 2.1.5a, 2.1.5b, 2.1.5c, dan 2.1.5d**

- c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L. Permasalahan perjalanan dinas, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebesar Rp5.942.159.815,61 antara lain berupa uang harian yang melebihi Standar Biaya Masukan, pemberian uang harian pada kegiatan *fullboard*, dan kelebihan harga tiket sebesar Rp5.922.232.815,61; dan (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebesar Rp4.524.103.116,00 berupa belanja perjalanan dinas belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp3.326.741.612,00 serta belanja perjalanan dinas bukan dari tempat kedudukan, uang saku Rapat Dalam Kantor yang dilaksanakan pada jam kerja dan perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan mendahului *exit permit* sebesar Rp1.197.361.504,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 2.1.6, 2.1.6a, 2.1.6b, 2.1.6c, dan 2.1.6d.**
- d. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L. Permasalahan ini diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.681.829.089.363,00 diantaranya berupa pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2016 meliputi perubahan sasaran atau spesifikasi teknis penyelesaian pekerjaan melebihi 12 bulan dan permasalahan impor dan (2) Badan Keamanan Laut sebesar Rp130.567.020.114,00 atas pengadaan tiga kegiatan Belanja Modal yang dihentikan transaksi keuangan dan perjanjian kontraknya berdasarkan Surat Komisi Pengawasan Korupsi (KPK). Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 2.1.7**
- e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L. Permasalahan ini diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp74.260.989.940,70 antara lain berupa pembayaran akses internet yang tidak mempertimbangkan *down time* dari *Service Level Agreement* (SLA) yang tidak

g k ke s

diyakini kewajarannya sebesar Rp66.865.786.719,28; (2) Kementerian Kesehatan sebesar Rp69.071.992.836,51 antara lain berupa pihak ketiga melaksanakan pekerjaan TA 2016 yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan atau ketentuan yang berlaku yaitu pengadaan obat-obatan dan vaksin pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp55.707.034.168,00. Rincian selengkapnya disajikan dalam **Lampiran 2.1.8**.

- f. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp465.550.241.387,36 pada 5 KL. Permasalahan ini diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Sosial sebesar Rp442.425.549.543,36 antara lain berupa sisa dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016 yang belum disalurkan oleh PT Pos Indonesia kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) per 31 Desember 2016 sebesar Rp441.177.649.543,36; (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.219.349.456,00 antara lain berupa belanja bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak sebesar Rp8.373.600.000,00. Rincian disajikan dalam **Lampiran 2.1.9, 2.1.9a, 2.1.9b, 2.1.9c, 2.1.9d, 2.1.9e, dan 2.1.9f**.

Selain itu, pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Utang kepada Pihak Ketiga pada sembilan Kementerian/Lembaga sebesar Rp4.900.228.679.259,99 dan USD1,642,485.00 yang tidak memadai sebagai berikut :

Tabel 17 Permasalahan Pengelolaan Utang

No	Nama KL	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.826.311.527.365,35 USD1,642,485.00	Penyelesaian Kewajiban Program Tahun Jamak KPU/USC Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Berlarut-Larut
2	Kementerian Dalam Negeri	37.150.688.853,00	Pembayaran yang belum dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>
3	BP Batam	19.428.104.160,64	Jamiran Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebanyak 935 berkas belum dievaluasi oleh Bidang Evaluasi Lahan sehingga JPP tersebut belum dapat ditetapkan statusnya secara jelas
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.422.200.000,00 184.962.305,00	Kelidaktersediaan anggaran yang mengakibatkan utang kepada pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i> Pengakuan dan pengukuran utang tidak memadai, pengadaan berpotensi adanya utang kepada pihak ketiga, penyajian dan pengungkapan tidak memadai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
5	LPP TVRI	312.127.561,00	Dokumen penghapusan Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Pajak tidak dapat ditelusuri.
6	Ombudsman RI	255.670.000,00	Utang tahun 2015 yang berisiko tidak terbayar atas delapan kegiatan sebesar Rp255.670.000,00 yang berpotensi

Handwritten signature/initials

No	Nama KL	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan
			membebani anggaran tahun 2017
7	Badan Narkotika Nasional	628.003.600,00	Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.937.600,00 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan tercapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada Tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000,00
8	Kementerian Kesehatan	2.807.089.145,00	Penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka Pada Satker Sekretariat Konsil Kedokteran belum terlib sehingga nilai tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp2.807.089.145,00
9	Kementerian Pariwisata	728.306.270,00	Pengendalian Internal Pembayaran Utang Pihak Ketiga dan Pertanggungjawaban Realisas Belanja Barang dan Jasa pada Deputi Kelembagaan Kementerian Pariwisata tidak tertib (Pembayaran Utang melebihi tahun 2016, pembayaran utang menggunakan anggaran belanja barang, terdapat bunga dan fee kepada pemberi pinjaman)
	Jumlah	4.900.228.679.259,99 USD1,642,485.00	

Terkait dengan penyelesaian kewajiban program tahun jamak KPU/USO Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Putusan *inkracht* BANI atas 63 kontrak tahun jamak belum seluruhnya dapat menyelesaikan kontrak namun terdapat putusan *inkracht* BANI terhadap *termyn* prestasi kerja sesuai kontrak. Total nilai kontrak atas 63 paket pekerjaan adalah sebesar Rp7.395.221.435.436,00. Atas paket pekerjaan tersebut dilakukan gugatan oleh pihak ketiga sebesar Rp2.418.006.051.368,00 sedangkan pembayaran yang dilakukan BP3TI atas dasar prestasi kerja sebelum izin *multi years* dibatalkan adalah sebesar Rp2.820.969.658.747,00 sehingga terdapat potensi gugatan sebesar Rp2.156.245.725.321,00 (Rp7.395.221.435.436,00 – Rp2.820.969.658.747,00 – Rp2.418.006.051.368,00);
- Terdapat ketidakjelasan nilai putusan BANI senilai Rp514.210.158.174,00 berkaitan layanan tahun 2015 dan ganti rugi aset yang memerlukan pertimbangan dasar pembayarannya, mengingat adanya penghentian kontrak tahun jamak oleh Kementerian Keuangan sejak 26 Januari 2015;
- Terdapat ketidakjelasan nilai gugatan pihak ketiga yang masih dalam proses BANI berkaitan nilai tuntutan berupa ganti kerugian/*opportunity lost* yang tidak relevan dengan prestasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp1.238.738.959.632,35 dan USD1,642,485.00 (Posisi 31 Desember 2016); dan
- Terdapat ketidakjelasan nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kemkominfo terhadap 13 paket pekerjaan sebesar Rp917.216.684.238,00 yang dalam proses musyawarah berkaitan belum adanya proses rekonsiliasi dengan penyedia jasa dan

76/2016

akan dilanjutkan upaya damai total nilai kontrak. Atas pekerjaan-pekerjaan tersebut belum terbitnya izin operasional seperti yang diatur dalam kontrak.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyatakan:
 - 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 65 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
 - 3) Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit meliputi: belanja barang dan/atau jasa, belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas; dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat;
 - 4) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya; dan
 - 5) Pasal 99 ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
- c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara formal dan material atas RKA-KL yang disusunnya sesuai dengan kewenangannya;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016:
 - 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi; dan
 - 2) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun

Handwritten signature

Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai **batas tertinggi** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga pada Pasal 16:
- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa PA;
 - 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, Kuasa PA harus menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
 - 3) Ayat (8) yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan sebagai suplemen pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- g. Buletin Teknis Nomor 22 Akuntansi Utang Berbasis Akrua yang antara lain mengatur bahwa Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran;
- b. Timbulnya beban atas Belanja Barang dan Belanja Modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif;
- c. Belanja Modal dan Belanja Barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai;
- d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi Belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak;
- e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di BANI.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran APIP, untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja serta pengelolaan utang pihak ketiga dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat mendukung pencapaian program Pemerintah Pusat.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Handwritten signature

a. Terkait belanja

- 1) Secara garis besar, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal, antara lain PP Nomor 45 Tahun 2013, PMK Nomor 190/PMK.05/2012, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2016 yang telah diubah dengan PER-49/PB/2016. Sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial Pemerintah telah mengaturnya melalui PMK Nomor 254/PMK.05/2015 yang merupakan penyempurnaan atas PMK Nomor 81/PMK.05/2012.
- 2) Selain itu, terkait dengan permasalahan pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah juga telah melakukan beberapa hal berikut.
 - a) Melalui surat Nomor S-556/MK.05/2016 tanggal 1 Juli 2016, Menteri Keuangan telah meminta Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan beberapa hal terkait dengan permasalahan yang ditemukan pada pemeriksaan LKPP Tahun 2015, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran K/L; menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran; serta melibatkan APIP dalam pengelolaan belanja bantuan sosial sesuai dengan tugas dan kewenangan APIP, (2) mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan *governance* dalam pengelolaan keuangan negara dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, dan (3) melakukan monitoring terhadap realisasi penyaluran belanja bantuan sosial berdasarkan laporan dari bank penyalur serta memastikan mekanisme monitoring penyaluran belanja bantuan sosial sudah diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan belanja bantuan sosial;
 - b) Melakukan *Spending Review* yang dilaksanakan terhadap RKA K/L Tahun Anggaran 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dari sisi *value for money* dan memberi masukan/rekomendasi untuk perumusan kebijakan penganggaran (pada umumnya) dan kebijakan pelaksanaan anggaran (pada khususnya). Salah satu masukan yang disampaikan kepada Kementerian Negara/Lembaga adalah penggunaan akun pada RKA K/L sesuai dengan kaidah dalam Bagan Akun Standar;
 - c) Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran pada setiap triwulan yang di antaranya bertujuan memberikan saran/rekomendasi atas permasalahan pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - d) Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Menteri Keuangan telah meminta Menteri/Pimpinan Lembaga agar memerintahkan satuan kerja di bawahnya untuk mengambil langkah-langkah reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian kerja, memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan, meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak, dan pengendalian pengelolaan UP/TUP.

Handwritten signature/initials

b. Terkait Utang

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berupaya maksimal untuk menuntaskan penyelesaian Utang Pihak Ketiga yang timbul sebagai akibat dihentikannya kontrak tahun jamak yang ditunjukkan bahwa realisasi putusan BANI tahun 2016 mencapai 452% dari realisasi putusan BANI tahun 2015. Dari sisi penyajian utang pihak ketiga, laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyajikannya sesuai surat KSAP Nomor S-26/K.1/KSAP/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Masukan Terkait Kebijakan Akuntansi atas Piutang PNB, Utang Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Sebagian Potensi Kewajiban juga sudah diungkapkan dalam Calc Pengungkapan Penting Lainnya.

Dalam hal sisa termin dari 63 Kontrak yang belum menggugat ke BANI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (dhi BP3TI) tidak dapat mempengaruhi penyedia jasa untuk menyelesaikan Gugatan sesuai dengan nilai Kontrak karena BP3TI dalam posisi sebagai tergugat. Kesungguhan Kementerian Komunikasi dan Informatika (dhi BP3TI) untuk menyelesaikan kewajiban antara lain dilakukan dengan: (a) menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam menyelesaikan utang pihak ketiga mengingat permasalahan tersebut terkait dengan keuangan negara untuk menghindari pelanggaran hukum maupun potensi terjadinya kerugian negara, dan (b) penyelesaian sengketa melibatkan Inspektorat Jenderal, BPKP, Direktorat Jenderal Anggaran, LKPP, KSAP, BPK, dan Jamdatun.

Berdasarkan data proses penyelesaian Utang Pihak Ketiga per tanggal 29 Maret 2017 yang disusun berdasarkan tahapan proses dari tahapan yang paling mendekati proses final penyelesaian sampai dengan proses awal menunjukan bahwa proses penyelesaian utang pihak ketiga yang berasal dari Kontrak Tahun Jamak telah mengalami kemajuan yang signifikan yaitu bahwa hampir seluruh kontrak pekerjaan telah memasuki proses penyelesaian.

Sedangkan terkait dengan permasalahan Utang Pihak Ketiga pada Kementerian Negara/Lembaga lainnya yaitu 1) Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2) Kementerian Dalam Negeri, 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, 4) Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, 5) Lembaga Penyiaran TVRI, 6) Ombusman RI, 7) Badan Narkotika Nasional, 8) Kementerian Kesehatan, dan 9) Kementerian Pariwisata, belum memperoleh tanggapan dari Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan perubahan anggaran;
- b. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran APIP dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial serta pengelolaan Utang Pihak Ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Meminta para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan Belanja Modal dan Barang

Handwritten signature/initials

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima rekomendasi tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan:

- a. Menyampaikan surat kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait peningkatan kapasitas dan peran unit kerja perencanaan, penganggaran, dan perubahan anggaran agar melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap para pengelola keuangan pada seluruh satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga masing-masing mengenai ketentuan dan proses revisi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran tahun anggaran berkenaan;
- b. Menyampaikan surat kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait optimalisasi peran APIP dalam evaluasi pelaksanaan belanja khususnya belanja terkait kegiatan utama di K/L terkait, agar menjadikan APIP K/L sebagai mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dalam rangka meminimalisasi potensi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan anggaran; dan
- c. Menyampaikan surat kepada Para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait tindak lanjut penyelesaian kelebihan pembayaran/ penyimpangan pelaksanaan Belanja Modal dan Barang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar:
 - 1) Mengenakan hukuman disiplin secara tegas kepada para pejabat/pegawai yang melakukan atau terlibat dalam pelanggaran ketentuan;
 - 2) Melakukan perhitungan kelebihan pembayaran dan kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal;
 - 3) Mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal dengan cara pengenaan Tuntutan Ganti Rugi kepada pelaku penyimpangan atau pelanggaran sesuai ketentuan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - 4) Melakukan upaya hukum sesuai dengan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi untuk menimbulkan efek jera;
 - 5) Mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan *governance* dalam pengelolaan keuangan negara dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran; dan
 - 6) Untuk selanjutnya khusus terkait perjalanan dinas luar negeri, agar mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 serta pengasan tanggal keberangkatan dan kepulangan yang dituangkan dalam Surat Tugas sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-410/Kemensetneg/Ses/LN/00/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Jangka Waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Surat Persetujuan PDLN dari Kementerian Sekretariat Negara.

Handwritten signature

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN KEPANJANGAN

A

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASPROV	Asosiasi Provinsi
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
Austrac	<i>Australian Transaction Reports and Analysis Centre</i>

B

BA	Bagian Anggaran
BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAST	Berita Acara Serah Terima
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilu
BHP	Biaya Hak Penggunaan
BHP	Biaya Hak Penyelenggaraan
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNNK	Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BP Batam	Badan Pengusahaan Batam
BP2IP	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayanan
BP3IP	Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayanan
	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
BP3TI	Informatika
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPK-TKI	Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia
BPP	Bendahara Pengeluaran
BPPR	Beban Pusat Persekot Resmi
BT	Bakrie Telekom
DUN	Bendahara Umum Negara

C

CADEP-SSTC	<i>Capacity Development Project for South-South Triangular Cooperation</i>
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CNY	<i>Chinese Yuan</i>

gk Ba t

D

DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	Ditanggung Pemerintah

E

e-rekon	Elektronik Rekonsiliasi
EAS	Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
EFACH	<i>Enhanced Cell-FACH</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

G

GIZ	<i>Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit</i>
GMB	Gas Metana Batubara

H

HKD	<i>Hongkong Dollar</i>
HRK	<i>Croatian Kuna</i>

I

IMTA	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
INASGOC	<i>Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee</i>
IndII	Indonesia Infrastructure Initiative
IPDN	Institut Pemerintahan Dalam Negeri
IPFR	Izin Pita Frekuensi Radio
ISR	Izin Siaran Radio

J

Jamdatun	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JPP	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan
JPY	<i>Japanese Yen</i>
Juklak	Petunjuk Pelaksanaan

Handwritten signature/initials

K

Kanwil	Kantor Wilayah
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenhan	Kementerian Pertahanan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko	Kementerian Koordinator
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informasi
KI	Kekayaan Intelektual
KKKS/K3S	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	Kementerian Negara/Lembaga
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kodam	Komando Daerah Militer
KOICA	<i>Korea International Cooperation Agency</i>
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPLP	Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPU/USO	Kewajiban Pelayanan Universal/ <i>Universal Service Obligation</i>
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
KSM	Keluarga Sangat Miskin
KSO	Kerjasama Operasional
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan

L

LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
Litbang	Penelitian dan Pengembangan
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	Laporan Operasional
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPP	Lembaga Penyiaran Publik
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

M

Menkeu	Menteri Keuangan
MPHL	Memo Pencatatan Hibah Langsung
MPN	Modul Penerimaan Negara

Handwritten signature/initials

MPN G1	Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-1
MPN G2	Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-2

N

NBA	Nusantara Buana Air
NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPP	Nomor Penerimaan Potongan
NTR	Nomor Transaksi Bank
NTP	Nomor Transaksi Pos
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara

O

OMSPAN	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OP	Orang Pribadi
OPN	Optimalisasi Penerimaan Negara

P

PA	Pengguna Anggaran
Paklim	<i>Policy Advice for Environment and Climate Change</i>
Panwaslu	Panitia Pengawas Pemilu
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	<i>Performance-Based Budgeting</i>
PDLN	Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pemda	Pemerintah Daerah
Perpres	Peraturan Presiden
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKH	Program Keluarga Harapan
PKI SER	<i>Public Key Infrastructure Services</i>
PKTJ	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	Pajak Penghasilan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKK	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPN	Pelabuhan Perikanan Nusantara
PPn BM	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PT	Perseroan Terbatas
PU Pera	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RI	Republik Indonesia
----	--------------------

C Bu A

RKA-KL	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
RoD	<i>Record of Discussion</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang

S

SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAJI	<i>Strengthening Access to Justice in Indonesia</i>
SAI	Saldo Anggaran Lebih
Saprodi	Sarana Produksi Padi
SAR	<i>Saudi Arabia Real</i>
Satker	Satuan Kerja
SBM	Standar Biaya Masukan
SDM	Sumber Daya Manusia
SDPPI	Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SIAP	<i>Sustainable Infrastructure Assistance Program</i>
SIDJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
Sikubah	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SIMPONI	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
SISKA	Sistem Informasi Keuangan
SK	Surat Keputusan
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SP	Surat Peringatan
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN	Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SPn	Surat Penagihan
SPP	<i>Social Protection Programme</i>
SPTJ	Surat Pernyataan Tanggung Jawab
SSP	Surat Setoran Pajak
SSTC-NGG	<i>South-South and Triangular Cooperation and Networks for Global Governance</i>
STP	Sekolah Tinggi Pariwisata
STP	<i>Sewage Treatment Plant</i>
STP	Surat Tagihan Pajak
STP BP	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan
Subdit	Sub Direktorat
SUTIP	<i>Sustainable Urban Transportation Improvement Project</i>

T

TA	Tahun Anggaran
TAFISA	<i>The Association For International Sport for All</i>
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Handwritten signature

TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi
TUP	Tambahan Uang Persediaan
TVRI	Televisi Republik Indonesia

U

UNFPA	<i>United Nations Fund for Population Activities</i>
UO	Unit Organisasi
UP	Uang Persediaan
US	<i>United States</i>
USD	<i>United States Dollar</i>
UU	Undang-Undang

W

WP	Wajib Pajak
----	-------------

Handwritten signature

LAMPIRAN

Handwritten signature

DAFTAR PNBP TERLAMBAT DISETOR TAHUN 2016

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan	Jumlah Hari Keterlambatan	Pertanggungjawaban setelah 31/12/2016	Keterangan
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	PNBP Lainnya	3.167.002.860,00	88	0	Keterlambatan penyetoran ke Kas Negara atas 99 transaksi sebesar Rp3.167.002.860,00 (2 s.d 88 hari).
			PNBP Lainnya	1.229.306.400,00		1.229.306.400,00	Sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal 6 Februari 2016 (Penyetoran tersebut dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga dicatat sebagai terlambat setor)
2	Mahkamah Agung	005	PNBP Lainnya	44.999.200,00	7 s.d 31	44.999.200,00	
3	Kelaksanaan Republik Indonesia	006	PNBP Lainnya (Uenda Tilang	15.606.000,00	52		
4	Kementerian Dalam Negeri	010	PNBP Lainnya (Dana Pendidikan Strata-2/S2)	12.719.653.341,00	30	12.719.653.341,00	Pencatatan Penerimaan dalam RKU tidak tertib dan keterlambatan penyetoran biaya pendidikan
5	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	013	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa)	3.608.645.498,24	-	-	Penerapan Metode Official Assessment PNB/P pada Ditjen Kekayaan Intelektual Tidak Konsisten can Saldo Kas di Bendahara sehingga Penerimaan Sebesar Rp3.608.645.498,24 terlambat disetor ke Kas Negara
6	Kementerian Pertanian	018	PNBP Lainnya (Penjualan, Pendapatan Jasa, PPh 21)	70.494.552.381,00	443	-	PNBP terlambat disetor ke Kas Negara pada 11 salker dengan jumlah keterlambatan yang beragam dari 1-443 hari
7	Kementerian Perindustrian	019	PNBP Lainnya (Pendapatan jasa pendidikan, jasa pelayanan, informasi)	12.523.669.635,00	48	-	
8	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	023	PNBP Lainnya (Pendapatan Sowa BMN)	602.101.900,00	33 s.d 19/	602.100.900,00	Sawa BMN alas EAMOLEC dan LPMP Jawa Timur
9	Kementerian Ketenagakerjaan	026	PNBP Lainnya	3.979.595.909,00	264	-	Penyetoran dilakukan melewati 31 Desember 2016 sehingga dicatat sebagai terlambat setor

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan	Jumlah Hari Keterlambatan	Pertanggungjawaban setelah 31/12/2016	Keterangan
10	Kementerian Sosial	027	PNBP (Pendapatan Sewa Gedung, Tanah dan Bangunan)	210.376.000,00	4	210.376.000,00	
11	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	PNBP (Pendapatan Sewa Balai Diklat)	50.500.000,00	4 s.d 35	350.000,00	
			PNBP (Pendapatan Jasa Laboratorium)	298.298.000,00		30.755.000,00	
			PNBP (Pendapatan Jasa dan Penggunaan Wisma)	477.400.000,00	4 s.d 14	10.200.000,00	
12	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	PNBP Lainnya Pendapatan Layanan Pendidikan	489.150.089.327,00		489.150.089.327,00	
13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	PNBP (Pemanfaatan BMN berupa Gedung, Jasa Layanan Perpustakaan dan Diklat)	183.393.540,00	13 s.d 160	-	PNBP yang diterima melalui Staf Pengelola PNBP terlambat disetorkan kepada Bendahara Penerimaan antara 13 s.d. 160 hari. PNBP tersebut sudah disetorkan sebelum 31 Desember 2016.
14	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	PNBP (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi Layanan)	-	-	-	Jangka waktu penyeteroran PNBP ke kas negara dari rekening penampungan BPOM berkisar antara 1 s.d 12 hari sejak diterima di rekening penampungan, dengan waktu rata-rata penyeteroran selama 6 hari (Merupakan temuan sistem pengendalian internal)
15	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana	068	PNBP (Pendapatan Sewa)	79.580.083,00	347	79.580.083,00	Telah disetor tanggal 17 april 2017

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	Sumber Dana/Jenis Pungutan	Nilai Temuan	Jumlah Hari Keterlambatan	Pertanggungjawaban setelah 31/12/2016	Keterangan
	Nasional						
16	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	PNBP (Pendapatan Jasa Pengujian)	1.748.028.427,00	2 s.d 105		Keterlambatan penysetoran PNBP jasa pengujian
17	Badan Kordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional/BIG	083	PNBP Lainnya	1.467.731.015,00	4 s.d 94	4.769.098,00	
18	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	092	PNBP (Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lain)	5.796.000,00	4		Dikronakan fungsi pelayanan yang melekat pada UPT RSON dan PP-ITKON menyebabkan s.d tgl 31 Des 2016 pelayanan tetap diberikan, maka terdapat penerimaan yang belum disetorkan sebesar Rp5.796.000,00 Sudah disetor ke kas negara 4 Januari 2017
19	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	PNBP (Pendapatan Jasa Giro Bank)	18.980.679,43		5.995.157,00	Bank tempat BNPT membuka rekening tidak langsung menysetorkan jasa giro yang diperoleh ke Kas Negara, karena belum ada perjanjian mengenai hal tersebut dengan BNPT. Atas nilai temuan sebelum 31 Desember 2016 sebesar Rp18.980.679,43. Setelah tanggal 31 desember 2017, senilai Rp12.985.522,43 telah disetor ke Kas Negara
20	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	PNBP (Pendapatan Jasa Siaran dan Non Siaran)	91.145.000,00	-	17.445.000,00	Pendapatan Jasa Non Siaran minimal sebesar Rp91.145.000,00 dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp17.445.000,00 Ket. NTPN C284F6QRH749C882 tanggal 12 Mei 2017
			PNBP (Pendapatan Jasa Siaran dan Non Siaran)	49.872.500,00	-	-	a. LP RRI Makassar: terlambat menysetorkan PNBP Jasa Siaran ke kas negara, terdiri dari: Radiogram Rp17.325.000,00 Dialog Interaktif Rp2.500.000 b. Spot Iklan Rp30.137.500,00 c.

DAFTAR PNBP BELUM DISETOR TAHUN 2016

No	Kementerian/Lembaga	BA	Sumber Dana/ Jenis Pungutan	Nilai Temuan (Rp)	Pertanggungjawaban Setelah 31/12/2016	Penjelasan
1	Kejaksaan Republik Indonesia	006	PNBP Lainnya (Denda Tilang dan Blaya Perkara dan uang rampasar)	9.972.946.981,78		
2	Kementerian Luar Negeri	011	PNBP Lainnya	187.071.150,00		Perbedaan Jumlah Dokumen Keimigrasian sebesar SAR52.500.00 (Kurs BI Per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.563,26
3	Kementerian Pertanian	018	PNBP Lainnya	465.020.321,00		Kelebihan pembayaran dan pendapatan sewa pada empat salker yaitu sisa bantuan belum dikembalikan oleh kelompok tani dan sewa ruangan belum dibayar
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	PNBP Lainnya	18.395.684,00		Pendapatan jasa analisa laboratorium Balai Besar Perikanan dan Pengembangan Budidaya Laut Gondo yang belum disetor ke kas Negara
5	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Laboratorium)	609.860.065,00		
6	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Giro)	362.123,00	362.123,00	
7	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Giro)	382.208.369,55		Pendapatan jasa giro dari lembaga keuangan seperti TAFISA World, INASGOC dan ASPROV Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki izin dari Kementerian Keuangan sehingga belum disetor ke kas Negara
	TOTAL			11.635.865.695,33	362.123,00	

DAFTAR PUNGUTAN PNBP YANG TIDAK DIPUNGUT TAHUN 2016

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	NILAI TEMUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Mahkamah Agung	005	PNBP Lainnya	43.193.617,00	
2	Kementerian Dalam Negeri	010	PNBP Lainnya (Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga)	28.278.884,98	BMN berupa tanah seluas 50m2 dimanfaatkan oleh CV Gemala
3	Kementerian Perhubungan	022	PNBP Lainnya (Sewa Perairan)	291.705.000,00	PT Semen Tonasa belum melakukan perpanjang pengurusan sewa perairan namun masi melakukan operasi pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum dapat menyajikan potensi Pendapatan Jasa Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Piutang Pendapatan Jasa Konsesi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
					Pemahaman KSOP Tanjung Emas dan KSOP Cilacap masih kurang terkait dengan Pendapatan kotor Pelindo III sehingga pendapatan Konsesi belum memadai
					Rekonsiliasi dilakukan tanpa menggunakan data pembandingan dari pihak Satker
					PNBP pada kantor KSOP Kelas I Banten belum memadai
					Kota Agung tidak dapat mengetahui besaran PNBP sebenarnya dan berpotensi penyalahgunaan blanko
					Pelaksanaan Rekonsiliasi pendapatan hasil konsesi apda kantor otoritas pelabuhan utama makasar tidak sesuai ketentuan
					Penyajian PNBp pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional satker direktorat sarana perhubungan darat belum memadai
4	Kementerian Agama	025	PNBP Lainnya (Pemanfaatan BMN dari sewa tanah/bangunan Rumah Dinas dan Kantin)	111.185.046,84	Merupakan angka minimal dan belum dipungut s.d akhir pemeriksaan
5	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	PNBP (Pendapatan Jasa)	5.071.789.930,00	Pendapatan Jasa Tambat, Labuh dan Kebersihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan TA

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	NILAI TEMUAN (Rp)	KETERANGAN
			Tambah, Jasa Labuh dan Jasa Kebersihan)		2016 tidak Dipungut Sebesar Rp5.071.789.930,00
6	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	PNBP (Pendapatan Pemanfaatan BMN) Lainnya		BMN berupa tanah dan bangunan seluas 620 m2 dimanfaatkan oleh PT Bina Karya Persero
7	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	PNBP (Pemanfaatan BMN) Lainnya	16.800.000,00	PNBP alas tambahan fasilitas pemaknaan listrik yang menjadi tanggungan Bank BRI dari 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2016 tidak dipungut
8	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	PNBP (Kontribusi Pos dan Nama Domain) Lainnya	-	PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Pos dan Pendaftaran Nama Domain belum dapat dipungut sesuai dengan PP 80 Tahun 2015 dikarenakan keterlambatan penyusunan Permen Juklak dan Juknis PNB
9	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	112	PNBP Lainnya atas BLU	521.030.660,09	Penetapan Tarif Jasa Layanan Beum Sesuai Peraturan Kepala BP Batam
10	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa Lahan Pemanfaatan ATM)		Perempatan ATM pada Lahan RRI Makassar tidak diikuti dengan perjanjian kerjasama penyewaan lahan, penelapan dan pemungutan PNR
	TOTAL			6.083.983.138,91	

DAFTAR PNBK KURANG PUNGUT TAHUN 2016

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	NILAI TEMUAN	PERTANGGUNGJAWABAN SETELAH 31 DESEMBER 2016	KETERANGAN
1	Mahkamah Agung	005	PNBP Lainnya (Sewa Tanah, Gedung, Bangunan)	27.743.260,55	-	PNBP yang berasal sewa tanah gedung dan bangunan minimal sebesar Rp43.193.617 dan PNBK Sewa Rumah Negara sebesar Rp27.743.260,55
2	Kementerian Perhubungan	022	PNBP Lainnya (Pemanfaatan BLU)	274.523.334,00	-	Kurang terima pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
			PNBP Lainnya atas BLU	128.229.488,00	-	Kekurangan Penerimaan pada satker PKTJ Tegal karena adanya kebijakan Direktur yang bertentangan dengan PMK 236/PMK.05/2015 tentang tarif layanan umum
			PNBP Lainnya atas Sewa Perairan	941.344.000,00		Penggunaan perairan oleh PT Semen Bosowa Banyuwangi yang belum dapat diterima oleh negara karena PT Serren Bosowa Banyuwangi belum menandatangani perjanjian penggunaan perairan
3	Kementerian Sosial	027	PNBP Lainnya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	3.471.695,33	-	Sewa PNBK atas sewa pemanfaatan BMN
4	Kementerian Pariwisata	040	PNBP Lainnya (Biaya Pendidikan dan Penggunaan Hotel)	178.356.801,40	-	1. Biaya pendidikan belum seluruhnya dibayar oleh mahasiswa STP nusa dua bali dan STP Bandung yang berada pada asa tenggang perkuliahan. 2. Pemakaian hotel ENHAIL Bandung

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	NILAI TEMUAN	PERTANGGUNGJAWABAN SETELAH 31 DESEMBER 2016	KETERANGAN
5	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	PNBP Lainnya (Layanan Pendidikan dan Pemanfaatan Aset)	16.399.689.330,00	9.665.665,00	PNBP tersebut sudah Disetor senilai Rp9.665.665,00 sehingga sisa PNBP yang kurang dipungut sebesar Rp16.424.641.993,00
6	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	081	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa)	193.084.309,00	-	Terdapat pelanggan yang melakukan pemotongan atas pembayaran pelayanan jasa. Jumlah pemotongan selama Tahun 2016 sebesar Rp193.084.309,00
7	Badan Pengawasan Keuangan Dan Perimbangan	089	PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa Rumah Dinas)	4.487.152,00	4.487.152,00	Pendapatan sewa rumah dinas yang belum/kurang dipungut dari sebelas satker BPKP atas pembayaran rumah dinas sebanyak 34 unit
8	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	112	PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa atas Lahan dan Bangunan yang belum dipungut)	1.355.543.097,50	-	Pendapatan dari KSO dan Jasa Sewa Kurang Diterima
9	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	PNBP Lainnya Sewa lahan BLU	44.480.630,00	-	Pendapatan sewa atas lahan dan bangunan belum dipungut.
	TOTAL			19.550.963.097,78	14.152.817,00	

DAFTAR PUNGUTAN PNBP TANPA DASAR HUKUM DAN DIGUNAKAN LANGSUNG UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL TAHUN 2016

NO	K/L	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN Operasional (Rp)	PENERIMAAN Non Operasional (Rp)	PENGUNAAN Operasional (Rp)	PENGUNAAN Non Operasional (Rp)	SISA KAS 31/12/2016	PERTANGGUNG JAWABAN 31/12/2016	KET
1	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	023	PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa Tarif BPCE)	-	-	-	-	-	-	Rekomendasi Pengelolaan PNBP dari Pengelolaan Cagar Budaya belum sepenuhnya ditindaklanjuti terkait dengan penggunaan langsung PNBP pada UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah dan Balai Konservasi Borobudur
2	Kementerian Kesehatan	024	PNBP Lainnya (Ethical Clearance)	59.050.000,00	-	25.200.000,00	-	33.850.000,00	-	Dana ethical clearance yang diperoleh diluar mekanisme APBN yang belum memiliki dasar hukum
			PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa atas Wisma)	278.320.000,00	-	192.133.000,00	-	-	-	

NO	K/L	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN Operasional (Rp)	PENERIMAAN Non Operasional (Rp)	PENGUNAAN Operasional (Rp)	PENGUNAAN Non Operasional (Rp)	SISA KAS 31/12/2016	PERTANGGUNG JAWABAN 31/12/2016	KET
3	Kementerian Agama	025	PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa Ruang Akomodasi Asrama Haji)	38.997.564.130,00	-	20.720.364.554,00	-	-	-	Pergunaan langsung digunakan untuk membiayai operasional Asrama/Wisma Haji, jamuan tamu, pembayaran tagihan (listrik, air, dan telepon), pemeliharaan gedung, pembayaran gaji karyawan, pembelian aset.
4	Komitorian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	PNBP Lainnya (Layanan PTN)	1.702.380.843,00	-	1.304.838.603,00	-	397.542.240,00	-	-
5	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	PNBP Lainnya (Penjualan Hasil Inovasi Beras Sehat)	-	1.050.0000,00	-	-	-	-	-
6	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional/BIG	083	PNBP Lainnya	292.900.000,00	16.000.000,00	292.896.500,00	16.000.000,00	3.500,00	-	Pemanfaatan Sarana/Prasara na Diklat
7	Kementerian	092				-				

NO	K/L	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN Operasional (Rp)	PENGUNAAN Operasional (Rp)	PENGUNAAN Non Operasional (Rp)	SISA KAS 31/12/2016	PERTANGGUNG JAWABAN 31/12/2016	KET
	Pemuda dan Olahraga		PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa Lahan Kantin)	61.000.000,00		16.000.000,00			
8	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	PNBP Lainnya	38.220.000,00	15.720.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00	Penerimaan dari berasal pungutan dana kontribusi keamanan dan kebersihan atas sewa menara sebesar Rp38.220.000 Penggunaan tahun 2016 = 22.500.000 Penggunaan pada bulan Feb 2017 = Rp2.500.000
			PNBP Lainnya	105.000.000,00	73.600.000,00		31.400.000,00	31.400.000,00	Penerimaan dari berasal pungutan dana kontribusi keamanan dan kebersihan atas sewa menara sebesar Rp105.000.000 Penggunaan tahun 2016 = 73.600.000 Penggunaan pada bulan Feb 2017 = 31.400.000
			PNBP Lainnya	30.000.000,00	22.800.000,00		7.200.000,00	30.000.000,00	Penerimaan

NO	K/L	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN Operasional (Rp)	PENERIMAAN Non Operasional (Rp)	PENGUNAAN Operasional (Rp)	PENGUNAAN Non Operasional (Rp)	SISA KAS 31/12/2016	PERTANGGUNG JAWABAN 31/12/2016	KET
										berasal dari pungutan dana kontribusi keamanan dan kebersihan atas sewa menara sebesar Rp30.000.000 Penggunaan tahun 2016 = 22.800.000 Penggunaan pada bulan Feb 2017 = 7.200.000
	TOTAL			41.503.434.973,00	78.050.000,00	22.647.552.657,00	77.000.000,00	492.495.740,00	83.900.000,00	
	Total (Operasional dan Non Operasional)			41.581.484.973,00		22.724.552.657,23				

**PERMASALAHAN SIGNIFIKAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN PNBP
(ASPEK KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

NO	KEMENTERIAN /LEMBAGA	BA	SUMBER DANA/JENIS PUNGUTAN	NILAI TEMUAN (Rp)	PERTANGGUNGJAWABAN SETELAH 31 DESEMBER 2016	KETERANGAN
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa)	130.491.140,00		Pelaksanaan sewa atas tujuh BMN tidak sesuai ketentuan dan keterlambatan pembayaran sewa empat BMN belum dikenakan denda sebesar Rp130.491.140,00
2	Mahkamah Agung	005	PNBP Lainnya	3.654.000,00		
3	Kejaksaan Republik Indonesia	006	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Giro)	271.146.361,00		Pendapatan Jasa Giro atas rekening penampungan dana tilipan Kejari Jaksel minimal sebesar Rp271.146.361,00 belum disetorkan ke Kas Negara
			PNBP Lainnya (Pendapatan Uang Pengganti TIPIKOR)	28.483.426.476,86		Mutasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp12.401.630.984,51 dan pengembalian ke pihak ketiga sebesar Rp16.081.795.492,35 tidak dapat ditelusur ke dokumen sumber
			PNBP Lainnya (Pendapatan Uang Pengganti TIPIKOR)	40.000.000,00		Terdapat dua kali penyetoran sebesar Rp80.000.000,00 atau Rp40.000.000,00 per penyetoran, untuk membayar Uang Pengganti atas perkara yang sama.
			PNBP Lainnya (Pendapatan Penjualan Barang Sitaan/Rampasan)	25.469.522.445,00		Terdapat barang rampasan atas perkara yang leleh inkraht namun belum dieksekusi dengan cara dilelang oleh Subbagian Pembinaan Kejari Kendari, Kolaka, Bitung, Banjarmasin, Konawe dan Surakarta
			PNBP Lainnya (Pendapatan Penjualan Barang Sitaan/Rampasan)	292.658.627,00		Barang bukti berupa uang tunai hasil dari lelang kayu yang dititip di BRI cabang Kebun Jeruk dengan nomor rekening 016801000415990 ditransfer kepada rekening nomor 4020900221 tanpa sepengetahuan
			PNBP Lainnya (Pendapatan Penjualan Barang Sitaan/Rampasan)	2.658.000,00		Uang rampasan atas nama SM, PM, dan DP pada Kejari Kotamobagu sebesar Rp2.658.000,00 tidak diketahui

						keberadaannya
						Salah Mata Anggaran Penerimaan sewaktu menyertakan ke Kas Negara, seharusnya disetor ke MAP 423416, namun disetor ke MAP 423114
						Salah Mata Anggaran Penerimaan sewaktu menyertakan ke Kas Negara, seharusnya disetor ke MAP 423418, namun disetor ke MAP 423114
4	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	013	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa)	1.035.500.000,00	244.908.620,00	Realisasi PNBPNP dirjen AHU menggunakan angka dit SITP KEMENKEU
			PNBP Lainnya (Pendapatan uang rampasan tindak pidana umum)	4.484.000,00	8.592.632.703,90	Potensi kekurangan penerimaan negara/ merugikan negara sebesar Rp8.592.632.703,90 yang berasal dari 25 Kantor Cabang BRI pengelola PNBPNP VKSK
5	Kementerian Keuangan	015	PNBP Lainnya (Pemanfaatan Aset)	108.494.100,00	108.494.100,00	Potensi Penerimaan negara atas sewa rumah negara tidak dapat direalisasikan minimal sebesar Rp108.494.100,00
			PNBP Lainnya (Pemanfaatan atas Aset Tetap)	8.806.636.361,00	8.806.636.361,00	Potensi PNBPNP dari pemanfaatan BMN tidak terealisasi minimal Rp8.806.636.361,00
6	Kementerian Pertanian	018	PNBP Lainnya (Pendapatan atas Jaminan Pelaksanaan)	652.390.000,00	652.390.000,00	Monitoring dan Pencatatan Penerimaan dan penyerahan uang sewa peminjaman fasilitas gedung dan bangunan diklat tidak memadai
7	Kementerian Perindustrian	019	PNBP Lainnya (Pengujian bahan, pencemaran, dan sertifikasi)			Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan PNBPNP pada Kementerian Perindustrian Kurang Memadai
8	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	020	PNBP Lainnya	6.448.737.422,00	6.448.737.422,00	Kurang bayar iuran tetap ditambah denda sebesar USD12.357,58 dan kurang bayar royalti dan DHPB ditambah denda sebesar USD1.644.934,52 dan Rp6.448.737.422,56
			PNBP Lainnya			Peraturan dan perhitungan denda atas pembayaran iuran pada BPH Migas yang melewati batas waktu belum memadai

9	Kementerian Perhubungan	022	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Konsesi Pengusahaan Pelabuhan)			Pengelolaan PNBP Jasa Konsesi Pengusahaan Pelabuhan pada Ditjen Perhubungan Laut Belum Memadai Terjadi Pada salter KSOP Tanjung Emas, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, KSOP Kelas I Panjang, Kantor OP Makassar
			PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Konsesi Pengusahaan Pelabuhan)			Bendahara Penerima dan Petugas Operasional PNBP tidak pernah melakukan rekonsiliasi internal terkait besaran dan rincian PNBP, penggunaan blanko nota tagih, kuitansi, dan SPB yang telah dipergunakan
10	Kementerian Kesehatan	024	PNBP Lainnya atas Jasa Layanan Perbankan BLU	235.486.057,86		Penerimaan bunga deposito dan jasa giro pada poltekkes medan dikenakan PPH 20% sebesar Rp235.486.057,86
			PNBP Lainnya (Bunga Deposito)	715.905.387,00		Ponatausahaan PNBP belum memadai atas Penerimaan Bunga Deposito
11	Kementerian Agama	025	PNBP Lainnya (Pendapatan pendidikan dan sewa oleh pihak ketiga)	41.794.516.669,16		Penerimaan yang dipungut dengan tarif yang ditetapkan oleh salter Kemenag belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan
			PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Giro bank)	712.397.223,45		Penerimaan atas jasa giro rekening pemerintah dikenakan potongan PPH
12	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	PNBP PKH	-		adanya potensi penerimaan PNBP PSDH DR atas Izin Pemanfaatan Kayu yang tidak diterima dikarenakan: 1. tidak akuratnya perhitungan luas lahan IPK; 2. penerbitan IPK yang tidak sesuai ketentuan karena tidak adanya RTRW dan perusahaan belum memiliki izin pelepasan kawasan
			PNBP Lainnya (Pendapatan Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi)	8.888.559.601,23		Terdapat PNBP yang bersumber dari PSDH dan DR yang belum teridentifikasi; Tidak adanya rekonsiliasi Data PNBP antara Bendahara Penerimaan Biro Keuangan dengan Direktorat IPHH Ditjen

						PHPL
13	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032			133.981.500,00	
14	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa)		666.253.000,00	Mekanisme penyetoran pendapatan dilakukan secara tunai
			PNBP Lainnya		64.163.697,00	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, Penerimaan kembali belanja bantuan sosial TAYL, Pendapatan anggaran lain-lain
15	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa)		104.740.000,00	Pemanfaatan lahan KBUMN untuk AIM dan poliklinik tanpa perjanjian dan pembayaran. KBUMN mengajukan konsep perjanjian dengan nilai sementara sebesar Rp104.740.000,00 di akhir tanggal sewa
			PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa)		15.860.798.000,00	15 dari 17 perjanjian tidak menyebutkan metode dan waktu pembayaran sehingga para penyewa membayar nilai sewa secara mencicil antara 5 s.d 608 hari setelah tanggal mulai sewa
			PNBP Lainnya (Pendapatan Sewa)			Tenant menggunakan fasilitas listrik dan air milik KBUMN tanpa dikenakan tagihan pemakaian karena KBUMN belum memasang meteran listrik dan air atas tenant tersebut.
16	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang	056	PNBP Lainnya		14.878.637.812,00	Pendapatan hak dan perijinan sebesar Rp9,02M dan pendapatan jasa lainnya sebesar Rp5,86M tidak didukung dokumen sumber yang memadai
17	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito BLU)		146.691.697.142,82	Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito BLU BP3TI selama tahun 2016 terdiri potongan pajak bunga deposito Rp144.661.438.161,93 dan potongan pajak jasa giro sebesar Rp2.030.258.980,89
						Hasil pemeriksaan atas pengeluaran PNBPN menunjukkan bahwa pencatatan penerimaan pembayaran kontribusi

					KPU/JSO tidak informatif	dari BKU yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan tidak diketahui penerimaan yang dibukukan berasal dari wajib setor mana dan tagihan yang mana
18	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelayanan)			Pedoman pengelolaan PNBP BPOM yang ditetapkan dengan SK Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.06.13.3062 Tahun 2013 belum disesuaikan dengan adanya pembayaran SIMPONI dan registrasi produk secara elektronik. Implementasi SIMPONI masih terbatas pada beberapa satker dan layanan serta terdapat penemuan yang tidak teridentifikasi sejumlah Rp23.100.000,00. penerimaan tersebut melalui rek Badan POM
			PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelayanan)			PNBP SKI produk pangan olahan di Balai POM Batam tahun 2016 belum seluruhnya diterima karena kurang koordinasi antara Balai POM Batam, BP Batam, dan Bea Cukai dlm rangka pemasukan/impor pangan olahan
			PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelayanan)			Aplikasi e-payment belum sepenuhnya mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual.
			PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelayanan)			Pelaporan penyelesaian layanan publik belum memadai sehingga nilai pendapatan LO dan pendapatan diterima di muka tidak valid. Penjelasan: Nilai pendapatan LO dan pendapatan diterima di muka berdasarkan database layanan publik manual dan aplikasi yang belum dimutakhirkan.
19	Lembaga Ketahanan Nasional	064	PNBP Lainnya			Lemhanas RI menyewakan gedung untuk kegiatan usaha kepada Pihak Ketiga belum didukung dengan ijin pemanfaatan dari Kementerian Keuangan
20	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080				a. Pertentangan kepentingan pada kegiatan pelayanan jasa yang

						diaksanakan, b. informasi layanan jasa yang diberikan tidak transparan, c. adanya pihak ketiga yang menjadi perantara pelayanan yang dalam menggunakan jasa layanan milik BATAN dengan membebani biaya tambahan kepada pelanggan d. Format pencatatan transaksi pendapatan tidak terfif, e tidak dilakukan rekonsiliasi pencatatan pendapatan secara berkala
21	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	081	PNBP BLU	1.988.948.080,00		Sisa Biaya Kegiatan Insentif Riset Sebesar Rp1,98 Miliar tidak Dikembalikan ke Kas Negara, diakui sebagai pendapatan pada BLU
			PNBP Lainnya atau Pemanfaatan Aset	190.699.711,00		
			PNBP Lainnya	125.020.000,00		Terdapat perjanjian yang sewa yang sudah dalaarsa sehingga kurang pungut
22	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa)	126.784.980,00		Pajak penghasilan atas jasa giro dibebaskan setiap bulannya dengan mendebit rekening giro
23	Badan Standarisasi Nasional	084	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Akreditasi)			Terdapat Pelaksanaan Akreditasi kepada LPK Non Pemerintah yang Dilakukan Sebelum BSN Menerima Pembayaran Jasa Akreditasi
			PNBP Lainnya			PP PNPB STIA LAN Makassar ada kesalahan numeklatur, sehingga tidak berani memungut PNPB Seminar Proposal karena numeklatur yang tertulis adalah Ujian Akhir
24	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	Rupiah Murni			Perjanjian antara BPKP dengan pihak ketiga tidak mengatur terkait klausul denda atau sanksi apabila salah satu pihak melakukan cadera janji, dan perpanjangan perjanjian ditambah ditandatangani.
			Rupiah Murni			Pencatatan dalam pengelolaan PNPB belum terfif sehingga Bendahara Penerimaan kesulitan dalam melakukan penelusuran atas PNPB yang telah

25	Kementerian Perdagangan	090	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Tenaga Kalibrasi Alat)			disetor ke Kas Negara Terdapat kelemahan pada SOP, dan pelaksanaan pelayanan di Balai Kalibrasi tidak sesuai ketentuan, maka waktu penyelesaian pekerjaan kalibrasi berpotensi tidak segera selesai.
			PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Penjualan SKA)			PNBP SKA dipungut dan ditatausahakan oleh operator SKA yang bukan Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Penyetoran PNBPs SKA dilakukan secara berkala
26	Komisi Pemberantasan Korupsi	093	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Giro)	1.864.453.581,00		Sekretaris Jenderal KPK selaku KPA belum mengajukan kepada pihak bank perihal mekanisme pelimpahan otomatis jasa giro ke Kas Negara (sudah disetor 6/4/2017)
27	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	PNBP Lainnya (Pendapatan Jasa Giro)	16.487.815,61		Rekening Kas Bendahara Pengeluaran masih dikenakan Pajak atas Bunga Jasa Giro
28	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	PNBP Lainnya (Jasa Siaran Sewa Peralatan Mesin dan Sewa Gedung dan Bangunan)			Kelemahan Pengendalian dalam pengelolaan PNBPs LPP RRI
29	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	PNBP Lainnya (Pendapatan Non Siaran)	36.949.608.197,00		Pengelolaan dan penatausahaan pendapatan Non siaran tidak memadai
	Total			352.596.558.691,89		

**Rincian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Piutang Pajak
yang Belum Dilunasi Melalui Kompensasi**

No	NPWP	Piutang	SP2D	Kompensasi
1	010000024	119.724.486	7.677.263.352	119.724.486
2	010000115	4.503.000	125.783.558.980	4.503.000
3	010000131	343.800.686	51.168.021.305	343.800.686
4	010000156	162.892.357	1.675.412.729	162.892.357
5	010000297	59.000.000	183.450.108	59.000.000
6	010000347	102.255.958	21.206.677.470	102.255.958
7	010000511	4.276.408	10.630.220.261	4.276.408
8	010000545	37.497.056.927	211.161.583.934	37.497.056.927
9	010000677	690.408.206	6.831.712.306	690.408.206
10	010000750	83.904.543	4.752.084.431	83.904.543
11	010000784	1.076.184	37.103.702.612	1.076.184
12	010000958	494.888.290	14.700.325.965	494.888.290
13	010001204	162.469.752	87.949.000	87.949.000
14	010001527	31.560.145	24.666.255.199	31.560.145
15	010001709	4.917.620	3.588.425.272	4.917.620
16	010001793	2.859.992	13.724.824.790	2.859.992
17	010001832	2.818.347.812	249.760.296.677	2.818.347.812
18	010001873	3.509.999	86.981.815.846	3.509.999
19	010001923	16.340.800.278	43.687.822.718	16.340.800.278
20	010002285	421.473.660	11.182.823.602	421.473.660
21	010002756	5.005.440	1.473.164.574	5.005.440
22	010003960	2.964.317.618	1.817.667.783	1.817.667.783
23	010004547	9.526.729	2.351.133	2.351.133
24	010004919	105.183.390	2.657.432	2.657.432
25	010004976	281.099.285	12.520.089.948	281.099.285
26	010005023	20.029.739	420.371.365.237	20.029.739
27	010005148	26.387.576	25.201.161.637	26.387.576
28	010005320	160.504.631	130.535.842	130.535.842
29	010005551	46.072.996	8.996.569.726	46.072.996
30	010005668	16.776.319.819	514.487.753.877	16.776.319.819
31	010005742	7.114.244	1.838.108.964	7.114.244
32	010005858	16.584.170	8.705.287.492	16.584.170
33	010005890	26.613.984	7.401.200	26.613.984
34	010006054	341.132.742	1.810.068.516	341.132.742
35	010006344	62.452.291	7.382.538.782	62.452.291
36	010006591	3.663.914	9.742.714.271	3.663.914
37	010006609	125.500.089	7.040.938.053	125.500.089
38	010006690	231.644.798	7.968.155.319	231.644.798
39	010007524	2.482.447	4.192.248.851	2.482.447
40	010007684	11.459.735	22.070.591.086	11.459.735
41	010007698	87.673.060	13.610.794.863	87.673.060
42	010007813	434.842.274	14.618.385.790	434.842.274
43	010008639	5.968.162	23.595.875.770	5.968.162
44	010009835	1.848.915	35.467.544.135	1.848.915
45	010010189	7.410.496	1.757.492.189	7.410.496
46	010010619	4.800.000	568.732.366	4.800.000
47	010011021	682.757.711	14.876.352.024	682.757.711
48	010012573	5.888.653	2.377.612.128	5.888.653
49	010015061	192.897.034	8.465.007.210	192.897.034
50	010018087	786.458.562	1.448.528.248.688	786.458.562
51	010018103	206.391.586	482.922.868.589	206.391.586
52	010018111	4.136.471.341	148.910.736.513	4.136.471.341
53	010018129	39.372.553	87.362.926.259	39.372.553
54	010018137	1.418.721.091	152.495.652.813	1.418.721.091
55	010018145	49.782.016	437.847.439	49.782.016
56	010018152	82.461.781	155.195.664.465	82.461.781
57	010018277	191.012.877	27.204.965.098	191.012.877
58	010018384	23.619.513	7.828.155.073	23.619.513
59	010018517	186.077.930	1.238.380.987	186.077.930
60	010018616	40.310.000	57.386.217.116	40.310.000
61	010018632	57.713.054	543.947.093.904	57.713.054

62	010316657	18.163.335	457.340.031.855	18.163.335
63	010316681	616.487.313	123.927.488.457	616.487.313
64	010316806	1.204.865.255	213.412.911.275	1.204.865.255
65	010316988	2.951.952	766.917.426	2.951.952
66	010317036	2.362.427	102.152.103.801	2.362.427
67	010317051	2.534.058	6.581.122.631	2.534.058
68	010317358	241.027.642	3.783.058.888	241.027.642
69	010317580	3.428.056	5.837.712.307	3.428.056
70	010317788	1.673.522.491	8.157.794.674	1.673.522.491
71	010317804	95.316.058	9.708.846.094	95.316.058
72	010317911	242.653.108	1.317.967.161	242.653.108
73	010317929	3.728.090.239	45.430.001.604	3.728.090.239
74	010317986	86.919.910	1.166.826.151	86.919.910
75	010318018	1.344.081	13.046.638.705	1.344.081
76	010319156	1.121.195.870	915.588.918	915.588.918
77	010319685	24.082.401	4.095.354.688	24.082.401
78	010320717	41.502.694	28.254.405.610	41.502.694
79	010320733	218.899.312	38.317.058.983	218.899.312
80	010320808	100.426.044	287.265.699	100.426.044
81	010320949	1.200.000	62.726.633.956	1.200.000
82	010321459	3.500.000	25.008.105	3.500.000
83	010021707	49.796.957	201.637.401	49.796.957
84	010021731	2.353.704.993	22.327.160.817	2.353.704.993
85	010021772	6.001.842	91.307.700	6.001.842
86	010021897	3.236.324.978	45.127.498.199	3.236.324.978
87	010022200	5.151.175	958.069.655	5.151.175
88	010022242	52.123.290	451.164.800	52.123.290
89	010024131	1.000.000	30.120.543.035	1.000.000
90	010027431	101.966.953	8.330.348.000	101.966.953
91	010027498	384.745.564	574.984.578	384.745.564
92	010029181	1.097.989.165	1.091.350.023	1.091.350.023
93	010029421	85.160.656	269.421.000	85.160.656
94	010029454	9.120.788	152.671.578.894	9.120.788
95	010029702	3.460.092	72.858.166	3.460.092
96	010029710	7.000.000	3.099.018.321	7.000.000
97	010029387	25.674.505.911	12.521.615.298	12.521.615.293
98	010029445	64.148.014	139.908.732.981	64.148.014
99	010031432	326.122.469	116.551.758	116.551.758
100	010031524	2.159.735	30.150.039	2.159.735
101	010031532	14.301.357	310.857.015	14.301.357
102	010032605	20.351.196	259.326.673.859	20.351.196
103	010600039	4.296.033	33.864.555.204	4.296.033
104	010600047	16.545.845	20.979.115.754	16.545.845
105	010600052	1.217.317	1.711.763.432	1.217.317
106	010600112	3.259.181	6.779.923.113	3.259.181
107	010601441	3.252.492	45.564.257.652	3.252.492
108	010602134	47.243.720	6.608.379.406	47.243.720
109	010602688	69.843.643	78.872.238.336	69.843.643
110	010603140	8.729.096	3.277.790.093	8.729.096
111	010606036	10.183.755	1.272.235.504	10.183.755
112	010606044	1.100.000	408.822.444	1.100.000
113	010606158	14.009.659	6.096.520.785	14.009.659
114	010610004	46.463.298	81.349.835.201	46.463.298
115	010610053	1.754.216	126.639.185.821	1.754.216
116	010610137	2.777.849.078	3.355.707.850	2.777.849.078
117	010610487	12.589.417	95.174.785	12.589.417
118	010611275	182.270.982	18.903.071.561	182.270.982
119	010611283	221.659.937	28.364.113.745	221.659.937
120	010611317	470.523.561	24.253.743.189	470.523.561
121	010611325	51.870.486	13.590.321.765	51.870.486
122	010611358	14.186.345	71.337.687.676	14.186.345
123	010611366	1.314.613	13.899.466.220	1.314.613
124	010611374	64.210.686	22.872.967.446	64.210.686
125	010611549	96.500.253	1.864.996	1.864.996
126	010611705	19.817.441	17.497.609.091	19.817.441
127	010611739	359.079.227	836.878.350	359.079.227

128	010611846	52.594.224	109.822.083.834	52.594.224
129	010611861	705.093.942	632.604.394	632.604.394
130	010611879	105.259.889	8.814.189.046	105.259.889
131	010612281	42.644.996	90.198.1'0.185	42.644.996
132	010612695	57.185.508	34.151.660.043	57.185.508
133	010613438	34.034.521	7.901.000.000	34.034.521
134	010613552	3.020.925	89.943.329.942	3.020.925
135	010615201	68.964.086	4.026.353.243	68.964.086
136	010615359	1.264.070	670.319.313	1.264.070
137	010615375	45.843.632	2.684.079.127	45.843.632
138	010615383	4.586.525	1.826.472.769	4.586.525
139	010615540	75.162.484	1.886.901.757	75.162.484
140	010615599	1.257.770.832	89.004.503.360	1.257.770.832
141	010615771	1.105.357.260	13.116.492.408	1.105.357.260
142	010615839	85.639.737	6.780.897.978	85.639.737
143	010616050	1.000.000	23.128.880	1.000.000
144	010616134	49.376.600	9.386.021.753	49.376.600
145	010616175	1.288.661	289.411.265.754	1.288.661
146	010616233	6.056.735	436.885.568	6.056.735
147	010616357	6.335.377	139.081.122.547	6.335.377
148	010617371	207.626.934	2.096.174.494	207.626.934
149	010617421	11.474.822	724.705.685	11.474.822
150	010617686	18.452.441	331.267.503	18.452.441
151	010617975	1.807.101.692	26.748.265.648	1.807.101.692
152	010618015	13.224.791	2.042.935.895	13.224.791
153	010618634	21.820.337.496	4.339.223.048	4.339.223.048
154	010618874	2.135.951	109.466.422	2.135.951
155	010619427	2.598.447	8.852.307.462	2.598.447
156	010619823	7.810.432	365.993.465	7.810.432
157	010620458	659.970.043	636.551.729	636.551.729
158	010620649	59.398.856	6.868.630.229	59.398.856
159	010621126	317.226.612	756.296.672	317.226.612
160	010621571	52.138.237	16.286.891.726	52.138.237
161	010621811	1.802.000	14.100.391.769	1.802.000
162	010621944	495.105.250	397.191.717	397.191.717
163	010622165	198.824.666	18.230.319.696	198.824.666
164	010622280	6.712.638	5.126.059.216	6.712.638
165	010622660	139.022.291	9.357.140.799	139.022.291
166	010622876	23.939.457	1.833.569.219	23.939.457
167	010623296	27.829.192	19.902.269.618	27.829.192
168	010623841	14.421.824	16.534.743.348	14.421.824
169	010624153	1.000.000	2.736.108.504	1.000.000
170	010624159	11.148.405	47.786.169.308	11.148.405
171	010680015	33.000.000	371.728.104	33.000.000
172	010680213	8.881.264	727.623.587	8.881.264
173	010691160	6.884.514	1.488.027.557	6.884.514
174	010691459	133.952.297	3.572.271.637	133.952.297
175	010691640	21.328.167	623.816.911	21.328.167
176	010692010	12.645.737	23.825.000	12.645.737
177	010692507	11.495.686	622.427.430	11.495.686
178	010692580	4.500.000	11.269.528.120	4.500.000
179	010692606	1.261.520	95.450.314	1.261.520
180	010693232	23.276.956	58.873.461.734	23.276.956
181	010693273	2.184.399	9.984.052.721	2.184.399
182	010693505	148.131.570	9.503.036.974	148.131.570
183	010693554	282.908.025	3.396.083.144	282.908.025
184	010693752	64.531.365	262.788.709	64.531.365
185	010694263	17.180.013	1.068.642.477	17.180.013
186	010694560	362.882.410	658.558.835	362.882.410
187	010694941	3.429.300	693.575.428	3.429.300
188	010695146	8.840.888	394.629.769	8.840.888
189	010695260	2.101.581.774	9.849.972.370	2.101.581.774
190	010695369	1.216.786.392	3.681.558.440.590	1.216.786.392
191	010695633	3.292.792	1.958.694.470	3.292.792
192	010695807	585.504.259	72.562.131.132	585.504.259
193	010695849	26.746.888	48.660.616.535	26.746.888

194	010700391	56.243.096	1.446.176.491	56.243.096
195	010702199	2.494.399	27.516.653.414	2.494.399
196	010706141	1.898.211.208	3.929.011.782	1.898.211.208
197	010706232	4.019.296	699.803.328	4.019.296
198	010706323	6.329.140	36.798.785.306	6.329.140
199	010706570	138.635.013	40.166.748.718	138.635.013
200	010706828	94.246.047	1.420.136.848	94.246.047
201	010707172	2.360.503	1.645.500.117	2.360.503
202	010707206	1.527.390.465	15.871.936.652	1.527.390.465
203	010707438	16.197.593	5.524.272.748	16.197.593
204	010707479	5.958.640	43.937.082.474	5.958.640
205	010707628	1.029.420.235	4.118.116.804	1.029.420.235
206	010708154	9.087.707	4.255.346.738	9.087.707
207	010708840	9.391.548.642	1.049.454.809	1.049.454.809
208	010709111	3.096.187	123.928.131	3.096.187
209	010709392	7.677.465	8.905.209.781	7.677.465
210	010709434	7.046.912	983.433.397	7.046.912
211	010709913	241.772.328	14.082.581.186	241.772.328
212	010710010	961.535.542	25.433.480.149	961.535.542
213	010710705	624.199.022	304.256.839	304.256.839
214	010710739	2.302.619	157.372.778.292	2.302.619
215	010711323	7.964.978	309.253.302.383	7.964.978
216	010711455	49.963.406	565.998.757	49.963.406
217	010711745	470.073.788	188.312.573	188.312.573
218	010711968	3.632.942	6.863.355.235	3.632.942
219	010712370	434.513.586	86.229.994.305	434.513.586
220	010712481	283.653.494	12.912.630	12.912.630
221	010713097	49.383.864	1.946.870.101	49.383.864
222	010713105	115.344.947	620.716.890	115.344.947
223	010713113	181.750.712	8.734.990.373	181.750.712
224	010713390	423.425.524	264.358.274	264.358.274
225	010714186	289.307.319	2.747.007.795	289.307.319
226	010714202	1.648.906	24.132.062.578	1.648.906
227	010714459	3.645.011	7.511.345.806	3.645.011
228	010715027	105.766.865	2.696.679.057	105.766.865
229	010715142	4.242.744	110.657.424	4.242.744
230	010715233	2.072.408	84.710.194	2.072.408
231	010717031	3.152.800.000	244.609.931	244.609.931
232	010717130	1.206.320	626.972.624	1.206.320
233	010717189	4.455.087	1.435.149.570	4.455.087
234	010717296	1.985.182	1.067.991.058	1.985.182
235	010717338	5.817.774	1.083.736.451	5.817.774
236	010717833	1.200.000	2.029.074.144	1.200.000
237	010718294	144.664.395	3.988.814.309	144.664.395
238	010718401	243.552.580	15.379.420.125	243.552.580
239	010718898	341.558.069	9.047.408.707	341.558.069
240	010719102	537.098.342	2.013.111.665	537.098.342
241	010720100	466.181.787	1.972.644.414	466.181.787
242	010720605	2.953.653	306.252.713.735	2.953.653
243	010720753	82.996.539	2.950.220.200	82.996.539
244	010720845	82.668.463	6.355.381.706	82.668.463
245	010801876	2.595.758	10.009.751.125	2.595.758
246	010807618	2.036.609.944	3.565.540.433	2.036.609.944
247	010815843	2.743.806.361	1.141.505.760	1.141.505.760
248	010815650	1.157.161.474	584.991.067	1.157.161.474
249	010815676	273.998.228	508.242.802	273.998.228
250	010816007	196.276.947	3.207.104.779	196.276.947
251	010816262	22.106.686	387.510.506	22.106.686
252	010816361	72.937.210	16.895.497.714	72.937.210
253	010816791	10.290.069	247.710.076.063	10.290.069
254	010816809	13.105.785	714.568.365	13.105.785
255	010816817	1.074.893.826	17.451.383.510	1.074.893.826
256	010816882	524.126.168	8.826.635.464	524.126.168
257	010821825	1.780.355	2.004.281.746	1.780.355
258	010823052	3.844.944	12.836.177	3.844.944
259	010826261	8.665.961	661.587.030	8.665.961

260	010827847	62.812.817	5.922.131.594	62.812.817
261	010929760	9.515.982	4.252.320.138	9.515.982
262	010932806	421.771.634	170.824.479	170.824.479
263	010947291	1.600.000	917.898.387	1.600.000
264	010847341	855.899.485	3.108.915.535	855.899.485
265	010847416	55.376.105	210.104.423	55.376.105
266	011000163	1.219.251.198	694.559.405.767	1.219.251.198
267	011000171	6.400.182	83.129.256	6.400.182
268	011000379	116.736.270	7.739.795.439	116.736.270
269	011004371	4.663.136	2.473.901.174	4.663.136
270	011004470	3.346.056.225	8.236.817.599	3.346.056.225
271	011004595	5.361.576	31.209.482.533	5.361.576
272	011004769	17.747.632	423.018.367	17.747.632
273	011004827	195.244.527	7.353.500.400	195.244.527
274	011013455	74.234.916	456.872.192	74.234.916
275	011016706	639.581.563	277.181.759	277.181.759
276	011017936	53.459.920	1.699.367.834	53.459.920
277	011020872	265.188.661	9.871.983.543	265.188.661
278	011021292	6.363.636	5.341.143.382	6.363.636
279	011021409	13.371.780	3.344.047.421	13.371.780
280	011022076	103.842.076	2.620.402.097	103.842.076
281	011034824	37.951.210	3.898.655.544	37.951.210
282	011036753	39.881.301	943.880.210	39.881.301
283	011044522	26.146.200	22.312.931.339	26.146.200
284	011045661	196.293.260	273.458.554.396	196.293.260
285	011047073	16.945.564	10.843.075.919	16.945.564
286	011047164	184.478.978	4.233.569.899	184.478.978
287	011047198	4.218.138	3.061.913.735	4.218.138
288	011047487	136.668.415	3.164.138.209	136.668.415
289	011047552	147.359.174	3.307.871.901	147.359.174
290	011047594	5.602.711	181.004.322	5.602.711
291	011047602	39.150.027	23.268.466.198	39.150.027
292	011047727	707.462.665	1.486.409.945	707.462.665
293	011048741	10.228.317	3.629.955	3.629.955
294	011050945	12.944.444	3.669.002.405	12.944.444
295	011058955	68.442.062	3.752.432.047	68.442.062
296	011068400	1.105.557.609	441.405.629	441.405.629
297	011069317	1.592.548	5.595.777.356	1.592.548
298	011076460	1.000.000	811.434.174	1.000.000
299	011079951	7.274.553	1.406.784.539	7.274.553
300	011081143	1.819.078	57.160.876.520	1.819.078
301	011081373	3.672.523	34.544.040	3.672.523
302	011082054	76.039.848	19.802.752	19.802.752
303	011085263	57.078.434	183.225.142	57.078.434
304	011096187	22.151.858	72.878.902	22.151.858
305	011098571	2.460.324	23.774.320	2.460.324
306	011099413	393.448.032	727.453.341	393.448.032
307	011101169	45.655.864	4.948.000	45.655.864
308	011104544	345.663.501	1.390.401.637	345.663.501
309	011105202	13.736.500	74.074.534	13.736.500
310	011106275	2.466.019	1.590.310.348	2.466.019
311	011108321	634.468.880	18.975.850.406	634.468.880
312	011113024	4.278.868	45.857.822.733	4.278.868
313	011119229	53.811.083	6.640.375.065	53.811.083
314	011123608	88.452.718	88.452.718	88.452.718
315	011124963	2.122.875	1.606.575.347	2.122.875
316	011125333	3.037.500	1.937.985.307	3.037.500
317	011140480	9.673.006	4.540.379.272	9.673.006
318	011146925	40.870.622	222.706.986	40.870.622
319	011148269	46.427.322	16.914.143.807	46.427.322
320	011150547	6.449.238	671.759.015	6.449.238
321	011155942	20.782.821	161.085.122	20.782.821
322	011159621	500.224.820	3.250.464.598	500.224.820
323	011160801	23.935.530	852.299.530	23.935.530
324	011166279	39.560.603	1.407.926.999	39.560.603
325	011176096	1.331.074.924	1.508.918.397	1.331.074.924

326	011179967	1.242.433	118.216.588	1.242.433
327	011184843	167.124.302	11.716.764.424	167.124.302
328	011184900	72.058.216	20.642.075.107	72.058.216
329	011185170	5.172.643	914.440.383	5.172.643
330	011186053	216.175.455	214.750.000	214.750.000
331	011195625	162.416.327	1.615.773.701	162.416.327
332	011198504	33.980.802	15.160.282	15.160.282
333	011199197	11.544.615.420	7.460.583.534	7.460.583.534
334	011204021	230.951.372	605.008.672	230.951.372
335	011204195	3.315.316.131	7.462.651.382	3.315.316.131
336	011214277	59.341.587	3.129.752.374	59.341.587
337	011214707	210.095.923	1.420.454.198	210.095.923
338	011220985	340.682.988	3.621.093.531	340.682.988
339	011222031	10.410.790	98.887.404	10.410.790
340	011225356	319.980.132	9.638.957.808	319.980.132
341	011225406	107.071.827	15.502.314.161	107.071.827
342	011227634	1.136.735	93.535.691.888	1.136.735
343	011238011	34.410.132	115.205.479	34.410.132
344	011249398	1.138.461.804	1.091.976.539	1.091.976.539
345	011264090	2.400.000	2.268.187.491	2.400.000
346	011267333	1.768.051.846	5.005.035.897	1.768.051.846
347	011268497	1.818.627	2.172.421.972	1.818.627
348	011278157	13.798.012	5.787.463	13.798.012
349	011278322	58.759.552	230.722.744	58.759.552
350	011279502	43.619.280	564.162.419	43.619.280
351	011279619	709.333.960	2.120.910.971	709.333.960
352	011287455	3.486.327.928	44.888.204.859	3.486.327.928
353	011290541	188.463.672	136.366.354	188.463.672
354	011297371	2.272.778	141.340.276.767	2.272.778
355	011297850	29.610.616	869.885.711	29.610.616
356	011301884	3.669.481.639	154.255.581	3.669.481.639
357	011306990	2.979.483	4.608.895.373	2.979.483
358	011307980	20.571.588	559.708.026	20.571.588
359	011311016	6.090.000.000	5.312.005.346	6.090.000.000
360	011316288	1.144.866.488	670.387.748	1.144.866.488
361	011329059	1.165.824	365.597.422.455	1.165.824
362	011329166	1.175.051.733	3.958.337.123	1.175.051.733
363	011329224	5.218.167	8.692.643.000	5.218.167
364	011329232	14.362.144	2.126.709.713	14.362.144
365	011338597	12.429.412	326.815.300	12.429.412
366	011345121	144.933.347	5.593.213.976	144.933.347
367	011346764	1.000.000	6.641.373.048	1.000.000
368	011353935	441.541.441	72.950.487.229	441.541.441
369	011355690	235.732.209	4.489.292.330	235.732.209
370	011358520	346.854.789	1.155.102.109	346.854.789
371	011360732	5.204.428	3.421.134.962	5.204.428
372	011361557	1.402.658.955	95.391.177.375	1.402.658.955
373	011370640	962.217.125	256.285.549	962.217.125
374	011374253	29.370.664	145.732.737	29.370.664
375	011374626	7.160.545	31.211.818	7.160.545
376	011375334	50.195.322	851.761.728	50.195.322
377	011375490	276.829.650	81.642.686.576	276.829.650
378	011377546	54.744.529	123.093.866	54.744.529
379	011387800	37.197.840	171.317.306	37.197.840
380	011396058	28.164.742	2.752.958.304	28.164.742
381	011403490	24.571.052	592.485.268	24.571.052
382	011407558	15.527.105	8.693.913.801	15.527.105
383	011409661	1.574.226	938.673.423	1.574.226
384	011415486	2.101.103	595.217.948	2.101.103
385	011415676	39.731.560	76.329.790	39.731.560
386	011416682	67.196.889	322.866.361	67.196.889
387	011417367	35.226.355	1.542.650.378	35.226.355
388	011424561	459.016.822	137.511.652	459.016.822
389	011425535	113.317.360	1.357.250.570	113.317.360
390	011435625	37.454.898	5.411.107.770	37.454.898
391	011438751	4.212.470	86.772.845	4.212.470

392	011466315	7.474.825.355	95.994.525.175	7.474.825.355
393	011467511	1.922.066.147	1.420.038.053	1.420.038.053
394	011477072	1.064.763	3.671.543.717	1.064.763
395	011479920	42.185.779	936.059.665	42.185.779
396	011480175	9.539.127	20.043.668.360	9.539.127
397	011494218	25.402.712	500.886.825	25.402.712
398	011495280	57.600.002	169.274.510	57.600.002
399	011499274	5.124.000	2.432.062.211	5.124.000
400	011505500	154.405.575	1.471.706.427	154.405.575
401	012003505	308.708.948	764.727.343	308.708.948
402	012010302	1.018.745.697	2.955.948.324	1.018.745.697
403	012014155	380.905.583	677.950.473	380.905.583
404	012050308	1.011.148.643	692.599.015	692.599.015
405	012085056	281.451.955	546.593.263	281.451.955
406	012089850	67.590.768	47.138.315	47.138.315
407	012092359	7.748.466	54.237.580	7.748.466
408	012100772	15.503.760	2.512.080.255	15.503.760
409	012101242	1.501.022	143.193.909	1.501.022
410	012131280	268.613.312	50.472.018.909	268.613.312
411	012131801	2.988.877	50.537.326.465	2.988.877
412	012136800	203.106.309	5.846.230.329	203.106.309
413	012141297	23.554.315	805.119.211	23.554.315
414	012167953	800.144.275	3.476.569.272	800.144.275
415	012173597	1.137.049.402	2.981.259	2.981.259
416	012174736	651.279.727	1.636.048.232	651.279.727
417	012183935	9.727.189	16.190.339.464	9.727.189
418	012186516	18.232.403	125.484.092	18.232.403
419	012197950	27.011.940	63.084.974.824	27.011.940
420	012203006	205.030.182	10.080.588.717	205.030.182
421	012210143	17.167.247	6.585.914.145	17.167.247
422	012219333	5.991.846	64.580.562.201	5.991.846
423	012219549	9.140.414	133.532.687.517	9.140.414
424	012223418	196.865.354	5.233.323.439	196.865.354
425	012223483	286.101.015	4.036.988.453	286.101.015
426	012234969	52.388.539	128.082.707	52.388.539
427	012281267	29.241.022	283.798.577	29.241.022
428	012296828	85.081.980	452.590.055	85.081.980
429	012307948	1.200.000	2.695.489.199	1.200.000
430	012323077	70.067.142	2.656.973.061	70.067.142
431	012337069	6.969.460	612.123.150	6.969.460
432	012342002	28.032.345	4.155.106.500	28.032.345
433	012347217	12.700.000	934.499.890	12.700.000
434	012391777	3.337.042.412	1.732.442.040	1.732.442.040
435	012392767	8.415.402	1.301.478.268	8.415.402
436	012400644	610.346.770	12.308.553.440	610.346.770
437	012406898	47.558.138	384.260.781	47.558.138
438	012439436	31.373.082	386.191.510	31.373.082
439	012454930	2.493.611.991	44.696.716.388	2.493.611.991
440	012475877	5.510.499	251.519.755	5.510.499
441	012494100	1.124.551	1.652.199.274	1.124.551
442	012494878	1.029.570	140.143.400	1.029.570
443	012500260	2.000.000	86.448.229	2.000.000
444	012500302	23.267.282	806.484.952	23.267.282
445	012506119	3.606.630.372	1.659.610.845	1.659.610.845
446	012510152	6.400.000	6.769.579.077	6.400.000
447	012525283	21.823.727	290.338.458	21.823.727
448	012540407	7.643.696	74.541.123.734	7.643.696
449	012590550	16.689.600	22.440.098.105	16.689.600
450	012613071	24.576.236	349.014.327	24.576.236
451	012633889	3.081.481	5.237.796.485	3.081.481
452	012669750	5.042.061	11.554.834.432	5.042.061
453	012690293	5.279.160	636.353.525	5.279.160
454	012698056	11.412.639	288.629.295.134	11.412.639
455	012708756	68.732.198	373.184.400.495	68.732.198
456	012772463	741.032.277	1.056.037.389	741.032.277
457	012802799	8.017.470	400.914.598	8.017.470

458	012806071	6.000.000	2.256.624.345	6.000.000
459	012835559	1.000.000	22.032.913	1.000.000
460	012878799	31.223.725	3.065.725.291	31.223.725
461	012879102	23.204.600	5.270.850.099	23.204.600
462	013000120	41.530.123	68.696.458	41.530.123
463	013007554	1.125.485	309.069.113	1.125.485
464	013008222	8.243.149	18.851.462.500	8.243.149
465	013008503	434.584.721	2.068.716.577	434.584.721
466	013008610	9.600.000	2.211.461.507	9.600.000
467	013008628	28.206.200	2.163.013.489	28.206.200
468	013009923	464.204.069	7.919.599.350	464.204.069
469	013012216	8.903.206.078	4.228.109.230	4.228.109.230
470	013012463	3.082.539	1.279.808.938	3.082.539
471	013012984	44.373.695	118.814.848	44.073.695
472	013013867	4.643.735	9.968.239.150	4.643.735
473	013017629	3.787.644.148	7.620.576.196	3.787.644.148
474	013018130	25.762.986	6.705.820	5.705.820
475	013019096	7.318.831	186.546.619	7.318.831
476	013019112	116.338.987	3.157.179.966	116.338.987
477	013019690	31.834.783	3.568.242.948	31.834.783
478	013021043	7.452.512	1.346.450.478	7.452.512
479	013023841	131.272.424	9.756.487.553	131.272.424
480	013025846	11.925.157	178.321.829.706	11.925.157
481	013026398	145.875.191	11.076.291.810	145.875.191
482	013032966	57.059.214	2.962.168.385	57.059.214
483	013034640	1.000.000	140.763.563	1.000.000
484	013037312	6.897.278.097	6.264.193.410	6.264.193.410
485	013040530	3.000.000	22.761.272.649	3.000.000
486	013046511	109.876.386	21.075.516.481	109.876.386
487	013050828	50.000.869	8.947.165.558	50.000.869
488	013056916	11.430.192	17.869.397.132	11.430.192
489	013063003	129.217.949	1.940.106.508	129.217.949
490	013064308	10.635.004	9.127.057.002	10.635.004
491	013068887	326.968.620	287.046.285	287.046.285
492	013072186	1.814.991.763	1.480.806.485	1.480.806.485
493	013072764	336.816.520	618.310.649	336.816.520
494	013076799	1.200.000	83.257.479	1.200.000
495	013084702	12.467.877	5.136.949.868	12.467.877
496	013085089	13.842.801.752	64.725.198.420	13.842.801.752
497	013085501	71.197.055	7.469.357.928	71.197.055
498	013086921	24.793.347	27.154.443.976	24.793.347
499	013093232	1.357.378	5.911.254.212	1.357.378
500	013097720	13.448.873	27.202.295	13.448.873
501	013098728	6.000.000	1.026.384.093	6.000.000
502	013098835	75.387.144	71.940.061.488	75.387.144
503	013099106	7.599.180	87.788.876.396	7.599.180
504	013102330	1.260.697	13.625.040.154	1.260.697
505	013107867	611.400.949	192.885.809	192.885.809
506	013121660	47.081.385	43.206.052.195	47.081.385
507	013130786	2.184.410	20.574.810.935	2.184.410
508	013136924	9.849.794	2.736.990.444	9.849.794
509	013138300	430.517.235	34.907.041.444	430.517.235
510	013138425	1.435.000	1.760.448.178	1.435.000
511	013159009	595.765.086	29.820.824.212	595.765.086
512	013162433	3.933.447.959	150.115.542	3.933.447.959
513	013164538	9.620.438	495.620.631	9.620.438
514	013172275	1.028.096	6.929.179.404	1.028.096
515	013172341	7.125.551	5.381.124.379	7.125.551
516	013172503	1.235.584	103.163.000	1.235.584
517	013174727	7.511.797	2.093.022.053	7.511.797
518	013180625	247.558.600	28.943.845.400	247.558.600
519	013181696	20.687.087	9.264.731.988	20.687.087
520	013186549	353.947.101	27.314.481.613	353.947.101
521	013196480	72.955.332	9.441.603.583	72.955.332
522	013199260	552.333.553	901.520.366	552.333.553
523	013219365	10.450.742	10.522.275.556	10.450.742

524	013225842	61.943.087	1.010.360.072	61.943.087
525	013229687	65.394.842	1.070.449.852	65.394.842
526	013236625	235.259.221	1.475.081.829	235.259.221
527	013239645	48.971.658	3.445.675.949	48.971.658
528	013242532	1.549.917	165.256.509	1.549.917
529	013260765	52.989.589	5.144.223.300	52.989.589
530	013260856	2.452.197	28.626.161.747	2.452.197
531	013286711	2.150.891	7.611.667.500	2.150.891
532	013288687	3.760.737	267.943.074	3.760.737
533	013297165	301.281.215	13.138.232.303	301.281.215
534	013298120	102.535.768	5.596.510.669	102.535.768
535	013305214	139.812.801	767.680.071	139.812.801
536	013314653	9.580.393	30.000.000	9.580.393
537	013315965	3.500.000	6.932.618.622	3.500.000
538	013322234	9.528.451	1.398.649.378	9.528.451
539	013327291	8.259.937.989	151.974.056.623	8.259.937.989
540	013327523	4.500.991	22.756.554	4.500.991
541	013331681	80.945.392	7.795.057.060	80.945.392
542	013332242	7.118.055.544	152.672.415	152.672.415
543	013339809	18.728.731	276.461.000	18.728.731
544	013344296	1.784.565.705	1.155.829.540	1.784.565.705
545	013355417	29.601.235	791.933.250	29.601.235
546	013359955	13.184.693	18.544.056.405	13.184.693
547	013362389	18.752.814	1.733.249.551	18.752.814
548	013369996	52.728.388	30.552.501	52.728.388
549	013377239	6.000.000	2.241.630.862	6.000.000
550	013386917	114.937.490	154.443.612	114.937.490
551	013390737	7.636.326	393.033.124	7.636.326
552	013394044	11.196.570	2.491.773.050	11.196.570
553	013405568	158.731.928	3.694.762.175	158.731.928
554	013409925	22.497.979	1.217.141.854	22.497.979
555	013417365	11.055.452	1.009.304.017	11.055.452
556	013418579	18.653.983.658	555.680.665.278	18.653.983.658
557	013418892	25.062.946	508.701.490	25.062.946
558	013422027	54.195.000	49.845.893.420	54.195.000
559	013422092	13.943.292	20.699.861.923	13.943.292
560	013422126	5.668.822	3.801.797.463	5.668.822
561	013422357	91.131.429	1.324.278	91.131.429
562	013428560	15.898.349	1.878.461.254	15.898.349
563	013439658	1.200.000	3.254.595.566	1.200.000
564	013452057	62.318.892	746.997.305	62.318.892
565	013452436	5.471.742	46.741.568.238	5.471.742
566	013452768	2.400.000	45.270.219.329	2.400.000
567	013457668	588.901.514	1.638.570.566	588.901.514
568	013459292	251.029.867	11.199.923.312	251.029.867
569	013463641	29.362.584	10.080.560.210	29.362.584
570	013463658	4.066.310.016	2.998.625.459	4.066.310.016
571	013473681	357.675.792	10.680.711.872	357.675.792
572	013476824	58.771.059	95.149.105	58.771.059
573	013477203	306.254.320	3.365.926.573	306.254.320
574	013484787	15.325.992	9.947.094.683	15.325.992
575	013484936	2.847.577	287.666.852	2.847.577
576	013490826	271.700.956	63.968.820.057	271.700.956
577	013500392	1.194.085.097	5.861.118.232	1.194.085.097
578	013505805	5.466.495.579	90.741.666.369	5.466.495.579
579	013508563	47.700.706	11.311.306	47.700.706
580	013515663	31.541.098	121.227.964	31.541.098
581	013528833	295.486.636	1.994.350.725	295.486.636
582	013563846	8.220.830	13.244.019.545	8.220.830
583	013564620	3.480.100	535.659.696	3.480.100
584	013565064	72.289.943	24.023.134.955	72.289.943
585	013565288	93.079.643	12.419.996.116	93.079.643
586	013575360	21.291.111	417.086.068	21.291.111
587	013575832	62.578.134	32.636.972.339	62.578.134
588	013583059	37.422.467	570.170.074.538	37.422.467
589	013591318	36.716.412	673.733.803	36.716.412

590	013691516	3.718.278.640	14.623.187.910	3.718.278.640
591	013691870	2.160.521	468.448.362	2.160.521
592	013694676	362.786.807	141.514.620	141.514.620
593	013612684	22.990.717	36.044.382.555	22.990.717
594	013624622	581.945.654	9.121.191.309	581.945.654
595	013624986	90.999.500	3.180.516.900	90.999.500
596	013626437	5.940.497	19.128.294.915	5.940.497
597	013633672	1.500.000	23.577.860.891	1.500.000
598	013635529	1.335.843.384	1.508.567	1.508.567
599	013636709	6.202.615	44.147.154	6.202.615
600	013644935	215.358.437	524.555.545	215.358.437
601	013645650	1.654.055.702	16.133.129.959	1.694.055.702
602	013653357	40.314.521	963.682.162	40.314.521
603	013662333	15.048.196	3.857.909.714	15.048.196
604	013667753	363.142.294	79.417.549.374	363.142.294
605	013672233	20.273.900	371.115.320	20.273.900
606	013673447	9.790.789	200.624.500	9.790.789
607	013676051	3.561.970.457	29.895.401.397	3.561.970.457
608	013682752	8.450.733	11.357.736.843	8.450.733
609	013694518	2.526.810	10.382.209.970	2.526.810
610	013695184	38.587.635	17.318.116.483	38.587.635
611	013703079	26.965.721	365.309.597	26.965.721
612	013705520	20.066.799.933	713.189.773	713.189.773
613	013705892	6.679.733	804.753.966	6.679.733
614	013706080	6.541.647	14.009.129.290	6.541.647
615	013707674	144.811.767	145.278.163	144.811.767
616	013710603	51.975.615	5.161.816.801	51.975.615
617	013712310	43.945.359	12.652.735.610	43.945.359
618	013715503	25.025.632	21.710.191	21.710.191
619	013715875	2.178.291.855	15.406.789.562	2.178.291.855
620	013715958	4.247.844	621.430.825	4.247.844
621	013719059	14.900.199.508	9.333.735.491	8.333.735.491
622	013721568	2.172.981	10.635.778.215	2.172.981
623	013735038	177.680.489	339.311.567	177.680.489
624	013742895	7.433.398.667	242.520.237.401	7.433.698.667
625	013743987	7.121.277	2.678.406.502	7.121.277
626	013743995	1.505.551.815	12.104.790.976	1.505.551.815
627	013752449	27.395.640	5.137.168.855	27.395.640
628	013753892	18.641.834	2.425.846.821	18.641.834
629	013855267	3.479.025	621.725.481	3.479.025
630	013859574	356.148.277	6.617.960.928	356.148.277
631	013862305	7.653.922.402	65.862.839.150	7.653.922.402
632	013864293	190.440.665	7.557.405.426	190.440.665
633	013878293	4.320.934.984	1.003.831.202	1.003.831.202
634	013907712	1.427.712.220	1.641.707.546	1.427.712.220
635	013917414	10.898.478	101.280.316.857	10.898.478
636	013929377	5.500.000	7.691.451.592	5.500.000
637	013929963	2.683.086	971.109.313	2.683.086
638	013939418	7.828.430	7.441.421.216	7.828.430
639	013959721	43.834.366	107.217.189	43.834.366
640	013970199	26.503.168	961.065.310	26.503.168
641	013971171	453.702.824	1.065.253.471	453.702.824
642	013980511	6.044.325	4.276.971	4.276.971
643	013981931	3.600.000	2.213.307.065	3.600.000
644	013989942	1.607.032.736	12.210.354.921	1.607.032.736
645	013989983	3.014.300	1.051.652.036	3.014.300
646	014068282	14.914.360	1.830.230.226	14.914.360
647	014071708	11.581.800	452.530.880	11.581.800
648	014072318	2.300.000	2.643.454.532	2.300.000
649	014078406	1.715.340.271	745.682.910	745.682.910
650	014079198	1.118.182	1.713.220.946	1.118.182
651	014088892	371.029.988	648.048.204	371.029.988
652	014092084	1.654.677	82.788.345	1.654.677
653	014153027	5.200.000	483.846.189	5.200.000
654	014221303	9.217.439	950.889.043	9.217.439
655	014258396	2.367.969	31.211.818	2.367.969

656	014262299	8.359.099	4.165.699.318	8.359.099
657	014292940	23.996.859	50.166.566	23.996.859
658	014296024	166.909.806	6.396.642.363	166.909.806
659	014308621	95.445.721	5.309.119.553	95.445.721
660	014310247	1.000.000	138.135.893.892	1.000.000
661	014328801	161.491.734	367.254.540	161.491.764
662	014341028	6.613.114	11.122.485.563	6.613.114
663	014380455	95.394.944	54.517.180.138	95.394.944
664	014411797	3.783.072	3.875.339	3.783.072
665	014431639	9.529.943	2.006.635.535	9.529.943
666	014446801	11.126.528	5.032.728.314	11.126.528
667	014447098	1.207.992	48.477.207	1.207.992
668	014448575	4.818.753	190.926.923	4.818.753
669	014450274	217.689.422	1.163.957.335	217.689.422
670	014460182	23.236.252	4.685.471.804	23.236.252
671	014479703	58.666.768	1.737.089.325	58.666.768
672	014481279	116.921.565	5.744.121.209	116.921.565
673	014481386	317.364.558	3.977.261.483	317.364.558
674	014484463	11.998.212	29.134.064	11.998.212
675	014487722	340.776.077	635.664.095	340.776.077
676	014512131	6.301.797.436	9.947.560.378	6.301.797.436
677	014514699	14.651.814	37.614.069.354	14.651.814
678	014529127	49.578.309	6.150.636.198	49.578.309
679	014529689	2.738.924.983	146.841.660	149.841.660
680	014531297	208.042.231	3.162.627.536	208.042.231
681	014552053	991.477.207	11.917.186.599	991.477.207
682	014553739	160.303.671	1.639.273.315	160.303.671
683	014557177	52.610.398	7.546.612.480	52.610.398
684	014559249	775.111.885	14.097.499.414	775.111.885
685	014560312	31.366.854	1.044.326.943	31.366.854
686	014563266	2.451.198	357.092.018	2.451.198
687	014606792	3.232.640	897.135.556	3.232.640
688	014607618	1.587.752	3.412.605.997	1.587.752
689	014616569	1.609.755	5.113.467	1.609.755
690	014621841	53.192.459	1.763.562.599	53.192.459
691	014622955	107.105.238	4.669.187	4.669.187
692	014651236	1.000.000	40.385.446	1.000.000
693	014651863	67.397.319	4.756.318.956	67.397.319
694	014652689	99.575.500	2.227.878.093	99.575.500
695	014665608	5.457.035	556.165.891	5.457.035
696	014668388	2.732.310	891.125.790	2.732.310
697	014669329	32.469.690	182.785.284	32.469.690
698	014697064	530.161.506	3.226.907.933	530.161.506
699	014716328	12.650.756	876.409.108	12.650.756
700	014741383	83.133.400	180.996.281	83.133.400
701	014741706	292.030.901	5.735.381.482	292.030.901
702	014753719	62.568.729	216.241.352	62.568.729
703	014775308	62.108.928	1.118.914.686	62.108.928
704	014814164	27.316.242	1.591.789.681	27.316.242
705	014824874	16.575.638	397.109.052	16.575.638
706	014826648	1.000.000	1.091.273.638	1.000.000
707	014827596	30.149.101	93.130.043	30.149.101
708	014827919	87.607.124	3.557.760.986	87.607.124
709	014830558	226.564.275	29.014.044.142	226.564.275
710	014845390	91.000.000	235.199.657	91.000.000
711	014896211	6.141.534	236.905.095	6.141.534
712	014908614	2.040.000	5.913.327.119	2.040.000
713	014925028	396.114.298	3.715.014.510	396.114.298
714	014931216	1.077.273	6.875.845	1.077.273
715	014931331	40.308.896	29.154.182	29.154.182
716	014942668	5.764.761.671	137.923.315	137.923.315
717	014944946	285.842.016	2.619.374.999	285.842.016
718	014946586	2.000.000	15.000.000	2.000.000
719	014955991	20.227.323	4.325.691.503	20.227.323
720	014956148	4.798.077	180.287.255	4.798.077
721	014957294	455.791.597	679.452.168	455.791.597

722	014962427	5.802.017.829	5.310.840.730	5.310.840.730
723	014963490	8.867.561.151	5.912.537.794	5.912.537.794
724	014963557	5.112.294	81.868.545	5.112.294
725	014964027	44.437.336	10.762.010.982	44.437.336
726	014965636	318.126.000	25.051.518.768	318.126.000
727	014966261	316.988.904	3.917.594.333	316.988.904
728	014973069	21.597.389	32.631.562.830	21.597.389
729	014975544	6.578.974	17.248.389.212	6.578.974
730	015004351	56.484.728	6.283.557.132	56.484.728
731	015012321	46.978.227	2.892.528.915	46.978.227
732	015018864	149.861.297	481.939.303	149.861.297
733	015065253	228.316.698	1.227.845	1.227.845
734	015069784	6.775.000	211.648.809	6.775.000
735	015072382	62.511.504	4.943.743.572	62.511.504
736	015076094	209.234.413	5.380.874.885	209.234.413
737	015092992	18.738.742	771.909.000	18.738.742
738	015114481	28.431.326	35.468.900	28.431.326
739	015115595	1.456.470	992.987.982	1.456.470
740	015163751	3.610.302.265	51.220.921.794	3.610.302.265
741	015168784	16.973.222	9.767.754.459	16.973.222
742	015170335	2.062.640	940.546.978	2.062.640
743	015214174	1.203.128.274	2.479.545.960	1.203.128.274
744	015213559	12.047.422	917.297.579	12.047.422
745	015233755	433.692.036	8.764.052.315	433.692.036
746	015240856	37.593.014	1.989.614	1.989.614
747	015248032	4.814.191.284	5.631.933.294	4.814.191.284
748	015249303	12.627.588	142.773.242	12.627.588
749	015249930	7.730.528	1.864.684.042	7.730.528
750	015262931	1.004.744	66.000.000	1.004.744
751	015263028	1.126.179	149.185.857	1.126.179
752	015287121	26.844.155	3.600.576.292	26.844.155
753	015308547	5.310.438	3.087.054.192	5.310.438
754	015311632	7.942.059	1.186.798.306	7.942.059
755	015318108	5.427.110	2.498.473.164	5.427.110
756	015319726	3.890.744.568	43.979.738.136	3.890.744.568
757	015343825	98.933.276	50.637.900	50.637.900
758	015348736	73.092.447	13.383.163	13.383.163
759	015374432	1.134.171.160	20.011.012	20.011.012
760	015419047	18.200.133	68.036.449	18.200.133
761	015419807	1.000.000	7.720.270.094	1.000.000
762	015420748	4.139.862	20.623.245	4.139.862
763	015421886	155.500.968	6.894.811.153	155.500.968
764	015422322	11.802.160	2.715.614.646	11.802.160
765	015427081	3.709.708	2.649.724.564	3.709.708
766	015427834	3.035.161	183.407.407	3.035.161
767	015454523	62.796.917	102.259.000	62.796.917
768	015458466	381.964.509	9.213.844.686	381.964.509
769	015461023	6.056.438	2.742.910.490	6.056.438
770	015468507	1.081.945	19.221.210.393	1.081.945
771	015471899	88.966.719	54.904.821	54.904.821
772	015472731	8.678.918.896	9.464.387.217	8.678.918.896
773	015476617	1.455.860.859	19.505.943.056	1.455.860.859
774	015481068	138.828.060	6.582.097.371	138.828.060
775	015528441	13.232.850	87.676.145	13.232.850
776	015539224	46.893.000	1.175.436.009	46.893.000
777	015541212	3.121.026	2.197.279.081	3.121.026
778	015548795	9.305.594	268.743.764	9.305.594
779	015551245	4.000.000	181.192.275	4.000.000
780	015555634	55.809.786	1.486.362.786	55.809.786
781	015556210	2.677.928	92.123.416	2.677.928
782	015566862	86.280.920	3.046.467.371	86.280.920
783	015584527	1.361.610	84.274.013.432	1.361.610
784	015585151	28.157.295	130.014.352	28.157.295
785	015614845	13.786.345	513.733.773	13.786.345
786	015644529	2.052.374	555.358.253	2.052.374
787	015651532	6.147.494	821.728.409	6.147.494

788	015652951	3.071.306.994	357.697.907.790	3.071.306.994
789	015652893	9.700.000	266.900.746	9.700.000
790	015664618	1.010.317.696	1.681.150.249	1.010.317.696
791	015386355	20.803.891	478.654.857	20.803.891
792	015386488	2.626.887	6.441.484.414	2.626.887
793	015389375	1.203.646.600	10.961.501.503	1.203.646.600
794	015390241	11.227.316	7.794.642.875	11.227.316
795	015390266	28.999.269	2.513.288.883	28.999.269
796	015717408	2.603.695	130.170.384.338	2.603.695
797	015718596	329.636.830	285.611.164	329.636.830
798	015722234	13.157.724	9.826.848	13.157.724
799	015723364	126.818.478	61.320.427.707	126.818.478
800	015743909	120.341.370	377.407.600	120.341.370
801	015744378	1.318.000	269.273.459	1.318.000
802	015763014	1.000.000	7.780.664	1.000.000
803	015782204	134.284.822	259.416.415	134.284.822
804	015786748	23.819.085	236.227.740	23.819.085
805	015796790	58.311.400	783.664.798	58.311.400
806	015798150	18.456.458	47.641.103.945	18.456.458
807	015823676	217.303.796	4.916.461.630	217.303.796
808	015830227	156.200.449	718.590.292	156.200.449
809	015835275	8.526.751	168.319.329	8.526.751
810	015836307	4.121.700	59.473.539	4.121.700
811	015853210	375.489.289	92.076.756	375.489.289
812	015866924	2.559.348	31.969.151.998	2.559.348
813	015868516	39.628.080	1.455.222.325	39.628.080
814	015910243	3.847.494	264.612.564	3.847.494
815	015915093	1.927.963	178.866.441	1.927.963
816	015925993	3.000.000	9.380.521.564	3.000.000
817	015932528	3.676.943	309.791.879	3.676.943
818	015943300	136.478.258	1.605.985.319	136.478.258
819	015961253	5.729.899	2.010.385.465	5.729.899
820	015967458	1.459.112.873	4.626.468.541	1.459.112.873
821	015972995	398.053.750	23.149.676.876	398.053.750
822	016014136	13.846.330	81.748.330	13.846.330
823	016014334	704.685.621	61.925.376	704.685.621
824	016018065	3.063.352.783	4.945.655.293	3.063.352.783
825	016025892	11.255.954	519.842.726	11.255.954
826	016025478	30.624.207	433.825.000	30.624.207
827	016041113	148.091.378	796.227.488	148.091.378
828	016041568	65.891.043	11.580.706.565	65.891.043
829	016043143	10.059.786	2.411.696.711	10.059.786
830	016043812	176.712.000	109.954.152.876	176.712.000
831	016044919	33.181.805	947.856.419	33.181.805
832	016075459	37.288.253	1.530.045.412	37.288.253
833	016092603	21.367.086	66.330.538.335	21.367.086
834	016138612	794.625.516	27.273.756.045	794.625.516
835	016146524	47.727.220.195	39.570.471.912	47.727.220.195
836	016147118	574.191.445	605.783.306	574.191.445
837	016149528	946.042.741	58.501.039.391	946.042.741
838	016165763	36.006.520	240.678.047	36.006.520
839	016183386	4.091.584	820.350.960	4.091.584
840	016185951	2.124.376	723.411.613	2.124.376
841	016190803	113.229.511	1.890.056.627	113.229.511
842	016194458	59.141.654	4.009.549.254	59.141.654
843	016196404	105.571.204	2.699.944.263	105.571.204
844	016208472	18.571.436	5.820.700	18.571.436
845	016228280	100.582.100	173.459.725	100.582.100
846	016261406	3.876.071.024	2.177.823.582	3.876.071.024
847	016262172	108.043.273	1.949.413.726	108.043.273
848	016262206	3.354.395.407	524.823.198	3.354.395.407
849	016262677	18.231.380	804.759.070	18.231.380
850	016270852	8.486.299	2.910.172.271	8.486.299
851	016279358	24.005.895	5.622.273	24.005.895
852	016279366	62.100.000	4.416.428	62.100.000
853	016282717	3.722.725.400	36.842.866.579	3.722.725.400

854	016309379	2.237.950	13.101.938	2.237.950
855	016328973	1.662.013.813	152.871.369	152.871.369
856	016344962	2.694.272.930	4.969.270.242	2.694.272.930
857	016350753	1.248.347.849	35.179.559	35.179.659
858	016351173	166.780.098	3.267.146.901	166.780.098
859	016366286	28.026.230	11.666.000	11.666.000
860	016388977	802.865.350	712.313.886	712.313.886
861	016408122	7.295.736	1.882.041.089	7.295.736
862	016409930	35.000.000	1.004.020.036	35.000.000
863	016413718	375.997.108	25.564.508	25.564.508
864	016416232	11.239.595	297.609.132	11.239.595
865	016422511	78.918.010	171.673.373	78.918.010
866	016425662	353.115.008	7.505.950.457	353.115.008
867	016477200	1.100.490	132.667.970	1.100.490
868	016481558	1.000.000	244.893.993	1.000.000
869	016497919	3.725.262	124.130.122	3.725.262
870	016505661	2.068.823	53.167.155	2.068.823
871	016513707	8.547.126	17.082.431	8.547.126
872	016518114	315.523.390	13.606.245.955	315.523.390
873	016516684	109.479.948	735.987.066	109.479.948
874	016537300	290.960.064	2.865.833.633	290.960.064
875	016537771	167.698.815	1.136.741.704	167.698.915
876	016542953	45.159.510	115.008.882	45.159.510
877	016542979	1.317.282	10.175.101.601	1.317.282
878	016545004	6.500.006	5.446.123.834	6.500.006
879	016558702	794.518.086	637.615.750	794.518.086
880	016575357	1.183.676	14.519.052.437	1.183.676
881	016583999	8.880.000.000	644.476.012.596	8.880.000.000
882	016597189	3.026.475	2.150.246.473	3.026.475
883	016600843	22.979.416	636.222.750	22.979.416
884	016613416	50.956.090	2.021.242.073	50.956.093
885	016639429	14.375.768	6.123.946.020	14.375.763
886	016640351	14.819.880	381.708.865	14.819.880
887	016648669	416.852.676	97.059.347	97.059.347
888	016648735	348.687.574	692.520.257	348.687.574
889	016709404	2.784.774	1.012.256.642	2.784.774
890	016712234	118.262.409	380.727.089	118.262.409
891	016712515	5.939.001.050	40.183.732.338	5.939.001.053
892	016730426	4.064.747.783	10.050.356.025	4.064.747.783
893	016730756	4.644.000	209.312.000	4.644.000
894	016735169	1.902.206	191.155.000	1.902.206
895	016745572	2.913.809.383	882.945.736	882.945.736
896	016747701	2.000.000	69.336.780	2.000.000
897	016752248	117.553.527	32.047.226	32.047.226
898	016773954	5.219.646	11.462.360.954	5.219.646
899	016787475	1.100.000	9.739.625	1.100.000
900	016791089	202.638.019	12.918.812.879	202.638.019
901	016791279	4.176.857	697.970.000	4.176.857
902	016798662	148.120.250	6.527.319.460	148.120.250
903	016802795	1.324.696	4.255.147.416	1.324.696
904	016803298	3.102.909	123.090.299	3.102.909
905	016825721	6.070.901	169.629.309	6.070.901
906	016876179	4.032.895.511	91.557.909	91.557.909
907	016881970	4.078.217	405.947.580	4.078.217
908	016882234	1.000.000	9.703.683.678	1.000.000
909	016901880	205.063.648	455.842.908	205.063.648
910	016913444	61.317.224	6.000.000	6.000.000
911	016913873	21.281.673	5.895.352.132	21.281.673
912	016916496	9.035.000	98.630.256	9.035.000
913	016922692	34.527.320	2.926.019.781	34.527.320
914	016924094	30.639.640	67.584.579.744	30.639.640
915	016924696	1.000.000	10.199.495.354	1.000.000
916	016924722	1.865.987	1.026.332.472	1.865.987
917	016952556	857.505.312	1.349.051.933	857.505.312
918	016932672	3.330.472	415.286.232	3.330.472
919	016966129	11.500.000	497.418.000	11.500.000

920	016993131	1.992.371	3.071.020.669	1.992.371
921	017001066	123.265.000	116.217.985	116.217.985
922	017015447	4.855.340	2.309.943.099	4.855.340
923	017018839	39.750.888	869.631.389	39.750.888
924	017071135	222.312.362	693.918.828	222.312.362
925	017086646	56.412.776	4.492.407.371	56.412.776
926	017093717	56.800.000	2.550.781.368	56.800.000
927	017097452	2.506.667	56.999.130	2.506.667
928	017103292	1.002.020	5.569.234	1.002.020
929	017108834	73.693.305	68.345.954.224	73.693.305
930	017135134	119.039.918	1.646.780.604	119.039.918
931	017179870	4.124.545	5.913.293.991	4.124.545
932	017183278	24.524.237	461.408.292	24.524.237
933	017186222	6.991.794	2.159.407.189	6.991.794
934	017189341	59.607.709	7.206.439.738	59.607.709
935	017194119	1.127.561.184	6.282.048.223	1.127.561.184
936	017198383	583.198.068	1.328.128.248	583.198.068
937	017201070	35.900.515	4.291.377.249	35.900.515
938	017201914	19.289.455	243.408.754	19.289.455
939	017218686	1.200.000	2.290.932	1.200.000
940	017219270	1.153.418	12.577.404	1.153.418
941	017219452	16.691.092	504.587.004	16.691.092
942	017219965	3.221.684	1.494.740.106	3.221.684
943	017225293	2.610.910	2.378.497.039	2.610.910
944	017228214	2.597.736	73.081.400	2.597.736
945	017239906	1.253.135	215.601.441	1.253.135
946	017240896	17.717.347	1.611.305.102	17.717.347
947	017245028	2.168.363	5.758.208.310	2.168.363
948	017280033	1.000.000	1.070.188.452	1.000.000
949	017291022	3.587.744	1.079.923.260	3.587.744
950	017302480	3.809.948	362.837.406	3.809.948
951	017307430	67.857.663	478.412.309	67.857.663
952	017319450	15.554.476	2.549.253.417	15.554.476
953	017384595	3.987.445	8.082.566.877	3.987.445
954	017385006	112.940.249	5.024.742.263	112.940.249
955	017387481	47.198.610	199.661.743.790	47.198.610
956	017396631	15.265.780	3.165.944.051	15.265.780
957	017398686	26.939.351	1.485.835.591	26.939.351
958	017400227	36.200.000	79.722.042.156	36.200.000
959	017400268	61.859.408	2.172.473.296	61.859.408
960	017424599	29.516.505	29.516.505	29.516.505
961	017439274	185.929.870	5.930.864.865	185.929.870
962	017440684	2.595.851	377.350.000	2.595.851
963	017442930	16.969.413	1.310.845.515	16.969.413
964	017448978	2.000.000	113.915.720	2.000.000
965	017465543	1.200.000	3.925.608.980	1.200.000
966	017494949	595.703.792	1.723.614.214	595.703.792
967	017496449	28.828.313	28.828.313	28.828.313
968	017498791	1.446.142	2.003.056.951	1.446.142
969	017501297	2.000.000	1.210.782.675	2.000.000
970	017503970	30.764.120	1.322.465.929	30.764.120
971	017534884	31.427.738	4.896.754.851	31.427.738
972	017568551	1.596.274.402	7.369.296.993	1.596.274.402
973	017601907	107.393.151	349.363.577	107.393.151
974	017603861	22.193.489	19.630.031.109	22.193.489
975	017613035	571.881.582	3.815.636.853	571.881.582
976	017644857	3.767.999	8.820.087.051	3.767.999
977	017647355	1.858.832	7.351.038	1.858.832
978	017647843	147.658.583	92.021.409	92.021.409
979	017650441	281.544.387	1.174.158	1.174.158
980	017698622	2.127.374	9.829.108.752	2.127.374
981	017701327	15.707.154	229.717.223	15.707.154
982	017704149	1.337.417	14.879.918.438	1.337.417
983	017707969	1.358.158.940	5.396.746.838	1.358.158.940
984	017714015	14.555.294	14.555.294	14.555.294
985	017722497	4.596.998	233.311.876	4.596.998

986	017722778	34.477.518	304.781.595	34.477.518
987	017731571	7.951.560	33.958.005.997	7.951.560
988	017785999	238.278.469	731.643.301	238.278.469
989	017789462	10.057.389	704.804.265	10.057.389
990	017796483	12.386.000	1.288.259.442	12.386.000
991	017797432	900.235.787	234.588.124	234.588.124
992	017798992	41.830.932	1.846.517.679	41.830.932
993	017803461	113.995.354	2.725.946.590	113.995.354
994	017813726	213.661.349	2.000.190.613	213.661.349
995	017814575	1.000.000	916.750.394	1.000.000
996	017851395	969.922.637	633.964.900	633.964.900
997	017874967	15.210.573	46.314.107	15.210.573
998	017880774	704.496.172	531.642.226	531.642.226
999	017881392	1.116.091	3.507.579.005	1.116.091
1000	017882945	450.096.463	12.127.356.102	450.096.463
1001	017883885	3.334.732.261	4.816.039.036	3.334.732.261
1002	017897315	146.391.265	295.039.020	146.391.265
1003	017898156	13.937.240	7.205.540.886	13.937.240
1004	017905423	21.441.189.150	53.829.000	53.829.000
1005	017903070	5.105.554	1.506.470.377	5.105.554
1006	017923244	6.195.004	13.106.969.851	6.195.004
1007	017925157	6.443.511	26.157.677	6.443.511
1008	017929167	9.398.022	182.254.509	9.398.022
1009	017934217	42.942.986	14.210.254	14.210.254
1010	017937541	190.440.081	870.000.000	190.440.081
1011	017937806	14.147.203	87.540.661.014	14.147.203
1012	017938275	1.790.924.686	6.773.946.984	1.790.924.686
1013	017941014	9.353.787	3.085.049.424	9.353.787
1014	017963034	5.357.752.364	33.333.843	33.333.843
1015	017971706	1.674.756.977	935.550.905	935.550.905
1016	017973249	3.259.688	9.194.204.853	3.259.688
1017	017983118	75.799.836	543.393.652	75.799.836
1018	018000331	12.512.856	17.575.062.506	12.512.856
1019	018001313	26.107.003	510.484.646	26.107.003
1020	018015479	1.062.318.759	12.610.903.251	1.062.318.759
1021	018024901	7.721.098	354.234.189	7.721.098
1022	018025148	1.659.405.770	12.032.411.186	1.659.405.770
1023	018025120	2.636.001.116	88.809.597.707	2.636.001.116
1024	018032490	3.361.745.364	4.582.567.101	3.361.745.364
1025	018038075	61.909.922	9.464.190.447	61.909.922
1026	018040741	23.060.253	4.699.187.870	23.060.253
1027	018048728	1.000.000	19.623.897	1.000.000
1028	018049551	85.219.591	3.637.119.059	85.219.591
1029	018070649	1.112.126	18.346.592	1.112.126
1030	018075273	19.933.253.460	19.069.876.997	19.069.876.997
1031	018149427	1.820.235	29.012.163	1.820.235
1032	018152333	132.525.555	1.954.580.192	132.525.555
1033	018163345	38.021.082	51.215.985	38.021.082
1034	018164483	5.724.857	873.739.333	5.724.857
1035	018180489	7.918.642	256.775.184	7.918.642
1036	018180497	1.049.081	9.817.799.889	1.049.081
1037	018212454	1.698.454	1.205.593.459	1.698.454
1038	018213108	632.753.870	1.178.970.566	632.753.870
1039	018213918	68.468.958	1.728.929.449	68.468.958
1040	018214072	85.106.609	709.929.804	85.106.609
1041	018216630	1.228.640	1.770.703.523	1.228.640
1042	018216788	637.843.236	9.052.273.379	637.843.236
1043	018219954	60.895.772	652.858.426	60.895.772
1044	018228528	49.332.012	46.846.081	46.846.081
1045	018231852	94.966.017	24.095.659	24.095.659
1046	018242149	1.154.536.004	23.324.659.008	1.154.536.004
1047	018242826	155.076.241	766.575.553	155.076.241
1048	018242842	93.072.309	492.639.041	93.072.309
1049	018243329	1.113.334	21.659.980.893	1.113.334
1050	018243667	9.103.228	43.740.169	9.103.228
1051	018243832	5.775.410	2.218.791.230	5.775.410

1052	018244137	7.625.782	28.321.541.236	7.625.782
1053	018244244	12.873.492	2.277.034.930	12.873.492
1054	018244723	92.701.034	9.020.007.128	92.701.034
1055	018244848	67.422.608	1.210.699.263	67.422.608
1056	018244863	15.880.000	326.761.689	15.880.000
1057	018244954	156.811.450	37.546.149.653	156.811.450
1058	018245845	480.000.000	3.746.604.116	480.000.000
1059	018245935	5.865.120	53.857.404.673	5.865.120
1060	018248207	6.128.606	32.521.175.737	6.128.606
1061	018248975	8.001.659	899.313.986	8.001.659
1062	018247445	1.537.476	898.379.811	1.537.476
1063	018266793	6.254.544	789.933.070	6.254.544
1064	018272140	207.907.789	5.803.803.580	207.907.789
1065	018293332	2.154.098.779	14.178.579.507	2.154.098.779
1066	018300046	1.500.000	342.818.440	1.500.000
1067	018309104	66.905.453	3.408.187.846	66.905.453
1068	018321505	335.711.912	181.124.373.738	335.711.912
1069	018323816	1.051.041	800.187.049	1.051.041
1070	018324954	12.394.914.382	8.967.577.899	8.967.577.899
1071	018332841	11.166.932	23.406.764	11.166.932
1072	018365809	32.864.584	101.394.261	32.864.584
1073	018368365	86.421.588	1.242.740.283	86.421.588
1074	018394254	756.942.125	397.712.914	397.712.914
1075	018435651	240.810.343	858.655.098	240.810.343
1076	018470997	487.481.258	656.068.620	487.481.258
1077	018474445	18.730.657	454.245.574	18.730.657
1078	018480236	7.216.908	1.687.633.857	7.216.908
1079	018490722	176.863.018	1.500.494.361	176.863.018
1080	018501775	23.180.214	2.676.540	2.676.540
1081	018510289	2.744.937.837	819.342.795	819.342.795
1082	018546143	1.232.561	53.832.453.863	1.232.561
1083	018563278	87.940.888	4.365.894.870	87.940.888
1084	018596890	9.347.344	333.538.603	9.347.344
1085	018601039	12.942.456.688	12.560.063.269	12.560.063.269
1086	018635672	35.954.736	379.747.026	35.954.736
1087	018681163	2.904.497	24.853.091.415	2.904.497
1088	018687111	11.304.898	2.568.612.050	11.304.898
1089	018689786	546.302.564	100.948.432.216	546.302.564
1090	018689992	157.059.528	11.073.802.930	157.059.528
1091	018692970	11.532.182	713.000.264	11.532.182
1092	018693093	3.316.754	1.515.546.994	3.316.754
1093	018693812	1.299.911.483	742.634.337	742.634.337
1094	018694018	1.850.000	2.893.139.258	1.850.000
1095	018694661	25.420.500	233.421.650	25.420.500
1096	018694687	1.691.226	379.095.830	1.691.226
1097	018694893	22.401.191	97.050.009.541	22.401.191
1098	018694943	1.415.529	208.442.974	1.415.529
1099	018695080	62.216.952	7.851.078.090	62.216.952
1100	018695973	12.793.176	186.595.527	12.793.176
1101	018696229	81.899.784	36.735.453.850	81.899.784
1102	018696427	20.792.405	93.334.142	20.792.405
1103	018697706	1.252.932	23.572.917.219	1.252.932
1104	018699496	2.305.981.807	7.790.801.267	2.305.981.807
1105	018700609	1.389.132	16.178.123.700	1.389.132
1106	018701383	139.490.671	527.279.860	139.490.671
1107	018789636	1.701.534	3.466.695.847	1.701.534
1108	018791574	7.355.100	8.132.353.191	7.355.100
1109	018806455	1.000.000	1.053.128.700	1.000.000
1110	018823443	37.014.029	137.022.875	37.014.029
1111	018824649	9.235.039	8.753.282.566	9.235.039
1112	018825117	3.337.958.801	4.052.747.888	3.337.958.801
1113	018825216	14.918.587	146.575.906	14.918.587
1114	018825778	407.914.000	5.906.132.097	407.914.000
1115	018826324	27.141.274	6.575.851.920	27.141.274
1116	018826180	5.522.195	2.548.707.991	5.522.195
1117	018826828	66.040.628	111.705.330	66.040.628

1118	018827816	11.069.805	7.710.937.774	11.069.805
1119	018828129	19.240.436	4.498.065.067	19.240.436
1120	018829291	59.171.526	340.153.424	59.171.526
1121	018847665	6.000.000	5.447.427.774	6.000.000
1122	018868398	2.443.929	67.907.374.673	2.443.929
1123	018879742	68.651.971.376	74.096.125.792	68.651.971.376
1124	018908764	1.000.000	42.706.415	1.000.000
1125	018927152	6.232.594	231.916.497	6.232.594
1126	018930479	42.028.520	16.147.595	16.147.695
1127	018946012	2.429.965.898	26.890.403.693	2.429.965.898
1128	018954768	6.227.274	28.668.396	6.227.274
1129	018954859	155.992.530	26.264.516.589	155.992.530
1130	018957019	4.400.468	574.867.978	4.400.468
1131	018964031	33.073.489	199.182.467	33.073.489
1132	019030130	362.832.631	668.688.923	332.832.631
1133	019049238	34.505.594	35.487.726	34.505.594
1134	019081769	5.139.840	44.383.662	5.139.840
1135	019090174	9.465.437.485	6.073.207.432	6.873.207.432
1136	019119676	97.933.136	2.004.091.399	97.933.136
1137	019123289	6.166.878	25.615.787	6.166.878
1138	019190685	46.571.486	115.550.395	46.571.486
1139	019199488	93.369.753	81.863.536	81.863.536
1140	019225903	1.000.000	22.996.200	1.000.000
1141	019226539	187.800.000	583.975.703	187.800.000
1142	019244565	1.000.000	1.327.136.336	1.000.000
1143	019253999	2.995.058	294.249.907	2.995.058
1144	019265220	15.432.884	138.541.476	15.432.884
1145	019313907	1.266.317.516	344.899.102	344.899.102
1146	019362037	19.859.688	288.963.354	19.859.688
1147	019362144	7.323.943	4.287.037.002	7.323.943
1148	019384130	103.193.749	21.716.166.293	103.196.749
1149	019437951	4.521.000	559.150.409	4.521.000
1150	019473479	224.838.672	2.156.073.562	224.838.672
1151	019492214	359.573.176	4.559.679.108	359.573.173
1152	019514520	1.395.562	170.462.969	1.395.562
1153	019522747	2.069.742.164	228.667.308	228.667.308
1154	019523087	40.230.000	42.950.807	40.230.000
1155	019552132	182.962.080	3.754.902.633	182.962.080
1156	019552876	2.200.000	11.537.285.674	2.200.000
1157	019571835	5.788.300	831.477.634	5.788.300
1158	019576321	1.486.686	36.909.451.229	1.486.686
1159	019576743	550.628.458	3.702.820.148	550.628.458
1160	019577758	2.001.567.666	52.250.810	52.250.810
1161	019579200	3.740.628	2.345.769.713	3.740.628
1162	019580562	1.100.000	124.518.046	1.100.000
1163	019580596	2.081.980	132.835.484	2.081.980
1164	019581222	6.602.091	110.045.739.906	6.602.091
1165	019617802	10.232.241	342.428.213	10.232.241
1166	019620426	971.208.511	3.414.310	3.414.310
1167	019620897	357.783.571	9.541.734.300	357.783.571
1168	019631445	18.874.240	200.322.560	18.874.240
1169	019635663	1.526.785	29.681.926.630	1.526.785
1170	019666123	2.458.006.385	408.550.444	408.550.444
1171	019670249	1.983.000	452.825.117	1.983.000
1172	019710696	18.524.217	1.607.584.558	18.524.217
1173	019758309	46.610.871	1.105.967.106	46.610.871
1174	019790575	377.877.733	74.594.869	74.594.869
1175	019792282	853.265.363	9.520.348.287	853.265.363
1176	019808344	15.000.000	2.335.459.436	15.000.000
1177	019823509	1.063.306	13.272.093.040	1.063.306
1178	019824606	23.401.362	183.355.425	23.401.362
1179	019830694	60.411.947	5.261.823.536	60.411.947
1180	019833193	634.704.058	453.976.168	453.976.168
1181	019844562	1.636.833	1.617.509.329	1.636.833
1182	019851671	9.796.765	759.201.987	9.796.765
1183	019918366	22.154.116	41.322.454	22.154.116

1184	019942713	4.559.230	334.023.194	4.559.230
1185	019976036	6.391.402	33.587.238.641	6.391.402
1186	019976844	105.149.200	164.775.635.362	105.149.200
1187	020020897	1.532.903	136.279.429	1.532.903
1188	020023305	13.200.000	6.351.012.754	13.200.000
1189	020046272	82.939.520	7.641.911.118	82.939.520
1190	020047833	2.915.818.198	7.544.015.829	2.915.818.198
1191	020053608	46.709.398	115.649.000	46.709.398
1192	020055257	3.500.000	215.169.259	3.500.000
1193	020058111	2.912.498	559.498.426	2.912.498
1194	020064069	4.826.028	82.766.349	4.826.028
1195	020076758	66.622.259	15.065.823.896	66.622.259
1196	020077590	8.045.311	14.036.255.386	8.045.311
1197	020109757	1.879.055.996	307.522.457	307.522.457
1198	020119798	1.473.731	1.203.026.655	1.473.731
1199	020129961	8.750.000	2.167.214.179	8.750.000
1200	020142154	14.322.422	16.969.519.618	14.322.422
1201	020165585	1.096.160	6.914.738	1.096.160
1202	020174363	2.964.430	1.196.761.112	2.964.430
1203	020220208	371.266.973	567.085.668	371.266.973
1204	020257812	1.200.000	1.488.684.215	1.200.000
1205	020261301	49.016.449	141.492.215	49.016.449
1206	020264347	23.220.000	83.363.769	23.220.000
1207	020265062	2.547.172.282	1.857.868.777	1.857.868.777
1208	020266862	49.999.999	468.347.340	49.999.999
1209	020267324	210.349.249	711.020.640	210.349.249
1210	020267431	7.146.821	2.016.244.444	7.146.821
1211	020267673	15.049.634	3.685.378.048	15.049.634
1212	020333603	1.200.000	61.069.650	1.200.000
1213	020358099	4.910.801	96.396.387	4.910.801
1214	020355581	19.300.914	703.683.556	19.300.914
1215	020366449	5.546.655.561	264.336.374	264.336.374
1216	020381281	3.600.000	61.784.724	3.600.000
1217	020404281	30.698.260	47.381.311	30.698.260
1218	020405221	66.311.090	2.597.217.968	66.311.090
1219	020419645	77.224.906	43.458.658.849	77.224.906
1220	020461265	102.151.386	5.273.461.149	102.151.386
1221	020465167	6.329.846	1.092.215.900	6.329.846
1222	020467510	4.320.000	12.751.434.114	4.320.000
1223	020474011	277.327.236	647.419.724	277.327.236
1224	020487773	4.117.732	20.222.421	4.117.732
1225	020526927	2.325.085	1.012.821.250	2.325.085
1226	020554267	1.484.237	617.905.202	1.484.237
1227	020586392	719.847.136	8.776.446.664	719.847.136
1228	020590121	158.921.178	300.726.330.822	158.921.178
1229	020591400	22.388.832	2.700.906.850	22.388.832
1230	020626255	8.580.723	1.269.804.937	8.580.723
1231	020627535	1.500.000	1.017.582.376	1.500.000
1232	020636510	6.782.143	97.528.224	6.782.143
1233	020707691	214.138.591	3.826.640.242	214.138.591
1234	020724654	200.478.556	734.259.849	200.478.556
1235	020767935	197.633.920	958.547.000	197.633.920
1236	020819082	914.995.200	10.735.222.331	914.995.200
1237	020847000	2.400.000	10.306.897	2.400.000
1238	020880738	5.405.712	687.574.170	5.405.712
1239	020882700	267.012.724	6.017.287.952	267.012.724
1240	020916540	37.256.625.523	102.659.101.951	37.256.625.523
1241	020919098	35.000.000	17.464.118	17.464.118
1242	020952784	1.817.567.725	920.514.078	920.514.078
1243	020969671	199.499.756	1.759.619.386	199.499.756
1244	020977625	5.000.000	29.967.872	5.000.000
1245	021023239	6.497.357	74.739.960	6.497.357
1246	021026497	4.202.023	157.454.181	4.202.023
1247	021062344	38.715.757	2.500.078.368	38.715.757
1248	021077847	3.868.167	29.626.822.317	3.868.167
1249	021089545	1.100.000	2.000.000	1.100.000

1250	021096615	3.070.645	1.531.767.061	3.070.645
1251	021111323	37.827.508	2.890.568.877	37.827.508
1252	021118047	177.959.290	5.884.652.860	177.959.290
1253	021127329	2.500.000	580.902.762	2.500.000
1254	021129390	19.723.687	525.407.409	19.723.687
1255	021136882	134.250.620	1.060.406.813	134.250.620
1256	021157169	1.963.269.299	1.067.477.000	1.067.477.000
1257	021159017	33.044.951	14.792.776.000	33.044.951
1258	021159298	463.028.226	541.440.498	463.028.226
1259	021159736	1.096.794	676.610.219	1.096.794
1250	021159918	86.845.977	79.585.788	79.585.788
1261	021160098	22.463.361	1.563.056	1.563.056
1262	021160478	3.672.000	2.238.603.694	3.672.000
1263	021161997	111.807.000	1.780.919.914	111.807.000
1264	021162268	1.371.988	10.213.837.100	1.371.988
1265	021164496	1.295.466.965	1.704.628.412	1.295.466.965
1266	021164645	3.212.278.880	4.353.487.953	3.212.278.880
1267	021164892	96.429.177	797.521.000	96.429.177
1268	021180542	6.000.000	138.947.790	6.000.000
1269	021184841	1.061.027.611	266.868.645	266.868.645
1270	021199731	1.000.000	608.600.843	1.000.000
1271	021337431	57.156.247	11.132.289.940	57.156.247
1272	021338927	3.037.337	7.881.324.611	3.037.337
1273	021347802	165.524.232	6.631.984.519	165.524.232
1274	021350947	297.310.787	714.196.380	297.310.787
1275	021395363	3.028.295.866	93.052.630.388	3.028.295.866
1276	021395843	1.029.596.763	13.963.114.675	1.029.596.763
1277	021396247	41.581.368	13.502.879.305	41.581.368
1278	021405691	130.949.969	1.024.737.509	130.949.969
1279	021457379	2.896.334.103	1.528.256.226	1.528.256.226
1280	021605738	56.120.422	500.820.448	56.120.422
1281	021621156	103.871.539	3.232.877.879	103.871.539
1282	021653530	12.853.166	4.438.460.014	12.853.166
1283	021654314	257.900.387	18.178.154.772	257.900.387
1284	021657234	2.993.740	4.001.398.973	2.993.740
1285	021720602	5.500.000	51.739.764	5.500.000
1286	021779210	39.395.982	198.657.734	39.395.982
1287	021789722	5.000.000	79.513.539	5.000.000
1288	021790647	10.768.008	2.738.056.688	10.768.008
1289	021806997	29.982.975	649.073.866	29.982.975
1290	021807649	96.773.424	679.421.788	96.773.424
1291	021812268	1.406.403	305.552.681	1.406.403
1292	021820154	134.059.394	13.040.035.310	134.059.394
1293	021827837	3.848.401	3.125.014.126	3.848.401
1294	021833728	3.427.007.740	639.508.203.232	3.427.007.740
1295	021834213	2.253.055.128	1.635.059.934	1.635.059.934
1296	021844683	70.743.029	3.019.075.867	70.743.029
1297	021866322	2.068.134	43.842.500	2.068.134
1298	021877139	5.028.719	43.322.148	5.028.719
1299	021886361	62.042.255	33.396.549.874	62.042.255
1300	021891445	1.500.000	4.512.613.000	1.500.000
1301	021929278	7.399.763	2.306.279.129	7.399.763
1302	021930730	356.285.665	860.133.815	356.285.665
1303	021930839	33.600.000	7.229.695.947	33.600.000
1304	021931167	4.492.500	3.277.199	3.277.199
1305	021931340	1.200.000	281.754.689	1.200.000
1306	021931902	22.343.978	2.324.063.894	22.343.978
1307	021939160	29.380.597	314.462.605	29.380.597
1308	021940150	1.381.447	1.496.346.999	1.381.447
1309	021942099	92.176.715	15.882.156.081	92.176.715
1310	021942800	1.423.909	263.635.038	1.423.909
1311	021986436	1.142.060	815.471.891	1.142.060
1312	021987649	1.040.699	1.555.698.637	1.040.699
1313	021989991	31.630.947	504.936.963	31.630.947
1314	021990510	25.861.794	686.857.429	25.861.794
1315	021992596	560.465.377	1.047.930.789	560.465.377

1316	021994926	4.765.048	1.653.585.496	4.765.048
1317	021999230	1.000.000	22.330.288	1.000.000
1318	021999626	127.093.282	205.950.423	127.093.282
1319	022047757	807.889.527	836.570.500	807.889.527
1320	022051403	56.118.224	76.516.213	56.118.224
1321	022105969	2.304.458	451.151.400	2.304.458
1322	022135214	4.000.000	8.437.365	4.000.000
1323	022136709	30.192.678	37.845.878	30.192.678
1324	022140487	64.511.900	77.385.453	64.511.900
1325	022220446	18.302.107	264.317.062	18.302.107
1326	022269234	70.021.090	355.417.628	70.021.090
1327	022304877	136.116.275	84.239.633	84.239.633
1328	022321533	1.500.000	1.062.319.209	1.500.000
1329	022322432	8.100.364	72.909.977	8.100.364
1330	022384648	4.400.000	1.946.406.595	4.400.000
1331	022385650	172.830.787	409.740.709	172.830.787
1332	022386916	5.093.280	2.390.869.450	5.093.280
1333	022390066	11.466.069	1.558.115.385	11.466.069
1334	022440424	1.834.076.791	22.809.060.652	1.834.076.791
1335	022440747	2.118.475	1.168.036.180	2.118.475
1336	022441257	27.962.665	598.400.716	27.962.666
1337	022446512	31.545.912	13.256.400	31.545.912
1338	022464721	109.034.590	314.590.315	109.034.590
1339	022482384	102.469.536	99.742.728	99.742.728
1340	022516371	4.000.000	7.881.909	4.000.000
1341	022516538	60.844.469	609.870.448	60.844.469
1342	022597864	67.342.808	234.808.716	67.342.808
1343	022538805	169.364.811	2.324.717.772	169.364.811
1344	022539175	56.393.587	7.335.453	56.393.587
1345	022551915	35.271.119	169.093.078	35.271.119
1346	022570873	7.670.195	662.250.886	7.670.195
1347	022616056	126.558.121	16.779.658	126.558.121
1348	022650955	48.677.160	8.084.543.472	48.677.160
1349	022731962	1.709.767.472	4.029.790.063	1.709.767.472
1350	022733993	178.110.328	5.753.410.286	178.110.328
1351	022737183	21.054.434	284.302.555	21.054.434
1352	022754261	94.130.212	495.554.685	94.130.212
1353	022755417	1.054.016.639	16.433.632.857	1.054.016.639
1354	022796395	6.000.000	138.678.730	6.000.000
1355	022798763	2.500.000	73.008.724	2.500.000
1356	022798953	53.300.301	9.595.994	53.300.301
1357	022800718	13.007.525	33.748.046	13.007.525
1358	022831606	363.968.280	6.961.625.241	363.968.280
1359	022831861	1.310.953	1.238.617.656	1.310.953
1360	022844559	1.585.396	754.015.328	1.585.396
1361	022855340	3.706.560	1.246.554.742	3.706.560
1362	022868145	36.233.618	17.728.123.017	36.233.618
1363	022882286	90.000.000	1.708.814.935	90.000.000
1364	022889521	1.627.922	39.300.706	1.627.922
1365	022904122	1.078.932	72.569.102	1.078.932
1366	022904494	449.929.990	248.610.930	449.929.990
1367	022936074	8.000.000	3.501.200	8.000.000
1368	022953277	5.984.986	6.717.302	5.984.986
1369	022962823	1.000.000	14.119.958.129	1.000.000
1370	022966162	3.366.000	13.331.954.213	3.366.000
1371	022982920	45.113.252	23.559.828	45.113.252
1372	023033210	12.547.753	226.003.407	12.547.753
1373	023090129	29.089.295	2.791.800	29.089.295
1374	023115702	70.583.220	26.315.436	70.583.220
1375	023118037	3.197.361	630.982.755	3.197.361
1376	023119530	135.535.382	219.181.667	135.535.382
1377	023121015	11.012.093.993	24.842.518.372	11.012.093.993
1378	023122005	202.739.978	34.870.568	202.739.978
1379	023128861	1.806.581	29.526.354	1.806.581
1380	023128895	480.041.946	1.923.395.920	480.041.946
1381	023133978	4.317.493	109.839.000	4.317.493

1382	023164262	15.185.741	2.250.919.492	15.186.741
1383	023184773	1.000.000	1.184.681.521	1.000.000
1384	023241139	13.333.333	695.768.247	13.333.333
1385	023266380	1.198.457.919	5.430.400	5.480.400
1386	023276504	12.080.727	95.420.976	12.080.727
1387	023325129	8.366.652	94.180.908	8.366.652
1388	023331523	295.122.027	1.128.380.140	295.122.027
1389	023415557	186.598.400	53.779.679.477	186.598.400
1390	023439607	37.319.410	57.180.500	37.319.410
1391	023464084	56.312.807	19.425.068.605	56.312.807
1392	023547391	50.634.165	11.321.904.517	50.634.165
1393	023556699	125.349.216	251.078.000	125.349.216
1394	023561079	1.135.469.422	8.684.691.100	1.135.469.422
1395	023589914	61.204.500	61.204.500	61.204.500
1396	023590482	89.159.948	7.572.178.296	89.159.948
1397	023604614	51.057.933	70.801.000	51.057.933
1398	023608821	1.684.909	2.029.746.771	1.684.909
1399	023613474	939.261.926	3.709.341.025	939.261.926
1400	023614654	4.977.823	254.917.923	4.977.823
1401	023618093	5.000.083	1.409.744	1.409.744
1402	023618440	133.021.731	146.579.874	133.021.731
1403	023664659	23.249.230	45.429.022	23.249.230
1404	023700743	26.101.387	153.925.433	26.101.387
1405	023705908	125.515.511	842.743.073	125.515.511
1406	023732597	24.602.392	1.801.437.015	24.602.392
1407	023740095	159.864.245	1.242.513.892	159.864.245
1408	023770142	2.814.976.728	1.258.719.300	1.258.719.300
1409	023775232	6.862.596	589.345.115	6.862.596
1410	023791650	2.156.172	656.241.309	2.156.172
1411	023799661	20.240.557.056	10.532.887.014	10.532.887.014
1412	023841026	483.008.265	25.016.740.417	483.008.265
1413	023842727	1.189.319	76.678.452	1.189.319
1414	023843493	6.685.473	1.131.841.540	6.685.473
1415	023847122	54.591.936	3.095.045.058	54.591.936
1416	023859614	6.434.951.788	7.531.168.951	6.434.951.788
1417	023868136	17.784.804	1.091.454.086	17.784.804
1418	023879091	21.425.395	1.730.347.258	21.425.395
1419	023998768	1.000.000	357.636.302	1.000.000
1420	024006348	17.088.012	27.566.556	17.088.012
1421	024023947	3.829.821	19.348.318	3.829.821
1422	024034209	1.000.000	68.105.114	1.000.000
1423	024053902	1.169.322	842.812.015	1.169.322
1424	024062523	1.416.588	6.030.220.764	1.416.588
1425	024069684	1.000.000	225.000.000	1.000.000
1426	024096596	382.672.673	7.994.012.364	382.672.673
1427	024103517	29.177.487	6.944.685	6.944.685
1428	024112344	39.870.391	330.241.301	39.870.391
1429	024114183	153.826.070	2.066.906.164	153.826.070
1430	024132631	34.799.358	3.516.292.286	34.799.358
1431	024143463	671.395.059	25.078.719.931	671.395.059
1432	024143471	14.897.507	1.389.109.764	14.897.507
1433	024143521	7.381.853	3.310.921.069	7.381.853
1434	024143562	459.513.326	25.220.511.863	459.513.326
1435	024143737	2.534.895	2.141.173	2.141.173
1436	024144388	5.495.169	30.030.615.059	5.495.169
1437	024145088	9.810.921	1.179.497.029	9.810.921
1438	024145252	12.411.758	123.000.757.254	12.411.758
1439	024145997	197.410.777	16.843.593.456	197.410.777
1440	024147092	151.960.409	103.031.181	103.031.181
1441	024147761	5.306.917	353.835.857	5.306.917
1442	024149106	26.218.551	53.152.754	26.218.551
1443	024153272	3.468.600	174.933.011	3.468.600
1444	024153512	40.795.614	20.499.083.667	40.795.614
1445	024154056	125.354.003	5.145.481.553	125.354.003
1446	024169369	5.358.715	83.845.800	5.358.715
1447	024171126	335.197.671	7.015.482.808	335.197.671

1448	024173957	6.487.671	29.101.303.782	6.487.671
1449	024189300	1.859.135	413.796.853	1.859.195
1450	024189805	1.000.000	196.660.532	1.000.000
1451	024191074	49.751.599	501.748.209	49.751.599
1452	024191132	2.830.602	327.635.233	2.830.602
1453	024193039	22.158.694	1.462.846.980	22.158.694
1454	024193047	142.539.349	677.869.075	142.539.349
1455	024195745	1.571.430	435.751.044	1.571.430
1456	024196578	3.359.685	10.449.814	3.359.685
1457	024215477	1.078.750	84.351.488	1.078.750
1458	024219644	45.259.603	10.385.021.985	45.259.603
1459	024253353	30.724.000	35.095.654.052	30.724.000
1460	024264913	1.100.000.000	9.144.519.787	1.100.000.000
1461	024264962	366.125.689	1.218.603.612	366.125.689
1462	024303836	1.089.819.378	1.275.041.520	1.089.819.378
1463	024310393	63.244.172	7.883.538	7.883.538
1464	024311417	9.247.690	8.073.003	8.073.003
1465	024317166	10.500.000	141.333.905	10.500.000
1466	024324261	1.028.800	18.171.526	1.028.800
1467	024332132	103.761.989	408.133.478	103.761.989
1468	024338865	259.295.456	711.441.245	259.295.456
1469	024355919	107.595.159	89.130.470	89.160.470
1470	024366833	8.922.747	1.058.319.073	8.922.747
1471	024411811	105.320.556	14.012.857.807	105.320.556
1472	024421836	190.574.179	1.924.637.826	190.574.179
1473	024430553	529.199.183	312.349.337	312.349.337
1474	024464596	10.107.019	42.075.746	10.107.019
1475	024465221	89.805.622	866.594.053	89.805.622
1476	024496473	4.500.000	619.109.124	4.500.000
1477	024499220	29.026.208	38.811.154	29.826.208
1478	024535452	54.000.000	145.928.699	54.000.000
1479	024541492	50.464.268	56.779.438	50.464.268
1480	024577298	9.777.773	2.366.555.091	9.777.773
1481	024588980	18.201.900	132.306.708	18.201.900
1482	024595381	4.500.000	2.125.000	2.125.000
1483	024614778	16.814.516	465.034.085	16.814.516
1484	024637746	4.507.451	355.817.359	4.507.451
1485	024642092	2.156.561	962.701.858	2.156.561
1486	024676736	266.075.491	16.209.760.220	266.075.491
1487	024686734	4.800.000	30.298.976	4.800.000
1488	024699052	1.112.585.259	1.215.001	1.215.001
1489	024741217	18.294.004	1.678.828.138	16.294.004
1490	024767881	1.000.000	3.672.140	1.000.000
1491	024760454	47.163.686	5.147.818.965	47.163.686
1492	024806242	1.000.000	29.630.623	1.000.000
1493	024810467	15.910.000	197.596.903	15.910.000
1494	024817819	3.218.307	1.123.500.158	3.218.307
1495	024835548	6.478.545	207.905.522	6.478.545
1496	024844045	21.460.046	51.415.730	21.460.046
1497	024915621	9.504.673	26.188.516	9.504.673
1498	024918161	2.360.099.704	6.150.643.757	2.360.099.704
1499	024931974	1.500.000	13.258.491.862	1.500.000
1500	024971863	57.484.644	512.056.704	57.484.644
1501	025021676	1.000.000	3.647.463.250	1.000.000
1502	025033135	12.095.098	6.328.158.637	12.095.098
1503	025041914	96.845.431	39.097.267.231	96.845.431
1504	025048810	13.865.931	4.220.522.336	13.865.931
1505	025049529	326.843.085	64.237.632.019	326.843.085
1506	025049883	1.711.160.110	21.793.004.095	1.711.160.110
1507	025055732	33.603.428	2.247.159.711	33.603.428
1508	025059726	236.713.668	3.580.759.518	236.713.668
1509	025065699	32.683.128	1.554.018.394	32.683.128
1510	025086133	10.602.744	74.292.679	10.602.744
1511	025086980	5.955.000	265.075.000	5.955.000
1512	025114810	1.000.000	4.941.671	1.000.000
1513	025134958	1.126.387	46.970.431	1.126.387

1514	025155193	4.941.460.973	848.357.365	848.357.666
1515	025197229	40.278.026	67.448.510	40.278.026
1516	025197922	1.000.000	37.772.759	1.000.000
1517	025197930	21.631.960	397.400.214	21.631.960
1518	025198342	2.698.202	255.953.540	2.698.202
1519	025198656	22.576.373	562.159.253	22.576.373
1520	025198706	148.372.191	2.512.265.573	148.672.191
1521	025198920	197.477.213	2.259.661.322	197.477.213
1522	025199142	2.547.843.546	2.625.957.518	2.547.843.546
1523	025199340	460.900.000	730.703.968	460.900.000
1524	025206640	2.228.340	405.503.255	2.228.340
1525	025239104	1.000.000	1.313.904	1.000.000
1526	025250762	874.097.478	11.188.257.600	874.097.478
1527	025252644	899.528.958	415.859.296	415.859.293
1528	025278359	4.003.951	21.947.429	4.003.951
1529	025286972	457.820.905	2.072.596.562	457.820.905
1530	025312281	2.000.000	13.381.559	2.000.000
1531	025342114	3.148.531	15.692.852.389	3.148.531
1532	025346875	110.394.999	10.385.263.892	110.394.999
1533	025382250	58.986.525	2.303.955.411	58.986.525
1534	025387077	4.903.636	215.888.844	4.903.636
1535	025407566	1.739.605.691	5.140.881.514	1.739.605.691
1536	025412354	42.053.218	1.605.589.681	42.053.218
1537	025416637	8.658.438.607	1.363.994.332	1.363.994.332
1538	025446766	3.685.285	655.507.975	3.685.285
1539	025452400	3.794.531	1.692.700	1.692.700
1540	025454125	421.383.971	798.236.750	421.383.971
1541	025458225	17.462.154.689	10.627.451.697	10.627.451.697
1542	025461534	33.081.920	514.086.845	33.081.920
1543	025475195	240.321.035	6.582.809.424	249.321.035
1544	025544958	2.245.773	422.582.907	2.245.773
1545	025581703	17.829.739	356.499.000	17.829.739
1546	025584582	9.312.402	1.010.792.992	9.312.402
1547	025631276	4.000.000	9.961.850.773	4.000.000
1548	025677113	146.316.000	169.442.727	146.316.000
1549	025688599	13.060.348	141.689.390	13.060.348
1550	025758210	1	3.808.176.012	1
1551	025761057	5.823.870	43.474.374.878	5.823.870
1552	025901141	109.482.132	2.043.501.908	109.482.132
1553	025939125	17.746.586	1.137.381.394	17.746.586
1554	025939323	90.052.168	400.576.082.442	90.052.168
1555	025939646	1.527.016	1.268.865.475	1.527.016
1556	025954347	3.600.000	1.442.685.626	3.600.000
1557	025966441	63.195.410	913.684.367	63.195.416
1558	025967945	42.255.093	56.607.300	42.255.093
1559	025968124	10.876.162	287.431.711	10.876.162
1560	025970377	6.336.000	12.404.316.088	6.336.000
1561	025982422	24.621.472	42.909.090	24.621.472
1562	026023754	91.828.386	43.384.071	43.384.071
1563	026044941	805.624.756	1.484.044.861	805.624.756
1564	026046920	1.081.120	89.164.056	1.081.120
1565	026065110	242.247.962	1.390.155.248	242.247.962
1566	026106823	16.041.800	269.608.229	16.041.800
1567	026145631	8.530.151	2.664.579.553	8.530.151
1568	026175760	2.562.108	209.159.574	2.562.108
1569	026224378	29.982.631	716.437.079	29.982.631
1570	026234914	51.736.364	18.211.730	18.211.730
1571	026239319	37.735.292	5.090.799	5.093.799
1572	026243022	11.406.758	1.436.185.621	11.406.758
1573	026243915	4.097.980	1.736.645.701	4.097.980
1574	026244350	153.214.462	1.457.773.115	153.214.462
1575	026244640	13.940.852	230.225.445	13.940.852
1576	026281675	10.016.405	1.038.223.104	10.016.405
1577	026298042	19.209.136	1.603.632.457	19.209.136
1578	026330936	62.785.672	6.260.000	6.260.000
1579	026342055	2.222.697	2.511.478.924	2.222.697

1580	026349464	14.734.708.218	2.340.295.000	2.340.295.000
1581	026452417	4.022.052	311.602.663	4.022.052
1582	026481380	12.145.277	214.938.861	12.145.277
1583	026482026	22.387.746.908	149.058.932.299	22.387.746.908
1584	026482612	33.899.655	6.125.825.240	33.899.655
1585	026482851	19.037.284	1.009.480.677	19.037.284
1586	026496877	12.294.501	69.254.938	12.294.501
1587	026540922	102.211.834	521.732.847	102.211.834
1588	026611939	24.756.030	659.029.293	24.756.030
1589	026666271	162.677.162	176.935.213	162.677.162
1590	026667188	33.077.099	3.896.924	3.896.924
1591	026716639	60.000.000	2.102.457.208	60.000.000
1592	026718494	560.664.700	1.701.954.461	560.664.700
1593	026721639	5.706.074	28.139.342.080	5.706.074
1594	026729277	9.211.744	1.668.772.363	9.211.744
1595	026776476	4.764.351.423	602.533.670	602.533.670
1596	026817353	1	6.858.381.775	1
1597	026819011	1.000.000	13.593.347.518	1.000.000
1598	026899765	1.500.000	147.739.260	1.500.000
1599	027003516	793.758.171	1.178.183.005	793.758.171
1600	027068709	1.100.000	14.144.705.555	1.100.000
1601	027145283	752.492.198	8.598.544.349	752.492.198
1602	027182963	195.058.846	580.016.528	195.058.846
1603	027308279	44.091.418	7.638.147.349	44.091.418
1604	027417914	11.274.720	5.551.573.141	11.274.720
1605	027419787	3.405.112	8.144.370.214	3.405.112
1606	027420447	2.723.771	823.656.208	2.723.771
1607	027435957	3.600.000	464.643.549	3.600.000
1608	027453141	25.600.000	505.784.772	25.600.000
1609	027462910	12.857.162	2.850.111.725	12.857.162
1610	027465905	4.301.540	83.100.000	4.301.540
1611	027505296	30.220.297	175.294.330	30.220.297
1612	027552603	30.313.695	100.192.407	30.313.695
1613	027590686	55.486.421	357.841.698.362	55.486.421
1614	027591916	1.232.291	53.181.818	1.232.291
1615	027575412	1.459.808.538	12.600.000	12.600.000
1616	027747070	108.106.667	2.609.500	2.609.500
1617	027765981	77.381.282	49.293.613	49.293.613
1618	027763035	18.917.368	3.278.459.616	18.917.368
1619	027800804	1.153.788	23.590.981	1.153.788
1620	027850478	23.634.702	3.480.413.973	23.634.702
1621	027851138	36.053.570	45.358.181	36.053.570
1622	027860832	56.469.530	104.636.435	56.469.530
1623	027905595	1.524.535.776	3.376.963.079	1.524.535.776
1624	027915891	1.000.000	577.660.466	1.000.000
1625	027953470	38.610.094	266.388.828	38.610.094
1626	028003473	7.536.595	1.321.495.718	7.536.595
1627	028017002	180.513.257	152.952.276	152.952.276
1628	028045258	1.000.000	3.570.720	1.000.000
1629	028162519	221.743.708	854.010.545	221.743.708
1630	028163673	105.056.084	483.264.846	105.056.084
1631	028168284	599.781.710	12.624.134.475	599.781.710
1632	028169274	20.000.000	63.053.260.596	20.000.000
1633	028205656	369.284.016	19.197.600	19.197.600
1634	028230589	34.309.160	36.997.646	34.309.160
1635	028239099	10.819.200	1.462.913.826	10.819.200
1636	028241635	46.866.341	1.386.847.925	46.866.341
1637	028249530	17.539.736	504.320.199	17.539.736
1638	028264091	7.450.850	782.827.566	7.450.850
1639	028264372	132.993.044	132.993.044	132.993.044
1640	028275428	1.200.000	97.621.794	1.200.000
1641	028380483	3.400.000	24.174.020	3.400.000
1642	028440998	391.419.310	2.693.478.186	391.419.310
1643	028483535	2.735.594	110.704.334	2.735.594
1644	028487080	2.900.000	4.202.853.926	2.900.000
1645	028558054	777.173.630	759.451.690	759.451.690

1646	028572733	9.168.154	145.878.141	9.168.154
1647	028580603	7.000.000	92.127.665	7.000.000
1648	028674893	719.646.335	756.287.334	719.646.335
1649	028683487	4.462.408	25.138.355	4.462.408
1650	028769505	1.900.000	140.627.047	1.900.000
1651	028769760	1.417.745	4.232.607	1.417.745
1652	028788792	53.000.000	579.811.182	53.000.000
1653	028814838	108.061.476	2.901.523.837	108.061.476
1654	028929174	13.549.507	25.050.287	13.549.507
1655	028949865	19.088.960	771.092.202	19.088.960
1656	028994051	73.250.306	7.507.300.774	73.250.306
1657	029012796	1.433.183	230.131.500	1.433.183
1658	029028533	1.178.184	6.417.673.058	1.178.184
1659	029056256	8.609.753	20.675.467	8.609.753
1660	029066172	56.039.987	254.334.250	56.039.987
1661	029140290	346.824.396	1.067.628.845	346.824.393
1662	029140845	60.010.917	8.328.339.304	60.010.917
1663	029305513	14.237.737	4.587.970.028	14.237.737
1664	029307485	1.100.000	9.315.542.737	1.100.000
1665	029308947	3.473.750	204.350.854	3.473.750
1666	029309788	1.000.000	865.894.058	1.000.000
1667	029381555	2.172.570	5.772.997	2.172.570
1668	029483153	2.645.562	63.162.766	2.645.562
1669	029549581	54.958.064	2.181.927.808	54.958.064
1670	029703758	1.766.600	2.357.272	1.766.600
1671	029722758	1.540.874	6.940.757	1.540.874
1672	029723269	125.914.367	139.453.974	125.914.367
1673	029751872	5.000.000	10.717.642	5.000.000
1674	029788759	74.336.919	1.615.766.492	74.336.919
1675	029831418	8.521.612.121	27.278.099.679	8.521.612.121
1676	029862869	10.635.312	1.341.492.570	10.635.312
1677	029915311	1.731.141.196	151.876.186	1.731.141.196
1678	029933108	238.694.496	5.715.428.043	238.694.496
1679	029934346	5.535.723.284	56.434.525.036	5.535.723.284
1680	029954039	1.776.500	143.847.071	1.776.500
1681	030008478	1.000.000	6.471.848.826	1.000.000
1682	030017313	88.668.200	622.729.825	88.668.200
1683	030056535	86.116.163	51.583.627	51.583.627
1684	030073357	11.171.448	8.756.737.749	11.171.448
1685	030081152	4.894.876	1.090.418.562	4.894.876
1686	030120059	1.299.360.592	3.336.206.045	1.299.360.592
1687	030153407	1.073.300	400.375.371	1.073.300
1688	030165120	1.000.000	10.863.528	1.000.000
1689	030170690	8.518.247	43.365.141	8.518.247
1690	030254049	14.500.000	434.713.100	14.500.000
1691	030254056	8.124.363	445.085.252	8.124.363
1692	030271480	2.000.000	1.864.807.979	2.000.000
1693	030329452	12.977.710	323.897.827	12.977.710
1694	030348403	209.356.860	1.363.082.815	209.356.860
1695	030360382	3.031.227	24.153.309	3.031.227
1696	030362618	113.760.000	65.312.047.124	113.760.000
1697	030373187	8.860.119	422.444.319	8.860.119
1698	030402143	45.586.024	125.452.985	45.586.024
1699	030473094	59.685.980	1.282.373.519	59.685.980
1700	030474589	4.340.000	3.490.057.976	4.340.000
1701	030484695	31.929.397	1.221.550.412	31.929.397
1702	030505168	6.228.199	518.185.414	6.228.199
1703	030800460	5.619.698	495.325.295	5.619.698
1704	030803522	493.689.629	163.479.398.803	493.689.629
1705	030829899	3.200.000	122.862.004	3.200.000
1706	030885107	1.200.000	6.156.286.833	1.200.000
1707	030885214	92.416.458	11.275.356.645	92.416.458
1708	030911598	46.366.217	1.265.442.990	46.366.217
1709	030911721	2.501.972	50.039.457	2.501.972
1710	030937833	323.734.225	13.109.926.531	323.734.225
1711	030938419	874.302.552	26.286.315.249	874.302.552

1712	031144330	92.708.460	4.873.680.434	92.708.460
1713	031167109	42.829.262	400.348.332	42.829.262
1714	031243512	1.000.000	296.802.015	1.000.000
1715	031244890	201.910.920	1.291.632.988	201.910.920
1716	031356660	222.361.322	3.974.413.047	222.361.322
1717	031443822	13.981.450	3.166.542	3.166.542
1718	031552953	202.320.502	159.315.738.400	202.320.502
1719	031553720	20.384.641	12.203.042.019	20.384.641
1720	031553488	78.995.232	3.870.779.599	78.995.232
1721	031684079	1.000.000	617.896.770	1.000.000
1722	031693229	2.659.942	4.575.504.377	2.659.942
1723	031721301	67.355.817	2.644.503.104	67.355.817
1724	031779275	11.500.000	134.518.974	11.500.000
1725	031791445	322.762.041	5.155.637	5.155.637
1726	031835184	1.044.316	91.422.516	1.044.316
1727	031909898	488.854.697	138.205.163.638	488.854.697
1728	031910599	1.199.797	243.527.000	1.199.797
1729	031936446	2.958.774	2.395.645.635	2.958.774
1730	032123671	1.190.000	2.039.223.365	1.190.000
1731	032203036	8.559.090	1.802.094.306	8.559.090
1732	032277790	5.820.119	5.625.000	5.625.000
1733	032281990	1.000.000	91.228.298	1.000.000
1734	032347759	2.000.000	554.895.312	2.000.000
1735	032480628	5.694.377	1.584.123.596	5.694.377
1736	032519910	1.300.000	1.484.434.000	1.300.000
1737	032561326	20.921.641	5.707.176.115	20.921.641
1738	032561706	9.162.374	7.397.391.434	9.162.374
1739	032573982	2.093.488	33.042.658	2.093.488
1740	032601080	40.686.000	3.879.508.196	40.686.000
1741	032634438	7.000.000	2.179.791.579	7.000.000
1742	032652984	345.887.865	91.985.836.666	345.887.865
1743	032670598	400.562.943	1.130.700.355	400.562.943
1744	032713174	1.000.000	1.370.396.250	1.000.000
1745	032763013	2.035.532.279	1.453.975.942	1.453.975.942
1746	032771368	1.000.000	5.258.201.578	1.000.000
1747	032783771	4.462.297	341.456.438	4.462.297
1748	032813677	31.741.459	187.684.188	31.741.459
1749	032877037	163.614.000	199.081.630	163.614.000
1750	032955395	4.179.306	19.173.539	4.179.306
1751	033073511	3.665.610	105.550.000	3.665.610
1752	033112160	457.615.988	14.591.896.942	457.615.988
1753	033130634	3.121.783	8.030.802	3.121.783
1754	033159229	1.500.000	372.686.286	1.500.000
1755	033102942	1.000.000	8.419.600	1.000.000
1756	033429994	2.523.335	21.829.044	2.523.335
1757	040307381	88.016	12.608.038	88.016
1758	040680852	7.898.066.144	4.097.159.010	4.097.159.010
1759	040838997	5.983.036	703.289.960	5.983.036
1760	041426677	1.878.414	1.372.674.767	1.878.414
1761	041756487	204.707.784	134.997.306	134.997.306
1762	041860560	205.000.000	58.100.800	58.100.800
1763	052046117	1.200.000	11.405.514	1.200.000
1764	060633542	356.154.699	334.447.599	334.447.599
1765	061504502	4.114.720	18.848.661	4.114.720
1766	062598370	4.105.249	3.837.266	3.837.266
1767	063529620	1.235.966	390.000.000	1.235.966
1768	063677627	30.854.988	182.030.801	30.854.988
1769	064374622	4.733.780	9.173.780	4.733.780
1770	065159329	1.248.106	11.805.000	1.248.106
1771	065973869	1.346.213	11.900.000	1.346.213
1772	066497561	39.461.566	7.495.860	7.495.860
1773	066770876	5.875.100	9.682.500	5.875.100
1774	068245463	266.352.181	39.923.428	39.923.428
1775	069335842	70.582.590	151.083.750	70.582.590
1776	069416584	15.425.405	10.000.000	10.000.000
1777	069817310	1.200.000	63.584.223	1.200.000

1778	069984722	2.999.833	18.496.097	2.999.833
1779	070870290	501.610.979	336.443.216	338.443.216
1790	070994025	10.226.000	24.632.959	10.226.000
1781	071720304	342.602.603	32.679.734	32.679.734
1792	071814305	1.129.997.268	614.610.349	614.610.349
1793	071987283	4.719.071	53.268.476	4.719.071
1794	074324229	3.000.000	1.000.000	1.000.000
1785	075553162	1.920.000	63.111.926	1.920.000
1786	078263266	1.200.000	8.301.703	1.200.000
1787	079200655	4.499.878	35.227.515	4.499.878
1788	084274026	6.207.255	17.777.820	6.207.255
1789	085346237	225.592.610	40.953.674	40.953.674
1790	087029039	1.200.000	2.284.391	1.200.000
1791	087247722	1.200.000	5.382.249	1.200.000
1792	087852398	4.681.782	17.584.980	4.681.782
1793	142332584	44.545.743	1.060.659	1.060.659
1794	142810666	6.289.824	7.057.800	6.289.824
1795	145876841	1.200.000	3.356.251	1.200.000
1796	146891254	1.200.000	4.674.061	1.200.000
1797	146996202	13.948.317	1.384.564	1.384.564
1798	161366919	1.200.000	5.046.391	1.200.000
1799	196003511	38.700.000	5.749.970	5.749.970
1800	210057303	1.493.629	181.298.751	1.493.629
1801	210075024	91.017.496	261.622.951	91.017.496
1802	210084554	2.027.333.333	1.122.000.000	1.122.000.000
1803	210107686	8.051.661	702.578.327	8.051.661
1804	210209144	501.092.389	17.198.430.974	501.092.389
1805	210361895	1.330.000	303.606.000	1.330.000
1806	210399077	1.000.000	52.313.530	1.000.000
1807	210510004	39.432.333	55.155.553	39.432.333
1808	210517207	192.053.000	1.247.631.208	192.053.000
1809	210549636	1.547.337.994	431.241.705	431.241.705
1810	210581583	1.228.022	2.606.480	1.228.022
1811	210584652	112.109.737	48.202.150	48.202.150
1812	210608964	4.437.123	3.130.926.555	4.437.123
1813	210617072	16.148.101	2.613.355.595	16.148.101
1814	210659332	24.420.000	508.285.821	24.420.000
1815	210683702	14.192.113	26.017.000	14.192.113
1816	210693834	105.418.526	6.851.439.974	105.418.526
1817	210780276	5.346.197.836	283.843.872	283.843.872
1818	210811444	30.517.128	539.632.888	30.517.128
1819	210879565	112.241.645	360.044.932	112.241.645
1820	210897716	8.408.370	2.567.838.374	8.408.370
1821	210905237	29.955.486	316.422.542	29.955.486
1822	210969192	1.000.000	14.350.513	1.000.000
1823	210990313	28.474.369	696.058.278	28.474.369
1824	211005392	1.012.683	3.219.557.531	1.012.683
1825	211005772	1.000.000	8.376.308	1.000.000
1826	211006879	132.921.782	12.095.528.341	132.921.782
1827	211006903	15.765.179	3.158.796	3.158.796
1828	211080940	1.000.000	2.463.510.862	1.000.000
1829	211163035	992.568.426	19.555.075.160	992.568.426
1830	211191085	88.102.996	962.120.255	88.102.996
1831	211196316	1.072.708	20.446.527.758	1.072.708
1832	211346671	122.221.365	80.103.009	80.103.009
1833	211465356	1.446.588	1.611.077.123	1.446.588
1834	211510870	348.377.785	1.107.023.927	348.377.785
1835	240970442	2.500.000	11.083.573	2.500.000
1836	241939750	1.200.000	22.119.346	1.200.000
1837	249512054	3.792.500	42.403.651	3.792.500
1838	258480227	1.300.000	2.413.351	1.300.000
1839	274748482	36.877.750	14.857.478	14.857.478
1840	311604634	13.325.400	3.208.573.036	13.325.400
1841	311624597	309.197.193	474.689.335	309.197.193
1842	311681292	5.013.472.356	571.919.672	571.919.672
1843	311938724	26.278.898	626.396.399	26.278.898

1844	311948160	109.059.565	1.048.448.383	109.059.565
1845	311974638	617.286.313	4.814.583.093	617.286.313
1846	311975320	1.200.000	412.421.031	1.200.000
1847	311983053	264.349.560	2.205.565.853	264.349.560
1848	312004773	1.671.053	836.407.247	1.671.053
1849	312015324	1.000.000	14.260.824.824	1.000.000
1850	312038763	1.500.000	1.000.000	1.000.000
1851	312040306	35.035.038	1.819.881	1.819.881
1852	312052160	73.194.501	221.600.000	73.194.501
1853	312268976	19.871.394	762.729.671.780	19.871.394
1854	312300734	742.291.315	35.527.354	35.527.354
1855	312320625	7.458.420	7.650.323.000	7.458.420
1856	312436140	2.875.416.677	491.139.607	491.139.307
1857	312524933	2.704.173	1.195.478.947	2.704.173
1858	312532674	175.781.816	897.169.571	175.781.816
1859	312552425	92.299.625	2.091.430.913	92.299.625
1860	312555410	30.214.109	2.069.897.154	30.214.109
1861	312659543	2.500.000	90.247.651	2.500.000
1862	312749443	160.701.036	181.010.679	160.701.036
1863	312775794	8.109.649	4.539.665.438	8.109.649
1864	312830201	22.875.100	6.771.979.000	22.875.103
1865	312838796	888.941.524	6.417.601.880	888.941.524
1866	312862253	108.260.379	959.445.569	108.260.379
1867	312918022	600.689.253	1.122.054.917	600.689.253
1868	312947906	3.700.000	12.550.178.148	3.700.000
1869	313204216	2.780.547	315.142.643	2.780.547
1870	313229874	1.200.000	584.109.999	1.200.000
1871	313346876	32.624.139	25.230.000	25.230.000
1872	313440661	30.966.000	5.377.759.935	30.966.000
1873	313493231	8.145.684	1.289.949.905	8.145.684
1874	313524100	139.109.826	763.806.396	139.109.826
1875	313526477	268.796.056	9.297.484.847	268.796.056
1876	313545535	188.353.779	989.416.309	188.353.779
1877	313556433	1.500.000	120.680.003	1.500.000
1878	313557803	1.000.000	116.045.454	1.000.000
1879	313624223	164.121.787	26.894.921.807	164.121.787
1880	313659443	322.525.988	1.411.664.600	322.525.988
1881	313706061	1.000.000	208.967.000	1.000.000
1882	313711988	106.625.260	126.365.598	106.625.260
1883	313920704	2.190.960	701.543.990	2.190.960
1884	313987612	334.676.494	128.075.261.197	334.676.494
1885	314141756	6.000.000	616.315.210	6.000.000
1886	314253810	154.494.698	102.858.353	102.858.353
1887	314281353	44.752.440	973.008.490	44.752.440
1888	314389396	63.569.081	565.373.759	63.569.081
1889	314409244	37.546.273	17.689.791.247	37.546.273
1890	314420522	5.132.742	4.516.013.603	5.132.742
1891	314449596	3.357.200	32.974.212	3.357.200
1892	314556354	12.368.581	165.808.250	12.368.581
1893	314612771	842.506.268	6.403.121.628	842.506.268
1894	314667716	72.636.434	2.025.000	2.025.000
1895	314755653	120.899.928	166.922.548.753	120.899.928
1896	314855362	284.148.028	2.984.603.489	284.148.028
1897	315014480	46.621.090	25.465.680	25.465.680
1898	315067520	1.000.000	659.270.373	1.000.000
1899	315200117	33.774.815	43.421.295	33.774.815
1900	315260687	2.828.484	33.699.097	2.828.484
1901	315263681	27.633.770	1.243.200.821	27.633.770
1902	315335540	124.719.998	764.550.184	124.719.998
1903	315652958	2.009.579	6.655.321.214	2.009.579
1904	315840470	1.200.000	499.649.793	1.200.000
1905	315905679	9.153.066	1.352.961.141	9.153.066
1906	315915108	1.955.635	1.262.542.060	1.955.635
1907	315958155	66.400.712	45.967.175.000	66.400.712
1908	316014273	29.402.333	72.262.882	29.402.333
1909	316177237	323.654.674	652.599.158	323.654.674

1910	316470343	60.000.000	127.354.153	50.000.000
1911	316604529	2.006.865	9.631.582	2.006.865
1912	316664358	2.852.500	98.895.007	2.852.500
1913	316731454	1.360.719	24.243.132	1.360.719
1914	316793553	200.000.000	168.657.622	168.657.622
1915	317133619	2.000.000	18.016.129.537	2.000.000
1916	317138857	5.453.810	567.018.177	5.453.810
1917	317238665	3.000.000	9.752.400	3.000.000
1918	317432193	1.000.000	62.437.011	1.000.000
1918	317496685	20.323.422	156.550.061	20.323.422
1920	317668978	1.000.000	2.686.363	1.000.000
1921	317813582	4.000.000	6.400.000	4.000.000
1922	317953826	163.328.488	346.619.352	163.328.488
1923	340025907	1.200.000	9.305.898	1.200.000
1924	349467282	7.595.359	25.125.754	7.595.359
1925	349707976	3.800.000	14.267.217	3.800.000
1926	355662526	1.200.000	2.558.507	1.200.000
1927	356519981	1.285.580	3.508.851	1.285.580
1928	360463863	1.200.000	2.495.907	1.200.000
1929	363643933	1.200.000	8.313.158	1.200.000
1930	445910763	1.200.000	3.704.190	1.200.000
1931	446562768	1.300.000	1.786.604	1.300.000
1932	456500214	1.300.000	4.771.995	1.300.000
1933	476323936	1.200.000	29.229.648	1.200.000
1934	483769717	3.600.000	6.723.455	3.600.000
1935	493799019	1.200.000	20.932.981	1.200.000
1936	540742723	1.200.000	1.280.339	1.200.000
1937	543605927	1.200.000	1.096.875	1.096.875
1938	591305289	1.200.000	8.005.458	1.200.000
1939	660415498	2.700.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
1940	664917026	4.290.000	32.000.000	4.290.000
1941	668416951	772.164.430	26.202.466.866	772.164.430
1942	675161855	1.200.000	3.036.343	1.200.000
1943	679813469	15.192.182	6.260.956	6.230.956
1944	693401580	2.213.037	1.617.997	1.617.997
1945	703544627	1.000.000	31.636.214	1.000.000
1946	705551984	1.000.000	807.947.177	1.000.000
1947	717905590	15.383.244	37.253.452	15.383.244
1948	721530202	2.000.000	93.219.090	2.000.000
1949	726189954	3.408.630	17.470.490	3.408.630
1950	727953358	1.000.000	167.282.842	1.000.000
1951	789043239	1.200.000	6.719.081	1.200.000
1952	893981282	2.400.000	3.674.179	2.400.000
Total		1.159.927.415.440	33.187.938.381.039	879.024.287.211

Rekapitulasi Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal							TOTAL
			Dianggarkan pada Belanja Barang		Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan				Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	1			2		3	4 = 1 + 2 + 3	
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002				703.603.485,00	Anggaran Belanja Modal digunakan untuk membiayai Belanja Barang		703.603.485,00	
2	Mahkamah Agung	005	643.684.560,00	Belanja menghasilkan Aset Tetap dianggarkan pada Belanja Barang		86.510.000,00	Belanja administrasi proyek direalisasikan untuk perjalanan dinas yg tidak berhubungan dengan proyek		730.094.560,00	
3	Kementerian Sekretariat Negara	007	43.970.889.242,00	1. Perolehan Aset Tetap dari realisasi Belanja Barang belum dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN Istana Cipanas 2. Kesalahan penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang yang direalisasikan untuk pemerolehan Aset Tetap pada Istana Kepresidenan Bogor Sebesar Rp552.016.000,00 3. Kesalahan penggunaan MAK Belanja Barang yang digunakan untuk pemerolehan Aset Tetap minimal sebesar Rp33.256.207.750,00 pada PPKK 4. Kesalahan penggunaan MAK Belanja Barang yang digunakan untuk pemerolehan Aset Tetap					43.970.889.242,00	

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal					
			Dianggarkan pada Belanja Barang		Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal	
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan
			1		2		3	4 = 1 + 2 + 3
				sebesar Rp9.697.215.000,00 pada KSP 5. Perolehan/pengembangan Aset Tetap dari realisasi Belanja Barang belum dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN Isana Jogja				
4	Kementerian Luar Negeri	011			45.375.000,00	Penambahan aset berupa maintenance software aplikasi SIMKEU yang menggunakan anggaran Belanja Modal		45.375.000,00
5	Kementerian Agama	025	1.500.378.300,00	Belanja Barang digunakan untuk belanja yang menghasilkan Aset Tetap				1.500.378.300,00
6	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	844.893.420,00	Anggaran dan realisasi Belanja Barang digunakan untuk memperoleh atau menambah nilai Aset Tetap sebesar Rp703.893.420,00 dan nilai Aset Tak Berwujud Rp145.000.000,00				844.893.420,00
7	Kementerian Pariwisata	040	455.732.491,00	Penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada STP Bandung tidak sesuai dengan substansi kegiatan sebenarnya				455.732.491,00
8	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042			11.988.596.000,00	Kegiatan pemeliharaan dan Belanja Barang untuk diserahkan ke masyarakat		11.988.596.000,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal						
			Dianggarkan pada Belanja Barang		Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
			1		2		3		4 = 1 + 2 + 3
9	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bptn	056	7.524.717.900,00						7.524.717.900,00
10	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	71.487.128,65	1. Pekerjaan atap galvanume, pembuatan gazebo, dan rehab kamar mandi direalisasikan sebagai Belanja Pemeliharaan (523111) 2. Pembayaran belanja barang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada UPT PPBH					71.487.128,65
11	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	068					492.283.000,00	Belanja Modal pertambahan nilai Gedung dan Bangunan pada Saker Sestama direalisasikan untuk pembelian Peralatan dan Mesin	492.283.000,00
12	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080			9.019.500,00	Anggaran Belanja Modal digurakan untuk membeli Aset Extrakomptable			9.019.500,00
13	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082	217.129.000,00	Realisasi Belanja Barang berupa pembelian Aset Tetap dimana seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal					217.129.000,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal						
			Dianggarkan pada Belanja Barang		Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
			1		2		3		4 = 1 + 2 + 3
14	Lembaga Administrasi Negara	086	34.495.419,00	Pembuatan kolam ikan dan papan informasi yang sifatnya menghasilkan Aset dianggarkan dalam Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Bahan					34.495.419,00
15	Asip Nasional Republik Indonesia	087	753.251.356,00	11 kegiatan yang dianggarkan pada Belanja Barang direalisasikan untuk perolehan dan pengembangan Aset senilai Rp753.251.356,00					753.251.356,00
16	Badan Kepegawalan Negara	088	414.706.230,00	Terdapat 5 kegiatan pengadaan Barang BMN dan pengembangan Aset yang dianggarkan dan Belanja Barang					414.706.230,00
17	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	11.631.764.000,00	Terdapat Belanja Barang berupa pengadaan sarana dan prasarana kantor (rehabilitasi kantor) yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal karena dapat memperpanjang manfaat Aset					11.631.764.000,00
18	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103			793.683.000,00	Kegiatan pembangunan dinding penahan tanah (Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan) dibelanjakan melalui Belanja Modal Tanah			793.683.000,00

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal						
			Dianggarkan pada Belanja Barang		Anggaran Belanja Modal Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Modal		Salah Penganggaran Antar Akun dalam Belanja Modal		TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
			1		2		3		4 = 1 + 2 + 3
19	Ombudsman Republik Indonesia	110	123.029.335,00	1. Belanja Pemeliharaan untuk menghasilkan Aset Tetap berupa tiang penyangga aset (Penambahan sudah dikoreksi) 2. Pembayaran dilakukan atas tunggakan tahun 2014 namun tidak dianggarkan sebagai utang					123.029.335,00
20	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	1.793.884.847,00	1. Kantor Pusat Rp1.445.579.000,00 2. RRI Jakarta Rp36.750.000,00 3. RRI Lhokseumawe Rp8.950.000,00 4. RRI Bandung Rp87.471.900,00 5. RRI Samarinda Rp215.133.947,00					1.793.884.847,00
21	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	118	105.000.000,00	Belanja barang untuk pembelian Aset Tetap			21.558.213.800,00		21.863.213.800,00
TOTAL			70.088.943.228,65		13.626.786.985,00		22.050.496.800,00		105.756.227.013,55

Rekapitulasi Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang Tahun 2016 pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
			1		2		3		4 = 1 + 2 + 3
1	Kejaksaan Republik Indonesia	006			2.624.004.458,00	Belanja yang dibelikan Belanja Modal sebesar Rp91.491.009,00 pada Kejari Kotamabagu dan Belanja penanganan perkara yang dipergunakan tidak sesuai peruntukan pada 14 Kejari sebesar Rp2.532.513.449,00.	25.920.000,00	Penganggaran Honor Kegiatan Pengelola PNBp pada Satker yang tidak mengelola PNBp	2.649.924.458,00
2	Kementerian Luar Negeri	011			490.866.543,00	1. Penantahan peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan MAK belanj modal namun direalisasikan dengan MAK belanja barang pada 6 perwakilan sebesar Rp214.580.048; dan 2. Terdapat pembelian peralatan dan mesin pada Pusdiklat yang seharusnya menggunakan MAK 53 namun direalisasikan dengan MAK 523 (pemeliharaan) sebesar Rp173.851.375			490.866.543,00
3	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	013	3.322.695.780,00	Fergadaan peralatan dan pengelolaan Sentra Industri Sapi untuk Lapas Industri berupa barang habis pakai dianggarkan					3.322.695.780,00

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang							Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Nilai temuan (Rp) 4 = 1 + 2 + 3
			Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang			
			1 Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	2 Nilai temuan (Rp)	Keterangan	3 Nilai temuan (Rp)	Keterangan		
			menggunakan akun Belanja Modal							
4	Kementerian Pertanian	018					23.145.710.995,00	Pemeriksaan secara uji perik atas kecepatan klasifikasi anggaran menunjukkan adanya kesalahan penganggaran belanja pada 11 satuan kerja Kementerian	23.145.710.995,00	
5	Kementerian Perhubungan	022			9.718.776.554,00	1 Dir. Angkutan Multi Moda Hubdat lebih saji sebesar Rp479.630.000,00 2 Dit. Lalu Lintas Hubdat lebih saji sebesar Rp2.291.850.000,00 3 Dit. Sarana Hubdat lebih saji sebesar Rp188.130.000 4 Disnav kelas II Semarang Hubla lebih saji sebesar Rp1.857.876.054 5 Disnav kelas II Sibolga Hubla lebih saji sebesar Rp675.957.700 6 Disnav kelas I Belawan Hubla lebih saji sebesar Rp3.888.071.800 7 UPBU kelas III Tunggul Wulung lebih saji sebesar Rp337.321.000			9.718.776.554,00	

Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang										
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Nilai temuan (Rp) 4 = 1 + 2 + 3	
			Nilai Temuan (Rp) 1	Keterangan	Nilai temuan (Rp) 2	Keterangan	Nilai temuan (Rp) 3	Keterangan		
6	Kementerian Agama	025						10.595.518.689,00	1. Realisasi belanja barang dengan substansi kegiatan yang menghasilkan Barang Persediaan namun cianggarkan dengan MAK Belanja Barang yang Tidak Menghasilkan Persediaan; 2. Realisasi belanja barang dengan substansi kegiatan yang tidak menghasilkan persediaan ramun cianggarkan MAK Belanja Persediaan; dan 3. Pengadaan belanja bantuan pembangunan dan rehab masjid pada Ditjen Bimas Islam dialokasikan pada MAK 621219	10.595.518.689,00
7	Kementerian Sosial	027			1.030.689.000,00	Pengeluaran yang tidak sesuai dengan sifat Belanja Barang, yaitu Belanja Barang Pemeliharaan yang direalisasikan untuk membiayai pekerjaan yang sifatnya menambah nilai		4.449.215.500,00	Kegiatan pengadaan belanja bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat namun menggunakan anggaran Belanja Non	5.479.904.500,00

Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)
			1		2		3		4 = 1 + 2 + 3
8	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042			23.878.286.065,75	Anggaran Belanja Barang Digunakan Untuk Kegiatan Non Belanja Barang pada Perguruan Tinggi Negeri dan Saiker di Lingkungan Kemennristekdikti			23.878.286.065,75
9	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	048					450.107.521,00	1. Realisas Anggaran Belanja Permeliharaan Gedung dan Bangunan tidak sesuai peruntukkan sebesar Rp238,29 juta (Gabung cengan temuan kurang volume pemeliharaan); dan 2. Pembayaran belanja barang persediaan barang konsumsi pada Kementerian PANRB digunakan untuk belanja bahan sebesar Rp210.173.521	450.107.521,00
10	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	055					1.794.528.700,00	Salah menganggarkan belanja barang yang menghasilkan persediaan menggunakan MAK 521211 dan MAK 521111	1.794.528.700,00

Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang										
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	4 = 1 + 2 + 3
11	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059					5.175.221.800,00	Menggunakan kelompok akun belanja barang non operasional (MAK 5212) dan belanja jasa (MAK 5221) yang seharusnya belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda (MAK 5263).	5.175.221.800,00	
12	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063					415.406.722,00	Terdapat penggunaan MAK Belanja Bahan (521211) Pada PPOMH yang direalisasikan untuk menghasilkan persediaan dan seharusnya menggunakan MAK (521811). Atas pembelian itu tidak diikuti sebagai persediaan Rp415.406.722,00	415.406.722,00	
13	Lembaga Keluhan Nasional	064			427.410.000,00	Kesalahan penentuan belanja barang sebesar Rp427.410.000,00 (belanja pemeliharaan untuk pembelian Belanja Modal)	0,00	Penyusunan anggaran atas honor pengajar dan penceramah pada kegiatan PPRA di Lemhannas RI belum memadai	427.410.000,00	
14	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	068			9.982.500,00	Belanja biaya peralatan dan mesin pada satker DKKDN perwakilan provinsi Sulawesi selatan direalisasikan untuk pembelian peralatan dan mesin			9.982.500,00	

Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang (Rp)
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
15	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074					2.650.779.221,00	Kesalahan pembebanan pada penggunaan akun 524119 (Perjalanan Dinas -axet Meeting Dalam Kota) yang di dalamnya merupakan perjalanan dinas biasa yang seharusnya menggunakan akun 524111.	2.650.779.221,00
16	Makamah Konstitusi RI	077			1.618.856.221,00		468.635.600,00		2.087.731.921,00
17	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079			463.264.900,00	Penggunaan belanja barang untuk aset tetap Puslit Rp198.000.000 penggunaan belanja barang untuk aset tetap pada puslit meteorologi Rp265.264.900	1.521.892.130,00	Belanja barang oprasional digunakan untuk belanja barang persediaan Rp20.320.000 (P-uslit Geoteknologi), Rp1.489.661.645 (Puslit Cseanografi), Rp 11.910.485 (BPI)	1.985.157.330,00
18	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080			996.257.948,00	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk membeli/menambah nilai Aset Tetap	361.769.000,00	Kesalahan klasifikasi belanja persediaan yang dianggarkan di belanja non persediaan (belanja bahan, barang, penambahan daya tahan tubuh) sehingga menimbulkan akun persediaan belum diregister yang harus dihilangkan dengan jurnal manual	1.358.066.948,00

Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Nilai temuan (Rp) 4 = 1 + 2 + 3
			Nilai Temuan (Rp) 1	Keterangan	Nilai temuan (Rp) 2	Keterangan	Nilai temuan (Rp) 3	Keterangan	
19	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	081					281.824.950,00	Belanja penambahan daya tahan tubuh (MAK 521113) yang digunakan untuk belanja obat-obatan, membiayai pengadaan bahan makanan/minuman yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional pegawai	281.824.950,00
20	Lembaga Administrasi Negara	086	6.650.000,00	Pengadaan tulisan dinding atau banner dikategorikan sebagai belanja modal. Koreksi aset telah dilakukan.					6.650.000,00
21	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089			103.230.000,00	Pekerjaan retab ruanan mengkurakan belanja barang			103.230.000,00
22	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Perindangan Tenaga Kerja Indonesia	104			168.916.746,00	Terdapat penambahan aset tetap beberapa pembelian alat rumah tangga, pengembangan bangunan gedung kantor permanen, pengadaan jalan dan amp; pengembangan gedung dan amp; bangunan dalam renovasi, yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan			168.916.746,00
23	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113			471.039.723,00	Realisasi belanja sebesar Rp471.039.723,00 tidak sesuai substansinya mengakibatkan kurang catat atas aset tetap yang			471.039.723,00

Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang Nilai temuan (Rp) 4 = 1 + 2 + 3
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
			1		2		3		
24	Badan Pengawas Pemilu	115			1.312.257.268,00	bersumber dari belanja dan penatausahaan aset tetap menjadi tidak tertib. Hal ini disebabkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) kurang cermat dalam merealisasikan belanja sesuai substansinya.	123.593.240,00	Anggaran belanja penelitian untuk digunakan belanja persediaan dalam mata anggaran 52 yang sama	1.435.050.500,00
25	Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia	115					28.555.000,00	Barang berupa pengadaan alat-alat listrik tahun anggaran 2016 menggunakan MAK 523133 seharusnya menggunakan MAK 52 yang sama	28.555.000,00
26	Badan Keamanan Laut	119	24.950.640.000,00	Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa Data (Monalisa) dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pengadaan monalisa ini merupakan kontrak sewa data yang	5.704.043.700,00	Anggaran pembelian Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) digunakan untuk pembayaran honor pegawai Bakamla sebesar Rp7.260.043.700,00. Uang Makan dan Insentif Bakamla sebesar Rp1.630.000.000,00, dan Pengadaan Mobil Operasional sebesar Rp806.000.000,00	79.537.884.150,00	BEM kegiatan operasi dianggarkan di Belanja Barang Non Operasional Lainnya. Sedangkan kegiatan operasi keamanan laut ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam menjaga kelancaran aktivitas di laut dan meminimalisir terjadinya bertuk pelanggaran hukum di	114.132.567.950,00

No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang						
			Dianggarkan pada Belanja Modal		Anggaran Belanja Barang Digunakan untuk Kegiatan Non Belanja Barang		Salah Penganggaran antar Akun dalam Belanja Barang		Jumlah Kesalahan Penganggaran Belanja Barang
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
			1		2		3		4 = 1 + 2 + 3
				meliputi akses terhadap sistem, sistem monitoring dan analisis maritim yang dikomersialkan sebagai Software As A Service (SAAS), yaitu aplikasi yang langsung siap digunakan secara online (web-based) dengan protokol https, melalui hak akses penggunaan dan tahunan dan opsi untuk dapat diperpanjang pada periode tahunan.				Sehingga penganggaran BBW kegiatan operasi di Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak tepat	
27	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120			47.899.000,00	Terdapat kesalahan barang modal pada belanja barang senilai Rp47.899.000,00			47.899.000,00
	TOTAL		28.279.935.780,00		53.065.560.625,75		131.025.764.218,00		212.372.310.524,75

Rekapitulasi Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No	Kementerian/Lembaga	BA	Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Bansos			
			Dianggarkan pada Belanja Barang	Keterangan	Anggaran Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk kegiatan non Belanja Bansos	Keterangan
			1		2	3 = 1+2
1	Kementerian Agama	025	133.700.000,00	Realisasi Belanja Barang untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang memenuhi karakteristik Belanja Bantuan Sosial		133.700.000,00
2	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042			31.899.450.000,00	Anggaran Sosial digunakan untuk kegiatan non Belanja Sosial pada Pengurusan Tinggi Negeri dan satker di lingkungan Kementerian Pendidikan
	TOTAL		133.700.000,00		31.899.450.000,00	31.833.150.000,00

Rekapitulasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak											
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran		Selain Kelebihan Pembayaran						TOTAL
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidakeesuaian spesifikasi teknis	Pemahaman harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda			
									Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6		
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	105.268.872,12						105.268.872,12		
2	Mahkamah Agung	005	1.834.135.155,92	1.147.368.441,37	1.764.760.000,00	287.362.640,00	4.901.878.710,00	857.014.134,66	10.792.519.141,96		
3	Kepolisian Republik Indonesia	006	114.161.914,56	132.222.800,00				26.472.327.478,66	26.718.712.193,22		
4	Kementerian Sekretariat Negara	007	324.766.021,00						324.766.021,00		
5	Kementerian Dalam Negeri	010	34.623.436,47	14.249.356,00		122.467.500,00		6.238.134,00	177.586.426,47		
6	Kementerian Luar Negeri	011	68.183.100,00						68.183.100,00		
7	Kementerian Pertahanan	012	13.173.944.356,81		69.995.100.000,00			22.482.986.076,00	105.652.030.434,81		

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran		Selain Kelebihan Pembayaran				
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6
8	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	1.724.484.157,72	144.264.117,47				4.656.342.244,19	6.565.080.519,38
9	Kementerian Keuangan	015	5.684.283.730,61	1.926.973.333,30	13.532.550.495,69			1.265.054.694,00	22.408.862.253,60
10	Kementerian Pertanian	016	471.854.879,14						471.854.879,14
11	Kementerian Perindustrian	019	416.247.562,20	198.336.030,00				614.562.014,00	1.229.145.576,20
12	Kementerian Perhubungan	022	30.505.286.030,65					18.652.844.475,79	49.158.130.506,44
13	Kementerian Pendidikan Nasional	023	125.014.042,14	345.674.200,00	166.332.110,14			344.434.263,57	982.254.615,85
14	Kementerian Kesehatan	024	3.095.629.803,44	1.128.973.346,50	563.276.731,00	1.194.579.963,27		3.573.457.601,57	14.582.116.500,78
15	Kementerian Agama	025	2.810.851.542,16					3.690.333.891,37	6.501.185.533,53
16	Kementerian Kerenagakerjaan	026	162.743.493,14						162.743.493,14

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran		Selain Kelebihan Pembayaran				
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKT JM atau Nilai Bank Garansi/SKT JM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6
17	Kementerian Sosial	027	169.909.501,11						169.909.501,11
18	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	304.712.533,72	233.657.278,00				233.657.278,00	732.027.188,72
19	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	3.292.643.908,00					203.187.547,00	3.495.841.455,00
20	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	28.725.739.034,73	35.549.074.659,43	13.931.590.372,57			32.950.572.504,33	111.155.978.571,06
21	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	034			110.784.320,00				110.784.320,00
22	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	036	27.704.666,66	4.646.900,00					32.351.566,66

Pemmasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak										
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran		Selain Kelebihan Pembayaran					
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL	
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6	
23	Kementerian Pariwisata	040	2.381.858.902,40						2.381.858.902,40	
24	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	37.500.000,00						37.500.000,00	
25	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	2.331.789.012,11		644.046.825,26	1.697.061.027,44		2.308.295.569,74	6.981.192.134,55	
26	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	044		9.043.546,93		138.712.552,95			177.756.099,88	
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	047	141.902.144,50						141.902.144,50	
28	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	048		14.144.386,21					14.144.386,21	

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran		Selain Kelebihan Pembayaran				
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksiaraan spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6
37	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	185.660.254,75	38.171.327,41				5.786.046,99	229.017.629,15
38	Lembaga Ketahanan Nasional	064		71.600.000,00					71.600.000,00
39	Badan Narkotika Nasional	066	79.077.453,68		97.000.000,00			560.324.063,13	736.341.531,81
40	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	068	71.285.377,00						71.285.377,00
41	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	075						34.641.346,26	34.641.346,26
42	Mahkamah Konstitusi RI	077	41.635.274,73						41.635.274,73
43	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	078	826.355.140,00	436.893.356,00					1.263.248.496,00

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran		Selain Kelebihan Pembayaran				
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume). Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume). Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6
44	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	228.117.733,33	75.314.012,13				107.275.500,00	410.707.245,46
45	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080				172.250.086,00		15.287.233,00	187.537.319,00
46	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082	229.146.998,20		32.992.868,90	55.689.850,00		145.347.765,44	463.177.482,54
47	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional/Big	083		1.962.099.005,33					1.962.099.005,33
48	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	16.426.403,00					38.201.050,00	54.628.259,00
49	Lembaga Administrasi Negara	086	35.808.663,00					23.077.016,00	58.885.679,00
50	Badan Kepegawaian Negara	088	309.595.845,33						309.595.849,33

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran			Selain Kelebihan Pembayaran			
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahaman harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikonakan denda	TOTAL	
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan						
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6
51	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	180.062.333,33					183.062.833,33	
52	Kementerian Perdagangan	030	638.116.050,49	653.018.117,51				414.077.285,08	1.705.611.463,18
53	Komisi Pemberantasan Korupsi	093	42.828.336,03		528.800.300,00			2.014.961.472,87	2.586.390.108,87
54	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103				61.625.000,00			61.625.000,00
55	Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	14.952.298,00		74.896.200,00				89.848.498,00
56	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)	105						605.858.937,00	605.858.937,00

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak										
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran			Selain Kelebihan Pembayaran				TOTAL
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain Kekurangan Volume) Sebutkan sebab terjadinya kelebihan pembayaran	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahaman harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda		
									Nilai temuan (Rp)	
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6	
57	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106						34.883.219,80	34.883.219,80	
58	Badan Sar Nasional	107	138.368.512,96						138.368.512,96	
59	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	155.454.747,92	460.393.906,00					616.424.653,92	
60	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	112	1.949.843.052,74					259.754.035,84	1.949.843.052,74	
61	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113						11.859.336,00	11.859.336,00	
62	Sekretariat Kabinet	114						20.515.000,00	20.515.000,00	

Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kelebihan Pembayaran			Selain Kelebihan Pembayaran			
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan volume)	Kelebihan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain (selain kekurangan volume)	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)
			1	2	3	4	5	6	7 = 1+2+3+4+5+6
63	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	19.451.073,24						19.451.073,24
64	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117					258.958.698,00		258.958.698,00
65	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	1.169.641.213,85		1.085.000.000,00			252.083.056,58	2.487.324.270,33
66	Kementerian Koordinator Kemanitman	120	894.146.029,00						894.146.829,00
TOTAL			119.201.163.477,32	54.760.565.328,97	102.526.729.273,46	4.163.324.932,66	11.336.181.421,34	136.386.389.677,35	428.374.344.111,10

Rincian Nilai dan Penjelasan Permasalahan Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak							
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran				
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Dipertanggungjawabkan
			1	2			3 = 1 + 2
							4
							5 = 3-4
							105.268.872,12
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	105.268.872,12				0,00
2	Mahkamah Agung	005	1.834.135.155,92	1.147.368.441,37	1. a. Kelebihan pembayaran honorarium panitia pengadaan dan PPHP Salkor BUA b. Kelebihan pembayaran honorarium pengelola anggaran PA Ambo c. Kelebihan pembayaran honorarium PPHP PN Padang Rp.13.546.500,00 2. Kelebihan pembayaran atas pembayaran yang tidak semestinya dan perhitungan analisa harga satu yang tidak sesuai dengan		2.681.503.597,29
							0,00
							2.681.503.597,29

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
Kelebihan pembayaran									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawabkan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3+4
					kondisi: sebenarnya Rp204.945.500,97 3. Kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan panel tegangan rendah Rp678.842.710,00 4. Kelebihan pembayaran biaya langsung personil sebesar Rp118.115.000,00 dan kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp131.918.730,40				
3	Kojaksanaan Rapublik Indonesia	006	114.161.914,56	102.222.000,00	Sisa uang muka yang masih berada di rekening atas pekerjaan perluasan gedung Kejen Slawi		246.384.714,56	0,00	246.384.714,56
4	Kementerian Sekretariat Negara	007	324.766.021,00				324.766.021,00	0,00	324.766.021,00

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
Kelebihan pembayaran									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawab akan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3-4
5	Kementerian Dalam Negeri	010	34.623.435,47	14.249.356,00			48.872.792,47	0,00	0,00
6	Kementerian Luar Negeri	011	68.183.100,00				68.183.100,00	0,00	68.183.100,00
7	Kementerian Pertahanan	012	13.173.944.358,81				13.173.944.358,81	0,00	13.173.944.358,81
8	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	013	1.724.484.157,72	144.284.117,47	Pembayaran ganda item pekerjaan dan pembayaran biaya pengiriman yang tidak terealisasi		1.868.748.275,19	0,00	1.868.748.275,19
9	Kementerian Keuangan	015	5.684.283.730,61	1.925.973.333,30	1. Jasa konsultan manajemen konstruksi perencanaan gedung Balai Diklat Keuangan Pontiak Rp255.164.088 2. Pekerjaan pembangunan gedung Asrama Diklat Pusdiklat Pajak Rp1.571.608.207, 3		7.611.257.063,91	0,00	7.611.257.063,91

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
Kelebihan pembayaran									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjaw abkan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3-4
10	Kementerian Pertanian	018	471.854.879,14				471.854.879,14	0,00	471.854.879,14
11	Kementerian Perindustrian	019	476.247.562,29	198.336.000,00	Subkontrak		614.583.562,29	0,00	614.583.562,29
12	Kementerian Perhubungan	022	30.505.286.033,85			Penyetoran	30.505.286.033,85	4.394.010.605,27	26.171.275.428,58
13	Kementerian Pendidikan Nasional	023	125.014.042,14	345.674.200,00			471.438.242,14	0,00	471.488.242,14
14	Kementerian Kesehatan	024	8.095.829.808,44	1.128.973.346,50	Subkontrak harga timbangan, harga satuang jasa konsultan, biaya personil dan kurang sektor jaminan pelaksanaan	Penyetoran	9.224.803.154,94	73.931.049,53	9.150.872.105,41
15	Kementerian Agama	025	2.810.851.642,16			Penyetoran	2.810.851.642,16	479.112.340,26	2.331.739.301,90
16	Kementerian Kotnagako ja an	026	162.743.493,14				162.743.493,14	14.974.312,85	147.769.180,19
17	Kementerian Sosial	027	169.909.601,11			Penyetoran	169.909.601,11	165.909.601,11	0,00

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
Kelebihan pembayaran									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bontuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawab abkan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3-4
18	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029	304.712.633,72	238.657.278,00	Denda keterlambatan dan belanja pengadaan tidak menggunakan e-purchasing	Penyetoran (SSBP)	543.369.911,72	543.369.911,72	0,00
19	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	3.292.643.908,00				3.292.643.908,00	0,00	3.292.643.908,00
20	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	28.725.735.034,73	35.549.074.659,43	1. Pertanggungjawaban personil dan non personil, Aset non-konstruksi tidak diserahkan (tidak dibeli), pekerjaan persiapan tidak dikerjakan, pembayaran keuntungan atas pekerjaan yang disubkontraktorkan, negosiasi pekerjaan baru tidak dilakukan sebesar Rp33.703.965,378,81		64.274.813.594,16	0,00	64.274.813.664,16

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak							
Kelebihan pembayaran							
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Rp
			1	2			3 = 1 + 2
					2. Penambahan volume pekerjaan atas harga satuan timbang sebesar Rp1.845.105,28 0,32		4
							5 = 3-4
21	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	27.704.666,66	4.646.300,00		Penyetoran	27.704.666,66
22	Kementerian Pariwisata	040	2.381.858.902,40			Penyetoran ke Kas Negara	1.181.606.402,40
23	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	37.500.000,00				0,00
24	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	2.331.789.012,11				0,00
							2.331.789.012,11
							4.646.900,00
							1.200.252.500,00
							37.500.000,00
							2.331.789.012,11

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
Kelebihan pembayaran									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawabkan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3+4
25	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	044		9.043.546,93			9.043.546,93	0,00	9.043.546,93
26	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	047	141.902.144,50				141.902.144,50	0,00	141.902.144,50
27	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Negera Dan Reformasi Birokrasi	048		14.144.386,21	Selisih harga timbang	Penyetoran ke Kas Negara	14.144.386,21	14.144.386,21	0,00
28	Lembaga Sandi Negara	051	1.610.808.903,16			Penyetoran	1.610.808.903,16	1.610.808.903,16	0,00
29	Badan Pusat Statistik	054	14.593.848,40	4.000.000,00	Jumlah hari pelaksanaan lebih cepat dari kontrak	Penyetoran	18.593.848,40	18.593.848,40	0,00
30	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN	066	9.854.420,00	505.554.402,00	Kelebihan indeks biaya benchmarking, fee tidak sesuai ketentuan	Penyetoran	515.408.802,00	858.000,00	514.550.882,00

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
Kelebihan pembayaran									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawabkan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3+4
31	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	893.255.335,50	1.476.468.305,13	Hasil perbandingan harga satuan kontrak awal, HPS, dan harga satuan untuk pekerjaan tambah pada addendum, terdapat harga satuan pekerjaan tambah lebih dari 110% dari harga satuan HPS (Harga Timbang)	Penyetoran	2.369.723.640,63	1.060.546.641,62	1.309.176.999,01
32	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	050	6.550.452.749,15	8.222.040.472,15		Penyetoran	14.813.301.221,30	3.694.335.739,18	10.918.965.482,12
33	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	185.660.254,75	38.171.327,41	Harga satuan timbang	Penyetoran	223.831.582,16	95.070.477,18	124.761.104,98
34	Lembaga Ketahanan Nasional	064		71.600.000,00	Jangka waktu kontrak tidak sesuai pelaksanaannya		71.600.000,00	0,00	0,00
35	Badan Narkotika Nasional	066	79.017.458,68				79.017.450,00	0,00	0,00

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran						
			Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawabkan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3+4
36	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	068	71.285.377,00			Penyetoran tanggal 12 April 2017	71.285.377,00	63.914.800,00	7.570.577,00
37	Mahkamah Konstitusi RI	077	41.635.274,73				41.635.274,73	0,00	41.635.274,73
38	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	078	826.355.140,00	436.893.356,00	Unsur harga timpang Rp343.591.983,00 dan selisih subkontrak Rp93.301.363,00	BA Perbankan Lansekap	1.263.248.496,00	177.371.311,00	1.085.877.185,00
39	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	228.117.733,33	75.314.012,13	Karena persentase penilaian hasil pekerjaan tidak tepat di Pusitrov		303.431.745,46	0,00	303.431.745,46
40	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082	229.146.998,20			Penyetoran	229.146.998,20	83.899.530,00	145.247.468,20
41	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional/Bkg	083		1.962.099.005,33	Kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil yang dibebankan tidak sesuai kontrak dan		1.962.099.005,33	0,00	0,00

Pemrosesan dalam pelaksanaan kontrak							
Kelebihan pembayaran							
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Subab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjaw abkan
			1	2			4
							5 = 3+4
42	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	035	16.426.403,00			Penyetoran	16.426.403,00
43	Lembaga Administras Negara	036	35.808.663,00				35.808.663,00
44	Badan Kepegawain Negara	038	309.595.849,33			Penyetoran	309.595.849,33
45	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	089	180.052.833,33			Pembangunan dan Penyetoran	180.052.833,33
46	Kementerian Perdagangan	090	638.116.050,49	653.018.117,61		Penyetoran	1.291.134.168,10
47	Komisi Pemberantasan Korupsi	093	42.628.336,00				0,00
							1.062.905.549,74
							0,00

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
Kelebihan pembayaran									
No	Kementerian/ Lembaga	DA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Sebab lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Telah Dipertanggungjawabkan	TOTAL
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
			1	2			3 = 1 + 2	4	5 = 3-4
48	Badan Nasional Penempatan dan Perincungan Tenaga Kerja Indonesia	104	14.952.298,00				14.952.298,00	0,00	14.952.298,00
49	Badan Sar Nasional	107	188.363.512,96			Penyetoran	188.363.512,96	188.363.512,96	0,00
50	Badan Pengembangannya Wilayah Suramadu	109	155.454.747,92	460.969.906,00	Kelebihan pembayaran biaya langsung personil dan biaya langsung non personil pekerjaan jasa konsultasi	Penyetoran ke Kas Negara	616.424.653,92	169.666.172,00	446.758.481,92
51	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	112	1.690.073.056,90			Penyetoran	1.690.073.056,90	934.379.043,44	855.700.013,46
52	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	19.451.079,24			Penyetoran ke Kas Negara NTPN A90F94DH9DA9019T tanggal 27 April 2017	19.451.079,24	19.451.079,24	0,00

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak							
Kelebihan pembayaran							
No	Kementerian/ Lembaga	BA	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain selain Kekurangan Volume	Keterangan (Selain lain selain kekurangan volume)	Bentuk Pertanggungjawaban	Total Nilai Temuan Kelebihan Pembayaran yang Dipertanggungjaw abkan
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)			TOTAL
			1	2			4
							5 = 3+4
53	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sebang	118	1.169.641.213,65			Penyetoran	163.616.654,00
54	Kementerian Koordinator Kerajinan	120	894.146.829,00				0,00
	TOTAL		119.201.153.477,32	54.760.565.328,37			15.993.766.358,31
							155.763.734.855,50

Rincian Nilai dan Penjelasan Permasalahan selain Kelebihan Pembayaran dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Modal Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak							Dentuk Pertanggung- jawaban (Penyetoran, SKTJM, dll)
			Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diketahui denda	TOTAL	Nilai yang telah dipertanggung- jawabkan	Nilai yang belum dipertanggung- jawabkan	
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp	
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	7 = 4+5	
1	Mahkamah Agung	005	1.764.760.000,00	267.362.640,00	4.901.878.710,00	857.014.194,66	7.811.015.544,66	0,00	7.811.015.544,66	
2	Kajaksan Republik Indonesia	006				26.472.327.476,66	26.472.327.476,66	0,00	26.472.327.476,66	
3	Kementerian Dalam Negeri	010		122.487.500,00		6.238.134,00	128.725.634,00	0,00	128.725.634,00	
4	Kementerian Pertahanan	012	66.965.100.000,00			22.482.986.076,00	92.478.086.076,00		92.478.086.076,00	
5	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	013				4.696.342.244,19	4.696.342.244,19	0,00	4.696.342.244,19	
6	Kementerian Keuangan	015	13.532.550.495,59			1.266.064.694,00	14.797.605.189,59	108.276.160,00	14.689.329.029,59	
7	Kementerian Perindustrian	019				614.562.014,00	614.562.014,00		614.562.014,00	
8	Kementerian Perhubungan	022				18.852.844.475,76	18.852.844.475,79	2.108.172.882,50	16.544.671.593,29	Penyetoran
9	Kementerian Pendidikan Nasional	023	166.332.110,14			344.434.263,57	510.766.373,71	0,00	510.766.373,71	

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak										
No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Pemahaman harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL	Nilai yang telah dipertanggung- jawabkan	Nilai yang belum dipertanggung- jawabkan	Bentuk Pertanggung- jawaban (Penyetoran, SKTJM, dll)
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	Rp 7 = 4-6	
10	Kementerian Kesehatan	024	563.275.781,00	1.194.579.963,27		3.579.457.601,57	5.357.313.345,84	17.760.000,00	5.339.533.345,84	Penyetoran dan penggantian barang
11	Kementerian Agama	025				3.690.333.891,37	3.690.333.891,37	221.049.870,00	3.469.284.021,37	
12	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	029				238.657.278,00	238.657.278,00	238.657.278,00	0,00	Penyetoran (SSBP)
13	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032				203.197.547,00	203.197.547,00	0,00	203.197.547,00	
14	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	13.930.590.372,57			32.950.572.504,32	46.881.162.876,90	0,00	46.881.162.876,90	
15	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	034	110.764.320,00				110.784.320,00	110.764.320,00	0,00	Entitas telah menindakanjuli dengan mengganti Barang yang sesuai dengan spesifikasi teknis
16	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	644.046.825,26	1.697.061.027,44		2.308.296.569,74	4.649.403.472,44	0,00	4.649.403.422,44	

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak										
No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Ketidaksiusuaian spesifikasi teknis	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL	Nilai yang telah dipertanggung- jawabkan	Nilai yang belum dipertanggung- jawabkan	Bentuk Pertanggung- jawaban (Penyetoran, SKTJM, dll)
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	Rp	Rp	
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)		7 = 4-6	
17	Kementerian Koperasi Dan Perdagangan Kecil Dan Menengah	044		155.712.552,95			155.712.552,95	0,00	155.712.552,95	SK Kesanggupan
18	Lembaga Sandi Negara	051				210.773.009,70	210.773.009,70	210.773.009,70	0,00	Penyetoran
19	Devar Karaharan Nasional	052				75.799.000,00	75.799.000,00	75.799.000,00	0,00	
20	Bacan Pusat Statistik	054				4.716.000,00	4.716.000,00	4.716.000,00	0,00	
21	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	055			1.910.200.000,00	344.910.000,00	2.261.116.000,00	0,00	2.261.116.000,00	
22	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn	056		100.981.215,00		2.977.195.272,00	3.078.176.487,00	195.449.645,00	2.882.726.841,00	Diperhitungkan dengan tagihan berikutnya
23	Perpuslakan Nasional Republik Indonesia	057				195.562.541,69	195.562.541,69	32.772.300,00	162.790.241,69	Penyetoran
24	Komunikasi Dan Informatika	059		43.616.400,00	4.518.102.711,34		4.561.718.111,34	0,00	4.561.718.111,34	

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak										
No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Ketidaksihutan spesifikasi teknis	Pemahaman harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikembalikan denda	TOTAL	Nilai yang telah diper tanggung- jawabkan	Nilai yang belum diper tanggung- jawabkan	Bentuk Pertanggung- jawaban (Penyetoran, SKTJM, dll)
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	Rp	Rp
25	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060				9.571.155.716,99	9.571.155.716,99	0,00	9.571.155.716,99	
26	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063				5.185.046,99	5.185.046,99	0,00	5.185.046,99	
27	Badan Narkotika Nasional	066	97.000.000,00			550.324.053,13	657.324.053,13		657.324.053,13	
28	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	075				34.641.346,26	34.641.346,26	34.641.346,26	0,00	Penyetoran
29	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079				107.275.500,00	107.275.500,00	0,00	107.275.500,00	
30	Dadar Tenaga Nuklir Nasional	080		173.260.086,00		18.287.233,00	187.537.319,00	0,00	187.537.319,00	
31	Lembaga Penerangan Dan Antarkasa Nasional	082	32.992.060,90	55.009.050,00		145.347.765,44	234.030.484,34	215.689.774,34	18.340.710,00	Penyetoran
32	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085				38.201.856,00	38.201.856,00	0,00	38.201.856,00	

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak										
No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Ketidaksiwaan spesifikasi teknis	Pemahaman harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL	Nilai yang telah dipertanggung- jawabkan	Nilai yang belum dipertanggung- jawabkan	Bentuk Pertanggung- jawaban (Penyetoran, SKTJM, dll)
			1	2	3	4	Nilai temuan (Rp) 5 = 1 + 2 + 3 + 4	Rp 6	Rp 7 = 4-6	
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	23.077.018,00 23.077.018,00	23.077.018,00	0,00	Penyetoran
33	Lembaga Administrasi Negara	086				23.077.018,00	23.077.018,00	23.077.018,00	0,00	
34	Kementerian Perdagangan	090				414.677.285,03	414.677.285,03	396.671.086,96	17.805.596,12	
35	Komis Pemberantasan Korupsi	093	528.800.300,00			2.014.961.472,87	2.543.761.772,87		2.543.761.772,87	
36	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103		61.625.000,00			61.625.000,00	0,00	61.625.000,00	
37	Badan Nasional Penelitian Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	74.896.200,00				74.896.200,00	0,00	74.896.200,00	
38	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (306)	105				605.858.937,00	605.858.937,00	0,00	605.858.937,00	

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak										
No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Ketidaksiusuaian spesifikasi teknis	Pemahaman barga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	TOTAL	Nilai yang telah dipertanggung- jawabkan	Nilai yang belum dipertanggung- jawabkan	Bentuk Pertanggung- jawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp	
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	7 = 4+6	
39	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106				34.883.219,80	34.883.219,80		34.883.219,80	
40	Badan Perusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bekas Batam	112				259.764.035,84	259.764.035,84	0,00	259.764.035,84	
41	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113				11.869.336,00	11.869.336,00	11.869.336,00	0,00	Penyeteroran
42	Sekretariat Kabinet	114				20.515.000,00	20.515.000,00		20.515.000,00	
43	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117		258.958.698,00			258.958.698,00	0,00	258.958.698,00	

Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak									
No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Ketidaksiwaan spesifikasi teknis	Penatalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikonakan denda	TOTAL	Nilai yang telah dipertanggung- jawabkan	Nilai yang belum dipertanggung- jawabkan
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	7 = 4-6
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
44	Badan Pengusahaan Kawasan pertambangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	138	1.065.600.000,00			252.083.056,88	1.317.683.056,88	0,00	1.317.683.056,88
TOTAL			102.526.729.273,46	4.163.324.932,66	11.356.181.421,34	136.386.389.677,35	254.412.625.304,81	4.006.379.927,76	250.406.245.377,05

Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran Atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	Kekurangan Volume Pekerjaan	Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Keberadaannya atau Kegiatannya (Fiktif)	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda	Total
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	191,192,500.00				191,192,500.00
2	Mahkamah Agung	005	187,041,664.13	116,307,021.00			303,648,685.13
3	Kejaksanaan Republik Indonesia	006	1,417,999,207.00	498,023,600.00			1,915,922,887.00
4	Kementerian Sekretariat Negara	007		204,311,572.00			204,311,572.00
5	Kementerian Dalam Negeri	010	7,112,997,583.37	247,012,663.84	5,312,523,214.82		12,672,536,462.03
6	Kementerian Luar Negeri	011	244,075,500.00		90,292,305.00		334,367,805.00
7	Kementerian Keuangan	015	105,221,459,426.00	14,155,621,568.00		9,493,132,326.40	126,870,213,320.40
8	Kementerian Pertanian	018	52,421,761,187.14	1,158,499,207.64		2,599,024,731.48	56,179,285,126.26
9	Kementerian Perindustrian	019	2,425,190,543.00			73,088,220.00	2,503,278,763.00
10	Kementerian Perhubungan	022	393,742,330.00				393,742,330.00
11	Kementerian Pendidikan Nasional	023	4,621,637,252.00	49,461,496.00		10,301,780.00	4,681,400,508.00
12	Kementerian Kesehatan	024	28,809,538,140.20			2,392,823,214.46	31,202,361,354.66
13	Kementerian Agama	025	3,656,900,645.64			394,146,660.00	4,051,047,295.64

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran Atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	Kekurangan Volume Pekerjaan	Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Keberadaannya atau Kejadiannya (Fiktif)	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikonakan Denda	Total
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4
14	Kementerian Ketenagakerjaan	020		48.209.201,66			48.209.201,66
15	Kementerian Sosial	027	2.253.732.951,80			22.557.312,00	2.276.284.263,80
16	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	512.325.232,64	55.492.742,76			967.817.975,40
17	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032	217.662.913.845,00			1.704.318.640,00	219.367.232.485,00
18	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	517.187.173,00				517.187.173,00
19	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	27.829.528,00	64.353.000,00	194.600.000,00	8.258.000,00	285.037.526,00
20	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	762.213.535,00				762.213.535,00
21	Kementerian Pariwisata	040		10.962.945.344,23			10.962.945.344,23
22	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	81.573.509,68				81.573.509,68
23	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042		943.031.652,22		309.810.385,34	1.342.842.037,56
24	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	388.653.769,00	573.816.005,06		1.850.632.744,00	2.812.802.518,06

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran Atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Kekurangan Volume Pekerjaan	Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Keberadaannya atau Kegiatannya (Fiktif)		Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikonfirmasi Denda		Total
			Nilai temuan (Rp)			Nilai temuan (Rp)		Nilai temuan (Rp)		
			1	2		3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4		
25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	89,377,520.00	117,491,229.00						206,868,749.00
26	Dewan Ketahanan Nasional	052	164,150,000.00							164,150,000.00
27	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	2,262,054,787.64			91,067,240.00		50,578,569.00		2,403,700,596.64
28	Perpuslakaan Nasional Republik Indonesia	057	48,030,000.00	62,181,314.23						110,211,314.23
29	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	29,716,353,279.62							29,716,353,279.62
30	Keolisian Negara Republik Indonesia	060						217,308,464.00		217,308,464.00
31	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	116,127,500.00							116,127,500.00
32	Badan Narkotika Nasional	066		210,472,798.00				38,857,939.00		249,330,737.00
33	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	1,718,786,136.55	2,621,358,201.11				634,438,902.88		4,974,583,240.54
34	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	1,591,362,999.00							1,591,362,999.00
35	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	428,162,512.00			725,664,274.00				1,153,826,786.00
36	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	60,950,000.00	1,265,795,505.08				182,869,441.04		1,509,615,950.12

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran Atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Kekurangan Volume Pekerjaan		Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Keberadaannya atau Kegiatannya (Fiktif)		Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda		Total
			Nilai temuan (Rp)	1	Nilai temuan (Rp)	2	Nilai temuan (Rp)	3	Nilai temuan (Rp)	4	
37	Komisi Pemilihan Umum	076	76,302,741.52								5 = 1 + 2 + 3 + 4 632,085,241.92
38	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079			7,710,000.00				5,975,807.00		13,685,807.00
39	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	365,545,034.00		25,616,250.00						391,161,284.00
40	Lembaga Administrasi Negara	086	52,942,000.00								52,942,000.00
41	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089			148,222,726.37						148,222,726.37
42	Kementerian Perdagangan	090	1,430,626,944.55								1,430,626,944.55
43	Komisi Pemberantasan Korupsi	093	10,400,000.00								10,400,000.00
44	Devan Perwakilan Daerah (DPRD)	095	456,565,993.00								456,565,993.00
45	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	17,922,500.00						141,835,149.95		159,557,649.95
46	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	22,335,000.00		53,868,573.00						76,203,573.00
47	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	15,039,000.00								15,039,000.00
48	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	159,178,500.00		1,370,791,313.55				29,761,354.00		1,559,731,167.55
49	Ombudsman Republik Indonesia	110	114,250,000.00								114,250,000.00

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran Atas Bahan Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	Kekurangan Volume Pekerjaan	Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Keberadaannya atau Kegiatannya (Fiktif)	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda	Total
			Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
			1	2	3	4	
50	Badan Nasional Pengcobaan Perbatasan	111	1,096,777,380.00	7,523,655.51			1,104,301,039.51
51	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	89,037,000.00	272,812,098.39		34,332,000.00	396,181,098.39
52	Sekretariat Kabinet	114	409,903,252.00			978,000.00	410,881,252.00
53	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	750,637,528.50	296,366,500.00		10,786,000.00	1,057,784,028.50
54	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	484,402,065.00	434,515,868.30	111,306,500.00		1,030,224,431.30
55	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	81,545,000.00		61,320,000.00		142,865,000.00
56	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	847,049,456.00				847,049,456.00
57	Badan Ekonomi Kreatif	121	2,709,247,500.00	519,977,404.00	1,988,038,100.00		5,227,263,004.00
	Total		474,795,067,930.38	36,492,506,816.95	8,574,814,633.82	20,300,503,660.55	540,162,893,041.70

Rincian Nilai dan Keterangan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah	Nilai yang belum	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
					dipertanggungjawabkan	dipertanggungjawabkan	
					Rp	Rp	
			1		2	3 = 1 - 2	
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	191,192,500.00	1. Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan dalam SKM Tahun 2016 terkait: batasan jumlah honor yang dapat dibayarkan untuk pejabat eselon I, II, dan III sebesar Rp91.757.500,00 2. Pembayaran uang saku rapat belum dipotong PPh sebesar Rp98.435.000,00			
2	Mahkamah Agung	005	187,041,664.13	1. Adanya kelebihan pembayaran honorarium Rp20.100.000,00; 2. Jang Saku RDK diberikan kepada pegawai yang sama pada tanggal yang sama untuk rapat yang berbeda dan diberikan kepada yang tidak bermak total Rp87.200.000,00; dan 3. Kelebihan pembayaran biaya penginapan, biaya pos, biaya pengadaan APAR, pengadaan obat sebesar Rp79.741.664.13			
3	Kejaksaan Republik Indonesia	006	1,477,399,287.00	1. Terdapat dua konsultan tidak memiliki sertifikat yang mendukung keahliannya sebesar Rp90.000.000,00 2. Kelebihan pembayaran belanja penanganan perkara di Jimpundun, Kelati Sulsei, Sulut, Kelai Gowa, Makassar, Takalar, Kendari, Banjarmasin, HSU, HST, Pekanbaru, Jakse, Jakbar, Jaktim, Jakut, Kotamabagu sebesar Rp1.327.899.287.00	0.00	1,417,899,287.00	
4	Kementerian Dalam Negeri	010	7,112,997,583.37		64,728,040.00	7,048,269,543.37	Penyeteran

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan				Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Rp 2	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Rp 3 = 1 - 2	
5	Kementerian Luar Negeri	011	1 244.075.500,00	1. Pembayaran honorarium pengajar Pegawai Aparatur Sipil Negara minimal untuk diklat Sesparlu dan DNDT tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam SBM sebesar Rp188.732.000 2. Kelbihan pembayaran atas pelaksanaan RDK sebesar Rp6.838.500 terdiri dari RDK bersamaan dengan embur Rp871.000 dan kurang dari tiga jam pada Dilje Protkons sebesar Rp4.967.500 3. Penggunaan BOK KBRI Zagreb tidak sesuai ketentuan, yaitu digunakan oleh bukan Kepala Perwakilan KUALI KBRI Zagreb sebesar USD3.750 Eq. Rp50.385.000 4. Pengadaan BMN di Pusdiklat Kemenlu tidak dilakukan melalui lelang terbuka namun melalui pengadaan barang langsung melalui PSK dengan nilai pengadaan tidak lebih dari Rp200.000.000 per paket pengadaan	2 4.967.500,00	3 = 1 - 2 239.108.000,00	Penyeteran

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan								
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
				Rp	Rp			
6	Kementerian Keuangan	015	105.221.459.426,00	1. Beasiswa LPDP Rp591.117.500 2. Pengadaan sewa komunikasi data intranet Rp43.781.735 3. Pekerjaan pemeliharaan Gamma-Ray Container Scanner Tipe Portal dan Mobile Vadis Rp40.318.630 4. Pekerjaan pemeliharaan mesin alat pemindai Ili-Co Scan Rp2.915.575.146. 5. an pemeliharaan mesin Trace Detector merk lonssar 500 DT Rp240.026.600 6. pengadaan suku cadang mesin MTU untuk Kapal Patroli Bea Cukai Rp416.200.000 7. Perhitungan Harga Satuan pada Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kabupaten Tahun 2016 dengan Metode "Send and Receive" Tidak Sesuai Ketentuan Rp48.379.059.135,00 8. Kelebihan pembayaran karena tidak sesuai spesifikasi Rp1.665.876.000 9. Penyusunan HPS oleh PPK Pengadaan Jasa Akomodasi Diklat Prajab Rp221.780.000,00 10. Kemahalan Item Pekerjaan Komunikasi Data Data Center (DC) KPDJP Sebesar Rp829.860.800,00 dan Kemahalan Sewa Komunikasi Data Intranet Dibanding TA 2015 Sebesar Rp49.983.863.880,00	2	0,00	105.221.459.426,00	
7	Kementerian Peranian	018	52.421.761.187,14	1. Pengadaan benih jagung dan padi tidak memiliki hasil uji mutu/ tidak diyakini sertifikasinya pada Prov. Sumisel dan Jambi Rp21.283.331.500- 2. Terdapat pemahalan harga pengadaan pupuk untuk kegiatan budidaya jenuh air komoditas kedelai pengadaan benih cabai untuk fasilitas kelompok penggerak pembangunan hortikultura. Rp828.086.538,52-		0,00	52.421.761.187,14	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan				Bentuk Pertanggungjawaban (Penyectoran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	
			1		Rp	Rp	3 = 1 - 2
				3. Indikasi kerugian atas pemahalan harga pengadaan benih jagung hibrida varietas NK 212 sebesar Rp261.000.000,00- 4. Terdapat indikasi kerugian negara atas penyalahgunaan dana kegiatan PUPM senilai Rp200.000.000,00- Indikasi kerugian negara dari pengadaan benih yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Rp682.933.620- 5. Pemborosan keuangan negara dari pengadaan penanaman hijauan pakan ternak, benih padi, kapur peranian, dan pupuk NPK pada empat satker. Rp515.336.344,64- 6. Indikasi kerugian negara atas kelebihan pembayaran pada belanja jasa konsultasi. Rp154.000.000- 7. Kelebihan pembayaran dari pekerjaan pengadaan ternak sapi, pengembangan dan penanaman tanaman pakan, dan pengadaan benihbibit bawang merah. Rp995.023.636,00- 8. Pembayaran biaya publikasi melalui agen lebih tinggi daripada rate biaya publikasi yang sehan.snya. Rp513.193.348,98- Pemborosan keuangan negara atas pengadaan sewa kendaraan roda 4 karena seharusnya dapat mengoptimalkan kendaraan roda 4 yang sudah ada. Rp781.590.000,00- 9. Penyediaan pakan konsentrat ruminansia di Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu/ Persyaratan Teknis Minimal sebesar Rp1.945.693.500,00,00- 10. Pemborosan keuangan Negara dari Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yaitu biaya untuk pembuatan irigasi digunakan untuk			

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah	Nilai yang belum	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
					dipertanggungjawabkan	dipertanggungjawabkan	
			1		Rp 2	Rp 3 = 1 - 2	
				memhajak sawah. Rp22.763.149.140,00- 11. Indikasi kerugian atas kelebihan pembayaran pada belanja jasa konsultasi yaitu SPJ tidak sesuai RAB, dan kesalahan perhitungan PPN. Rp125.751.059,00- 12 Indikasi kerugian Negara dari Pembayaran Honorarium Namsumber Pada Biro Keuangan dan Perencanaan Rp1.271.457.500,00			
8	Kementerian Perindustrian	019	2.425.190.543,00	1. Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa senilai Rp906,13 juta. Rp906,18 juta 2. Pembayaran kegiatan senilai Rp1.519 juta belum sesuai ketentuan SRM tahun anggaran 2016	10.060.050,00	2.415.130.493,00	Penyeteran
9	Kementerian Perhubungan	022	393.742.330,00	Terdapat pekerjaan yang terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp393.742.330,00 pada sakter Direktorat sarana perhubungan darat di lingkungan dijen perhubungan darat, yaitu pekerjaan pengadaan blangko SUT dan SRUT			
10	Kementerian Pendidikan Nasional	023	4.621.637.252,00	1. Kelebihan pembayaran belanja barang pada Diijen Paud dan Dikmas, BPP Bahasa, Diijen Kebudayaan Diijen GTK; 2. Pembayaran kegiatan yang tidak diatur dalam standar pada BPP Bahasa, Diijen Kebudayaan, Diijen GTK	0,00	4.621.637.252,00	
11	Kementerian Kesehatan	024	28.809.538.140,20	1. Pengeluaran uang satu rapat dalam kantor pada Sediljen Yankes tidak sesuai ketentuan sebesar Rp245.100.000,00b. Pengeluaran uang transportasi kepada pegawai RSJPD Harapan Kita tidak sesuai ketentuan sebesar Rp239.400.000,002. 2. Pemahaman harga pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Setjen Kemenkes atas pengadaan barang dan jasa untuk penerbitan SIR senilai	22.253.310,00	28.787.284.830,20	Setoran sebesar* Rp22.253.310,00 tanggal 14 Maret 2017 NTPN BC51F34JULCS10LH

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan				Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Rp 2	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Rp 3 = 1 - 2	
			1	Rp413.000.000.000b. Pemahalan harga pada RSJP H. Adam Malik atas pengadaan obat dan BMHP senilai Rp3.869.228.761,72 3. Pemahalan harga pada Dit. Penakles dan PKRT atas penyelenggaraan KHN senilai Rp238.030.000.000d. Balai Besar dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VPP) Salatiga senilai Rp22.253.310.003 4. Pemahalan harga pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Sellen Kemenkes atas pengadaan barang dan jasa untuk penerbitan STR senilai Rp413.000.000.000b. Pemahalan harga pada RSJP H. Adam Malik atas pengadaan obat dan BMHP senilai Rp3.869.228.761,72 5. Pemahalan harga pada Dit. Penakles dan PKRT atas penyelenggaraan KHN senilai Rp238.030.000.000d. Balai Besar dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VPP) Salatiga senilai Rp22.253.310.00 6. Kemahalan pengadaan obat dan BMHP pada RSUP Faimawati sebesar Rp1.910.204.234.480. Kemahalan harga atas pengadaan ADS Tahun 2016 pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp21.441.581.834,00Sehingga terjadi pemborosan senilai Rp23.351.079.068,48			
12	Kementerian Agama	025	3.656.903.645,64	1. Kelebihan Pembayaran Honorarium, Uang Saku, Uang Harian dan Uang Transport Pada Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp2.293.604.911,67 2. Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa (realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak atas belanja 52) sebesar Rp1.363.295.733,97	319.329.000,00	3.337.571.645,64	Penyeteroran

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan										
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)	
					Rp	2	Rp	3 = 1 - 2		
13	Kementerian Sosial	027	2.253.732.937,80	1. Terdapat double pembayaran atas pengadaan family kit sebesar Rp314.767.981,00 2. Kelebihan pembayaran atas imbal jasa kepada PT POS sebesar Rp1.766.721.406,00 3. Keuntungan yang tidak berhak diperoleh Rp172.243.504,0		0,00	2.253.732.937,80			
14	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kerutanan	029	912.325.232,64	Pembayaran Belanja Barang tidak sesuai dengan ketentuan		912.325.232,64	0,00		Penyeteran SSBP	
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	217.062.913.845,00	1. Keluluan Pembayaran atas Paket meeting 2. Keluluan pembayaran pada belanja jasa konsultasi 3. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan sertifikasi kapal perikanan 4. Pembayaran pembangunan kapal		0,00	217.062.913.845,00			
16	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	517.187.173,00	Kelebihan pembayaran atas biaya personil dan non personil atas 14 paket jasa konsultan pada lima satuan kerja		0,00	517.187.173,00			
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	27.829.526,00	Ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan cetakan buku FODR		27.829.526,00	0,00		Penyeteran ke Kas Negara	
18	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	762.213.535,00	1. Pembayaran ganda sebesar Rp3.165.250,00 dan kelebihan pembayaran Uang transportasi peserta senilai Rp3.320.000,00, serta pembayaran sewa mobil melebihi standar sebesar Rp5.100.000,00 2. Bukti pertanggungjawab sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola sebesar Rp77.753.885,00 3. Kelebihan pembayaran atas pengeluaran yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp19.330.200,00 4. Kelebihan pembayaran honorarium Asisten Peneliti dan Pengolah Data yang		0,00	762.213.535,00			

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
					Rp	Rp	
			1	melebihi GDM sebesar Rp106.874.000,00 5. Terdapat pembayaran kepada tenaga ahli yang namanya tidak terdapat dalam surat perintah sebesar Rp14.535.000,00. 6. Pembayaran uang saku, uang makan dan uang snack tidak sesuai ketentuan sebesar Rp99.792.000,00 7. Kelebihan Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Penerapan Nilai-nilai Revolusi Mental Melalui Kegiatan Festival Budaya di Kalimantan Sebesar Rp19.330.200,00 9. Pembayaran Honorarium Peneliti dan Asisten Peneliti Dalam Kegiatan Swakelola Penyusunan Indeks Revolusi Mental dan Kajian Perubahan Budaya Institusi Pemerintahan Sebagai Bagian dari GNRM Tahun 2016 Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan	2	3 = 1 - 2	
19	Kementerian Dadan Usaha Milik Negara	041	81.573.509,68	1. Kelebihan pembayar atas kesalahan penetapan tarif BPJS Rp38.879.400,00 2. Kesalahan perhitungan harga satuan biaya personil Rp42.694.109,68 3. Pembayaran jaminan pensiun tidak berdasarkan kontrak	0,00	81.573.509,68	
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	388.653.769,00	1. Proses pengadaan tidak sesuai perpres no. 54 tahun 2010 2. Kelebihan pembayaran pajak jasa konsultasi karena SPK memperhitungkan Pajak penghasilan sebesar Rp24.132.714,00	196.112.714,00	192.541.055,00	Penyeteroran ke Kas Negara Rp167.462.714,00 dan bukti penggunaan untuk pengeluaran non anggaran Rp28.650.000,00
21	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	89.317.620,00	1. Terdapat selisihkelebihan pembayaran atas belanja non personil sebesar Rp21.560.670 2. Kemahalan harga pekerjaan pemasangan Adventorial Top 59 inovasi	21.560.670,00	67.756.950,00	Penyeteroran ke kas Negara

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan				Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Rp 2	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Rp 3 = 1 - 2	
			1				
22	Dewan Keluhan Nasional	052	164,150,000.00	pelayanan publik Tahun 2016 di Surat Kabar Nasional sebesar Rp67.756.950 Terdapat kelebihan atas pembayaran uang rapat yang tidak didukung bukti kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp164.150.000	164,150,000.00		
23	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	2,262,054,787.64	1. Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.220.662.687,64 2. Kelebihan pembayaran sebesar Rp23.668.250,00 3. Kelebihan pembayaran sebesar Rp110.779.350,00 4. Kelebihan pembayaran sebesar Rp741.500,00	39,375,605.00	2,222,679,182.64	Penyeteran
24	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	48,030,000.00	Kelebihan pembayaran atas biaya transportasi lokal berupa sewa kendaraan roda 4 yang tidak sesuai dengan standar biaya	48,030,000.00	0.00	Penyeteran
25	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	25,716,353,279.62	Kerugian negara jasa Akses Internet senilai Rp29,716,353,279,62 atas pembayaran transisi layanan akses internet yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan atas downtime=100%	0.00	0.00	
26	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	116,127,500.00	Pada BBPCM di Yogyakarta dan Balai POM di Batam terdapat hasil pengadaan reagen yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak 2 kekurangan volume pekerjaan	0.00	116,127,500.00	
27	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	1,718,786,136.55	1. Bantuan pengembangan KAKAO paket 1.2 dan 3 Tahun Anggaran 2016 untuk pengiriman dan penanaman tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak oleh pihak penyedia sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara sebesar Rp1.636.932.727,27 - 2. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada DiJin PKP minimal sebesar Rp33.980.000,00.- 3. Kelebihan bayar pekerjaan pembangunan Dueker Pila: UPT Arango,		1,718,786,136.55	

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyetoran, SKTJM, dll)
					Rp 2	Rp 3 = 1 - 2	
			1	Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp6.175.020,30.- 4. Kelebihan bayar pekerjaan pembangunan saluran samping jalan (Segmen 1) UPT Arongo, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp3.753.480,83.- Kelebihan bayar pekerjaan pembangunan saluran samping jalan (Segmen 2) UPT Arongo, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp3.659.041,95.- Kelebihan bayar pekerjaan pembangunan saluran samping jalan (Segmen 3) UPT Arongo, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp5.173.058,65.- Kelebihan bayar pekerjaan pembangunan talud penahan tebing (Segmen 2) UPT Arongo, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp4.358.445,61.- Kelebihan bayar pekerjaan pembangunan talud penahan tebing (Segmen 4) UPT Arongo, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp12.602.397,63.- Kelebihan bayar pekerjaan pembangunan talud penahan tebing (Segmen 5) UPT Arongo, Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp12.152.275,31			
28	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	1,591,362,596.00	1. Kelebihan pembayaran atas belanja barang kegiatan Advokasi dan KIF Rp863.089,686 2. Realisasi pembayaran honorarium melebihi SBM sebesar Rp27.213.500,00 3. Kelebihan pembayaran kegiatan GerRe Cenia dan Integrasi Kampung KB yang tidak sesuai pekerjaan sebesar Rp77.200.000,00 4. Kelebihan pembayaran atas kegiatan KIE Kreatif sebesar Rp623.859.813,00	14,245,500.00	1,577,117,499.00	Penyetoran

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan				Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Rp 2	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Rp 3 = 1 - 2	
29	Komis: Nasional Hak Asasi Manusia	074	428,162,512.00	1. Kelebihan pembayaran transaksi biaya pelatihan sebesar Rp149.014.537 2. kelebihan pembayaran pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp172.363.000.00. 3. Terdapat pembayaran luaran keanggotaan Komnas HAM pada Organisasi Internasional yang belum ada dasar hukumnya dalam bentuk Keppres dan belum mendapat persetujuan dari Departemen Luar Negeri sebesar Rp105.784.975	0.00	428,162 512.00	
30	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	60,950,000.00	Honor Pokja melebihi ketentuan	60,950,000.00	0.00	Penyeteran
31	Komis Pemilihan Umum	076	76,302,741.92	1. Pembayaran Honorarium Tim Pokja di Sembilan KPU Kabupaten/Kota dan satu KPU Provinsi Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp66.085.000 2. Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Sewa Layanan Virtual Private Network (VPN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2019 senilai Rp10.217.741,92	32,385,000.00	598,680 241.92	Penyeteran untuk kelebihan pembayaran pokja di Provinsi Banten Rp32 295.000,00
32	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	355,545,034.00	1. Kelebihan pembayaran atas realisasi pembayaran uang lembur 2. Kelebihan pembayaran gaji pokok dan THR serta DPUG Kesehatan untuk tenaga outsourcing pada satker BTH sebesar Rp25.243.945 3. Kelebihan pembayaran pengadaan jasa pengemudi serta jasa clearing service godung dan taman halaman pada satker selama sebesar Rp277.995.464	0.00	365,545 034.00	
33	Lembaga Administrasi Negara	086	52,942,000.00	1. Pembayaran atas honor' widyarswara tidak sesuai dengan ketentuan pemberian honor atas kelebihan jam mengajar 2. LAIN membayar upah tenaga kebersihan tidak sesuai upah minimum provinsi	14,870,000.00	38,072 000.00	

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
					Rp	Rp	
					1	2	
34	Kementerian Perdagangan	060	1.430.826.944,55	(UMP) Aceh Tahun 2016 dan tidak menanggung iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang menjadi kewajibannya 3. Pemborosan keuangan negara dikarenakan : 1. Pengadaan toga dan seragam pegawai kontrak Rp6.552.000,00 2. Pembayaran Tim Sekretariat Rp29.120.000,00 dengan SK KPA 3. STIA LAN Jakarta dibebankan biaya CMS Rp2.400.000,00 Realisasi BLP senilai Rp837.000.000,00 dan Rp593.826.944,55 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya	54.500.000,00	1.376.326.944,55	
35	Komis Pemberantasan Korupsi	063	10.400.000,00	Kelebihan Pembayaran kegiatan rekam sidang		10.400.000,00	
36	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	065	456.565.993,00	1. Pembayaran honorarium penanggungjawab keuangan dan honorarium pejabat/pegawai/staf ahli dan tenaga perbantuan DPD tidak sesuai kelantuan sebesar Rp93,29 juta 2. Pembayaran uang RDK minimal sebesar Rp96,24 juta pada DPD tidak sesuai ketentuan 3. Realisasi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor melebihi SBM sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp123,60 juta 4. Kelebihan pembayaran jasa pengamaran acidaya (outsourcing) Sekretariat Jenderal DPD TA 2016 sebesar Rp23,66 juta 5. Kelebihan pembayaran sewa kendaraan operasional kantor DPD di ibukota provinsi sebesar Rp116,76 juta	19.482.000,00	437.083.993,00	Penyeteran

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
					Rp	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Rp	
			1		2	3 = 1 - 2	
37	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	17,922,500.00	1. Realisasi belanja barang untuk kegiatan pemeriksaan kas (cash opname) BP dan BPP memboroskan keuangan negara 2. Terdapat pembayaran honorarium yang melebihi SBM Tahun 2016 sebesar Rp17.922.500	0.00	17,922,500.00	
38	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	22,335,000.00	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada lima satker melebihi SBM TA	22,335,000.00		Penyeteran
39	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	15,039,000.00	kelebihan pembayaran honor narasumber Rp2.800.000,00 dan kelebihan pembayaran kegiatan konsinyering sebesar Rp12.239.000,00	0.00	15,039,000.00	
40	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	159.178,500.00		56,055,000.00	93,123,500.00	Penyeteran ke kas negara
41	Ombudsman Republik Indonesia	110	114.250.000.00	nilai kontrak/SPK tidak sesuai dengan hasil konfirmasi dengan pemilik rumah	0.00	114,250,000.00	
42	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	1,096,777,980.00	1. Pembayaran harga BLP teraga ahli melebihi ketentuan maksimal dan jangka waktu pelaksanaan. Rp753.012.500 2. Kelebihan pembayaran uang saku, uang transportasi, uang honorarium jasa profesi RDK dan luar kantor. Rp36.264.500 dan Rp178.990.000 3. Pemahalan harga pada kegiatan pemeliharaan gedung kantor pusat BNPP Rp54.624.780 4. Bukti pertanggungjawaban belanja bahan tidak sah Rp62.886.200	116,439,300.00	980,338,680.00	Penyeteran
43	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	89,037,000.00	Pembayaran honorarium tidak mengacu pada standar pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh KPA	0.00	89,037,000.00	
44	Sekretariat Kabinet	114	409,903,252.00	Kelebihan pembayaran biaya instalansi sebesar Rp48.000.000,00, uang saku RDK sebesar Rp12.700.000, Biaya langsung personel Rp349.203.252,00	0.00	409,903,252.00	

Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah	Nilai yang belum	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
					dipertanggungjawabkan	dipertanggungjawabkan	
					Rp	Rp	
		1			2	3 = 1 - 2	
45	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	750.637.528,50	1. Pembayaran untuk kegiatan diluar SPK Rp2.867.090,00 2. Pekerjaan manual book melebihi nilai wajar Rp22.043.914 3. Penerbitan majalah lideer melebihi nilai wajar Rp121.000.000,00 4. Terdapat pemahalan harga pada pekerjaan pengadaan souvenir ABU GA sebesar Rp58.960.000,00 5. Branding kegiatan tenda publik Rp12.650.000,00 6. E-katalog melebihi nilai wajar seharusnya Rp162.514.912,20 7. Pembelian pelumas Rp18.385.305,00 8. Perawatan kantor Rp46.543.300,00 9. Pembayaran transport tim kreatif operasional siaran pro 1, 2, 4 RRI Jakarta tidak sesuai ketentuan sebesar Rp132.100.000,00 10. Kenguan negara atas pekerjaan pembelian radio untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp188.773.100,00 dan Rp8.503.000,00	222.027.548,48	528.609.980,02	Penyeteran ke Kas Negara
46	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	484.402.065,00	belanja pemeliharaan kendaraan per jenis kendaraan per tahun melebihi Standar Biaya Masukan (SRM) Tahun 2016	0,00	484.402.065,00	
47	Radian Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	81.545.000,00	Pembayaran honorarium tidak mengacu pada standar pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh KPA dan pembayaran biaya konsumsi yang melebihi SRM	41.491.000,00	40.054.000,00	Penyeteran
48	Kementerian Koordinator Kemantiman	120	947.049.456,00	1. Pencairan SP2D atas perhitungan tagihan yang dibayarkan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawab yang dilampirkan, tidak sesuai dengan SRM, dan tanpa dasar pembayaran Rp705.467.265,00 2. Kesalahan pembabaran Rp136.408.917,00 3. Terdapat realisasi pembayaran belanja pemeliharaan sebesar	6.500.000,00	940.549.456,00	Penyeteran

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan				Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	
					Rp 2	Rp 3 = 1 - 2	
			1	Rp105.173.274,00 yang tidak sesuai SBM TA 2016			
49	Badan Ekonomi Kreatif	121	2,709,247,500.00	1. Kelolaan pembayaran atas pekerjaan pendudukan Indonesia Centemporary Art and design pada deputi pemasaan minimal sebesar Rp58,190,000,00 2. kelebihan perhitungan jam pemberian honor narasumber sebesar Rp80.412.500,00 3. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pertanggungjawaban belanja barang paket fullboard meeting dalam dan luar kota diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp354.940.000,00 4. Penetapan dan pembayaran honorarium tenaga ahli atau tenaga pendukung teknis tanpa dasar yang memadai- pembayaran uang saku RDK diluar jam kerja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp40.735.000,00- 5. Pembayaran belanja barang pada deputi akses permodalan untuk pengadaan langsung kegiatan yang tidak didukung bukti valid dan lengkap sebesar Rp1.742.010.000,00			
	TOTAL		474,795,067,930.38		2,502,011,996.12	439,851,261,160.51	

Rincian Nilai dan Keterangan atas Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan volume pekerjaan					Bentuk Pertanggungjawa ban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan		
					Rp 2	Rp 3 = 1 - 2		
1	Mahkamah Agung	005	116,507,021.00	Kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung				
2	Kejaksaan Republik Indonesia	006	490,023,500.00	1. Terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan sewa link monitoring center atas item pekerjaan sewa link ethernet dan e1 pada PT Ditel dan PT STI sebesar Rp428,292,000.00 2. Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas perawatan cctv dan audiovideo, pemeliharaan instalasi/control telepon dan pemeliharaan elevator (lift) serta biaya service dan suku cadang elevator	0.00	490,023,800.00		
3	Kementerian Sekretariat Negara	007	204,911,372.00	1. Kurang volume atas pekerjaan overlay jalan di Satker BLU PPKK sebesar Rp155,662,192.00 2. Kurang volume sebesar Rp24,734,919.00 merupakan pembangunan rumah mantan Wapres 3. Kurang volume sebesar Rp24,614,461.00 merupakan perbaikan kolam dinding granit di Menara RJA Lembaga Tinggi Negara Kemayoran				
4	Kementerian Dalam Negeri	010	247,012,663.84		10,236,493.00	236,776,170.84	Penyeteroran	
5	Kementerian Keuangan	015	14,155,621,568.00		0.00	14,155,621,568.00		
6	Kementerian Pertanian	018	1,158,499,207.64	1. Kekurangan volume pekerjaan bejana barang pada 7 satker. 2. Terdapat alisnial power thresher multiguna yang belum diserahkan oleh rekanan sebanyak 45 unit.	0.00	1,158,499,207.64		
7	Kementerian Pendidikan Nasional	023	49,461,496.00	Kekurangan volume pada 2 satker	0.00	49,461,496.00		
8	Kementerian Ketenagakerjaan	026	48,209,201.66		2,424,000.00	45,785,201.66		
9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	55,482,742.76	Belanja barang berupa pemeliharaan gedung yang kurang volume pekerjaan	55,492,742.76	0.00		

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan volume pekerjaan					Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Rp	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Rp		
1	2	3 = 1 - 2						
10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	64,350,000.00	Kekurangan buku EODB	64,350,000.00	0.00	Buku telah dilengkapi	
11	Kementerian Pariwisata	040	10,962,945,344.23	1. Kelebihan pembayaran realisasi jasa lainnya sebesar Rp7,31M 2. Realisasi belanja jasa konsultasi sebesar Rp3,42M 3. Kekurangan volume pekerjaan belanja pemeliharaan sebesar Rp130,04 juta 4. Kelebihan pembayaran paket pembelian souvenir promosi sebesar Rp82,10 juta	6,711,715,743.23	4,251,229,601.00	Penyeteroran ke Kas Negara	
12	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	943,031,952.22	Fada 25 Galter	0.00	943,031,952.22		
13	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	573,616,005.06	Sudah dikoreksi ke Nilai Persediaan sebesar Rp525,816,311	552,066,311.00	21,549,694.06	Sudah dikoreksi ke Nilai Persediaan sebesar Rp525,816,311. Sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp26,250,000.00. Rekanan sudah menunjukkan barang tersebut ada di gudang.	
14	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	117,491,229.00	Terdapat selisih kurang volume pekerjaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp17,49 juta	30,000,000.00	87,491,229.00	Penyeteroran ke kas negara	
15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	62,161,314.23		62,161,314.23	0.00	Penyeteroran	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan volume pekerjaan					Bentuk Pertanggungjawa- ban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Rp	
					Rp	Rp		
16	Badan Narkotika Nasional	066	1 210.472.798,00	1. Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung dan Halaman Balai Besar Rehabilitasi BNN Dilaksanakan Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp31,65 juta 2. Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung dan Halaman Loka Rehabilitasi Batam Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp14,09 juta 3. Pembayaran Catering Residen Balai Rehabilitasi Baddaka Tidak Sesuai Kontrak dan Terdapat Kelebihan Pembayaran sebesar Rp40,37 juta 4. Pengadaan obat pada Loka Kallianca Lampung dan Lubuk Pakam Sumut oleh PT Berkat Mulia Sejahtera tidak sesuai volume kontrak sebesar Rp124 juta. Kekurangan Volume atas Pekerjaan atas 30 pekerjaan	2 0,00	3 = 1 - 2 210.472.798,00		
17	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	2.621.358.201,11	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Radar	82.748.419,96	2.538.609,78,15	Penyeteroran ke Kas Negara	
18	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	074 075	1.265.796.509,00	Kekurangan barang pemeliharaan Radar Cuaca EEC	1.265.796.509,00	0,00	Penyeteroran	
19	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	7.710.000,00	1. Kekurangan alat dan kekurangan pembayaran asuransi (oseanografi) dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp4.710.000,00 tanggal 24 maret 2017 NTPN BB37013GPPJIKHA0 2. kekurangan laporan ringkasan eksekutif pada Setlata sebesar Rp3.000.000,01	4.710.000,00	3.000.000,00	Kekurangan alat dan Kekurangan pembayaran asuransi (oseanografi) dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp4.710.000,00 tanggal 24 maret 2017 NTFN BB37013GPPJIKH A0	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kekurangan volume pekerjaan					Bentuk Pertanggungjawaban (Penyatoran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Penyatoran	
					Rp	Rp		
20	Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi	081	25.616.250,00	Kekurangan volume pada awak kapal dan agen serta kontrak dermaga sebesar Rp25.616.250	2	25.616.250,00		
21	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089	148.222.726,37	Pemeliharaan gedung di Prov Jambi sebesar Rp2.183.126,37 dan pekerjaan Jasa Konsultansi untuk Pengembangan Aplikasi SIMAK pada Pusintowas sebesar Rp146.039.500,00. Kelebihan pembayaran sudah di setor ke Kas Negara	148.222.726,37	0,00	Penyatoran	
22	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	53.888.573,00	Pembayaran atas Pengadaan Jasa Pelayanan Hotline Service Pelucas Operator Krisi Center pada Deputi Bidang Perlindungan tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya sebesar Rp30.13 juta dan pembayaran atas pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan pada Sekretariat Utama tidak sesuai realisasi kegiatannya sebesar Rp23,75 juta	53.888.573,00		Penyatoran	
23	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	1.370.791.313,55		929.121.835,75	441.669.477,80	Penyeloran ke kas negara	
24	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	7.523.656,51	Kekurangan volume pekerjaan pemasangan pintu kaca dan dinding partisi		7.523.659,51		
25	Badan Pengusahaan Kawasan Perancangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	272.812.098,39		132.694.000,00	139.818.098,39	penyeloran	
26	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	296.366.500,00	1. Kekurangan volume pekerjaan untuk item backdrop pada kegiatan co-branding di melang sebesar Rp2.000.000,00 2. Kurang volume kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pada LPP RRI Banda Aceh Rp31.725.500,00 3. Kekurangan volume atas pekerjaan perawatan/pemeliharaan aplikasi dan server EDAS sebesar Rp84.800.000,00 4. Hotel Rp19.200.000,00	143.757.590,00	152.608.910,00	Penyeloran ke Kas negara	

Kekurangan volume pekerjaan							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKT-JM, dll)
					Rp	Rp	
			1		2	3 = 1 - 2	
27	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	434.515.888,30	5. Hospitality desk Rp33.000.000,00 6. Sewa ruang Rp5.800.000,00 7. Excursion day Rp40.000.000,00 8. Transport Rp15.642.500,00 9. Dokumentasi Rp7.548.500,00 10. Internet Rp76.650.000,00			
28	Badan Ekonomi Kreatif	121	519.977.404,00	1. Kekurangan volume pekerjaan pemasangan booth pada kegiatan pendukungan indosignation sebesar Rp49.069.000,00 pada deputi pemasaran direktoral pengembangan pasar dalam negeri 2. Belanja barang dan jasa Rp20.742.629.704,00 belum dapat diyakini kewajarannya baik dari harga maupun hasil pekerjaannya, serta kelobihan pembayaran atas item berdasarkan foto sebesar Rp470.369.404,00	0,00	434.515.888,30	
	TOTAL		36.492.505.816,95		10.249.706.258,38	26.401.304.561,67	

Rincian Nilai dan Keterangan atas Realisasi Belanja Barang Tidak didukung Keberadaannya atau Kejadiannya (Fiktif) pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai tawaran (Rp)	Keterangan	Realisasi Belanja Barang Tidak didukung keberadaannya atau Kejadiannya (Fiktif)			Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
					Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Rp	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Rp		
			1		2	3 = 1 - 2		
1	Kementerian Dalam Negeri	310	5,312,526,214.82		0.00	5,312,526,214.82		
2	Kementerian Luar Negeri	311	90,292,305.00	Belanja pemeliharaan untuk pembayaran service mobil fiktif dan pembelian peralatan dan mesin fiktif pada KBRI Zagreb		90,292,305.00		
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	335	184,600,000.00	Kelebihan bayar pencetakan buku laporan Semester II KPHIP Rp155.000.000,00 dan Kelebihan bayar atas sewa Rp29.600.000,00	184,500,000.00	0.00		Penyeteroran ke Kas Negara
4	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bpt	353	91,067,240.00		91,067,240.00	0.00		Penyeteroran
5	Komisi Nasional Hak Asas Manusia	374	725,664,274.00	1. Belanja ATK dan Makan Minum Berindikasi Fiktif sebesar Rp524.464.274,00 2. Paket Meeting terindikasi fiktif sebesar Rp201.200.000,00	0.00	725,664,274.00		
6	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	111,306,500.00	Pembayaran honor fiktif	0.00	111,306,500.00		
7	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	61,320,000.00	Pada kegiatan marine festival, untuk biaya sewa transportasi (sewa bus dan boat)	0.00	61,320,000.00		
8	Badan Ekonomi Kreatif	121	1,698,038,100.00	1. Pengadaan ATK pada dupli akses pemoculan tidak dapat bukti diuji pertanggungjawabannya dan fisik barang sebesar Rp1.087.243.600,00 2. Terdapat kegiatan fasilitasi sebesar Rp394.269.500,00 pada dupli infrastruktur tidak dapat diperiksa				
	TOTAL		8,574,814,633.82		275,567,240.00	6,301,109,293.82		

Rincian Nilai dan Keterangan atas Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda					Bentuk Pertanggungjawaban (Penyetoran, SKTJM, Dll)	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan		Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan		
					Rp	2	Rp		3 = 1 - 2
1	Kementerian Keuangan	015	1 9,493,132,326.40	Pemeliharaan Kapal Rp58.210.100; Pemeliharaan X ray Rp147.191.114; BPDPKS Rp194.274.796; Sewa Jasa Internet Rp2.234.274.795 dan Rp6.858.181.798		0.00	3 = 1 - 2 9,493,132,326.40		
2	Kementerian Pertanian	018	2,599,024,731.48	1. Kekurangan pencrimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yaitu pada 5 sator, belum disetorkan ke kas negara; dan 2. Denda keterlambatan atas pekerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi kepada Kelompok Penggerak Pembangunan Hortikultura.					
3	Kementerian Perindustrian	019	78,088,220.00				78,088,220.00		
4	Kementerian Pendidikan Nasional	023	10,301,760.00			0.00	10,301,760.00		
5	Kementerian Kesehatan	024	2,392,323,214.46	PPK pada delapan sator di Kemendes belum mengatakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa selama TA 2016 , yaitu: a. Direktorat Kesehatan Lingkungan senilai Rp23.251.132.60 b. Direktorat Fasyankes senilai Rp187.374.000.00		332,990,832.60	2,059,832,411.86	Penyetoran	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda				
			Keterangan	Nilai yang Telah Dipeertanggungjawabkan Rp	Nilai yang Belum Dipeertanggungjawabkan Rp		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, DII)
					1	2 3 = 1 - 2	
			c. RSUP Cipto Mangunkusumo senilai Rp1.591.045.667,26 d. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan senilai Rp185.600.874,60 e. Direktorat P2PTM senilai Rp107.888.300,00 f. Direktorat P2ML senilai Rp138.881.970,00 g. Direktorat P2PTVZ senilai Rp56.969.130,00 h. Sekretariat Badan Litbangkes senilai Rp95.810.670,00				
6	Kementerian Agama	025		394.143.650,00		394.143.650,00	
7	Kementerian Sosial	027	Denda keterlambatan pada wanprestasi pekerjaan pengadaan barang rompi tagarna	22.551.312,00	0,00	22.551.312,00	
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	1. Denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.689.598.640,00 atas pekerjaan sertifikasi kapal perikanan 2. Denda keterlambatan penyelesaian klaim asuransi nelayan sebesar Rp34.720.000,00	1.704.315.640,00	0,00	1.704.315.640,00	
9	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	Denda keterlambatan Buku EODB	8.258.000,00	8.258.000,00	0,00	Penyeteroran ke Kas Negara
10	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	Pada 3 satker	399.810.385,34	1.304.820,44	398.005.564,90	
11	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	Pelaksanaan pekerjaan pada lima paket pekerjaan / kegiatan terlambat dan belum dikenakan denda	1.850.532.744,00	25.537.500,00	1.824.995.244,00	Sudah disetor ke Kas Negara sebesar Rp25.537.500,00.

Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, Dll)
					Rp	Rp	
			1		2	3 = 1 - 2	
				keterlambatan sebesar Rp1.850.532.744,00.			
12	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	50,578,569.00		0.00	50,578,569.00	
13	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	217,308,464.00		0.00	217,308,464.00	
14	Badan Narkotika Nasional	066	38,857,989.00	1. Pekerjaan Pengadaan Amunisi 2. Pengadaan Obat dan Reagen pada Luka Rehabilitasi Kallanda Lampung, Lubuk Pakam Sumatera Utara dan Dalam	0.00	38,857,989.00	
15	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	634,438,902.83	1. Denda keterlambatan atas dua pekerjaan pada Ditjen PKP minimal senilai Rp53.144.795,94 (Rp5.113.800+ Rp14.442.038,70+ Rp33.588.958,24) 2. Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Kapal Kayu Tangkap Ikan 30 GT Senilai Rp22.800.000 pada Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Belanja Barang Pembangunan Saung Terampil di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima dikenakan Denda	0.00	634,438,902.83	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda			
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan Rp 2	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan Rp 3 = 1 - 2
16	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	182,969,441.04	keterlambatan Sebesar Rp18.945,734.94; 4. Adanya potensi penerimaan negara dari denda keterlambatan minimal sebesar Rp464.723.500.00. 5. Denda keterlambatan Penyelesaian dan Pekerjaan Volume Kapal Tangkap Ikan 10 GT (Paket 2) sebesar Rp74.824.711.00 Belum Dipungut	182,969,441.04	Penyeloran
17	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	5,975,807.00	1. Keterlambatan pemeriksaan AWOS Vaisala belum dikenakan denda sebesar Rp90.477.520.82; 2. Keterlambatan pemeriksaan Rada-Quaca EEC belum dikenakan denda sebesar Rp83.986.550.58; dan 3. Keterlambatan pemeriksaan AWOS All Weather belum dikenakan denda sebesar Rp405.363.54	5,975,807.00	
18	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	141,635,140.95	1. Pusklt kimia sebesar Rp1.923.384 2. Setama Konsultan Probia Rp4.051.323 Pengadaan pekerjaan mobil rescue sebanyak 25 unit mengalami keterlambatan selama 12-13 hari ka ender, ramun	141,635,140.95	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikonakan Denda					Bentuk Pertanggungjawaban (Penyetoran, SKTJM, DII)
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan		
					Rp	Rp	3 = 1 - 2	
			1			2		
				pelaksanaan pekerjaan belum cikenakan denda sebesar Rp141.635.149,95				
19	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	108	29.761,354.00		29.761,354.00			Penyetoran ke kas negara
20	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	34.332.000.00			0.00	34.332.000.00	
21	Sekretariat Kabinet	114	978.000.00	Keterlambatan Ilsensi Zimtra NE		0.00	978.000.00	
22	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	10.780.000.00			0.00	10.780.000.00	
	TOTAL		20.300.503.660.55			581.221.518.08	17.120.257.010.99	

Rekapitulasi Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2016

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas							TOTAL		
			Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban	Satu Orang Melakukan Perjalanan Kedua Tempat dalam Waktu Bersamaan	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelembihan Pembayaran	Nama Dan Nomor Tiket Tidak Sesuai Dengan Manifest	Harga Tiket Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya	Perjalanan Dinas Fiktif				
								Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)		Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002		45.546.000,00	245.250.180,00				31.409.900,00	322.200.080,00		
2	Mahkamah Agung	005	0,00		1.262.715.990,08				0,00	1.262.715.990,08		
3	Kepulauan Republik Indonesia	006			32.578.500,00					32.578.500,00		
4	Kementerian Sekretariat Negara	007			47.992.916,00			332.163.170,00		380.156.086,00		
5	Kementerian Dalam Negeri	010		14.376.000,00	2.466.726.046,00	104.367.602,00				2.581.469.648,00		
6	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	013			322.866.462,00					322.866.462,00		
7	Kementerian Pertanian	018			419.016.138,00					419.016.138,00		
8	Kementerian Pendidikan Nasional	023			681.035.476,59					681.035.476,59		
9	Kementerian Kesehatan	024			168.556.627,80 \$1.299,20					168.556.627,80		
10	Kementerian Agama	025	2.082.904.451,00		1.228.119.320,96					3.311.023.771,95		
11	Kementerian Ketenagakerjaan	026			470.068.431,57					470.068.431,57		
12	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	8.058.000,00		1.423.766.926,40					1.431.824.926,40		
13	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	032			166.750.000,00					166.750.000,00		
14	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035			27.811.040,00					27.811.040,00		

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas						TOTAL
			Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban	Satu Orang Melakukan Perjalanan Kedua Tempat dalam Waktu Bersamaan	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelabihan Pembayaran	Nama Dan Nomor Tiket Tidak Sesuai Dengan Manifest	Harga Tiket Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya	Perjalanan Dinas Fiktif	
			Nilai Temuan (Rp) 1	Nilai Temuan (Rp) 2	Nilai Temuan (Rp) 3	Nilai Temuan (Rp) 4	Nilai Temuan (Rp) 5	Nilai Temuan (Rp) 6	
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	43.030.000,00		30.895.500,00			160.808.500,00	7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 234.764.000,00
16	Kementerian Pariwisata	040					1.693.763.939,77		1.693.763.939,77
17	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	15.927.000,00		5.922.232.815,61				5.942.159.815,61
18	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047			152.226.304,00				152.226.304,00
19	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048			160.453.590,00				160.453.590,00
20	Dewan Ketahanan Nasional	052			65.911.328,00				65.911.328,00
21	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Epn	055			789.639.412,00				789.639.412,00
22	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059			419.769.106,80		107.540.364,00	33.130.000,00	560.439.470,80
23	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063		2.037.004,00			7.478.300,00		9.515.304,00
24	Lembaga Ketahanan Nasional	064			114.443.300,00				114.443.300,00
25	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	3.326.741.812,00		1.197.361.504,00				4.524.103.116,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas						TOTAL
			Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban	Satu Orang Melakukan Perjalanan Kedua Tempat dalam Waktu Bersamaan	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelabihan Pembayaran	Nama Dan Nomor Tiket Tidak Sesuai Dengan Manifest	Harga Tiket Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya	Perjalanan Dinas Fiktif	
			Nilai Temuan (Rp) 1	Nilai Temuan (Rp) 2	Nilai Temuan (Rp) 3	Nilai Temuan (Rp) 4	Nilai Temuan (Rp) 5	Nilai Temuan (Rp) 6	
26	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075			80.825.032,00				7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 80.825.032,00
27	Komisi Pemilihan Umum	076			137.588.972,00			684.541.500,00	822.130.472,00
28	Mahkamah Konstitusi RI	077			4.486.000,00	3.497.500,00	4.061.000,00		12.044.500,00
29	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079			33.109.521,80				33.109.521,80
30	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	145.234.100,00		676.835.383,00				822.169.483,00
31	Badan Koordinasi Survei dan Pencatatan Nasional/Big	083			308.854.919,00				308.854.919,00
32	Lembaga Administrasi Negara	085			7.557.440,00				7.557.440,00
33	Arsip Nasional Republik Indonesia	087			95.855.381,00		119.222.871,00		215.078.252,00
34	Badan Kepegawaian Negara	088			84.680.000,00				84.680.000,00
35	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089					30.340.061,00		30.340.061,00
36	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092			177.888.000,00				177.888.000,00
37	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095			63.142.696,00				63.142.696,00
38	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103			20.000.000,00	98.686.700,00	27.748.300,00		146.435.000,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas							TOTAL					
			Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban	Satu Orang Melakukan Perjalanan Kedua Tempat dalam Waktu Bersamaan	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebiahan Pembayaran	Nama Dan Nomor Tiket Tidak Sesuai Dengan Manifest	Harga Tiket Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya	Perjalanan Dinas Fiktif							
									Nilai Temuan (Rp)		Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)
											7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6				
39	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104			34.242.300,00							34.242.300,00			
40	Komisi Pengawas Persairgan Usaha	108	38.611.223,00	730.000,00	261.733.525,00								302.074.748,00		
41	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109						14.036.700,00					14.036.700,00		
42	Badan Nasional Pengelola Portatasan	111	215.905.800,00		221.484.000,00								437.389.800,00		
43	Sekretariat Kabinet	114			3.176.000,00								3.176.000,00		
44	Lembaga Penyiaran Pubik Radio Republik Indonesia	116	7.578.329,00		40.806.559,00			158.783.110,00					216.257.996,00		
45	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118			229.350.000,00								229.350.000,00		
46	Kementerian Kordinator Kemaritiman	120			145.819.006,00								145.819.006,00		
47	Badan Ekonomi Kreatif	121			208.766.749,00								209.766.749,00		
	TOTAL		5.888.960.515,00	62.689.004,00	20.640.577.799,41 \$1.299,20	206.551.802,00	2.495.137.815,77	909.889.900,00					30.203.806.836,18 \$1.299,20		

Rincian Nilai dan Keterangan atas Perjalanan Dinas yang Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas								
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban		Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan Rp	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan Rp		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, DII)
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan		Rp	3 = 1 - 2	
1	Kementerian Agama	025	2.002.904.451,00	Realisasi perjalanan dinas tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban	0,00	2.002.904.451,00		
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	8.058.000,00	Perjalanan dinas belum ada bukti pertanggungjawaban	8.058.000,00	0,00	Penyeteran SSBP	
3	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	43.000.000,00	Biaya transportasi dari Ambon ke Pulau Wehar sebesar Rp43.000.000,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban	0,00	43.000.000,00		
4	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	19.927.000,00		0,00	19.927.000,00		
5	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	3.326.741.612,00	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada LRA adalah sebesar Rp24.476.484.970,00. Total dokumen pertanggungjawaban adalah sebesar Rp21.149.723.358,00 sehingga Rp3.326.741.612,00 tidak didukung SPJ	0,00	3.326.741.612,00		
6	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	145.234.100,00	Belanja Perjalanan Dinas paket meeting yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan tidak diyakini keterjadiannya		145.234.100,00		
7	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	39.611.223,00	Perjalanan dinas sebesar Rp39.611.223,00 tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi hotel	0,00	39.611.223,00		
8	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	215.905.800,00	Perjalanan dinas yang batal dilaksanakan belum dikembalikan ke Kas Negara	56.000.000,00	159.905.800,00	Penyeteran	
9	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	7.578.329,00	Pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung namun tetap dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada RRI Makassar	0,00	7.578.329,00		
TOTAL			5.888.960.515,00		64.053.000,00	5.824.902.515,00		

**Rincian Nilai dan Keterangan atas Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan oleh Satu Orang dalam Waktu Bersamaan ke Dua Tempat yang Berbeda pada
Kementerian/Lembaga Tahun 2016**

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas						Bentuk Pertanggungjawaban (Penyetoran, SKTJM, Dili)
			Satu Orang Melakukan Perjalanan Kedua Tempat dalam Waktu Bersamaan		Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan		Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan		
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Rp		Rp		
			1		2		3 = 1 - 2		
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	45.548.000,00						
2	Kementerian Dalam Negeri	010	14.376.000,00			0,00		14.376.000,00	
3	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	2.037.004,00			0,00		2.037.004,00	
4	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	730.000,00	Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas tumpang tindih sebesar Rp730.000,00		0,00		730.000,00	
TOTAL			62.589.004,00			0,00		17.143.004,00	

Rincian Nilai dan Keterangan atas Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan		Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan		Bentuk pertanggungjawaban (Penyeteroran, Skdgm, Dili)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Rp	2	Rp	3 = 1 - 2	
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002	245.250.180,00	Pelaksana perjalanan dinas pada Sejen DPR menerima pembayaran uang harian yang melebihi tarif standar sesuai SBM Tahun 2016.					
2	Mahkamah Agung	005	1.262.715.890,08	Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas Dalam Negeri sebesar dan Luar Negeri					
3	Kejaksaan Republik Indonesia	006	32.578.500,00	Hasil uji petik atas pertanggungjawaban perjalanan dinas di Direktorat II, Direktorat III diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya transport, penginapan dan uang harian (UH) sebesar Rp32.578.500,00		0,00	32.578.500,00		
4	Kementerian Sekretariat Negara	007	47.992.916,00	Pembayaran penginapan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya		40.978.000,00	7.014.916,00	Penyeteroran	
5	Kementerian Dalam Negeri	010	2.486.726.046,00			805.367.720,00	1.681.358.326,00	Penyeteroran	
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	322.866.462,00	Kelebihan perjalanan dinas luar negeri		272.657.542,00	50.208.920,00	Penyeteroran	
7	Kementerian Pertanian	018	419.016.138,00	1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri melebihi ketentuan karena melebihi jumlah hari perjalanan. Rp397.485.138,00; 2. Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri tidak sesuai dengan bukti resmi penginapan sebesar Rp10.266.000; dan 3. Belanja perjalanan dinas melebihi ketentuan karena tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) sebesar Rp11.265.000		0,00	419.016.138,00		
8	Kementerian Pendidikan Nasional	023	681.035.476,59	1. Dikdasmen Rp378.214.476,20; 2. Ditjen PAUD DIKMAS Rp91.267.326,40; 3. Badan Bahasa Rp3.490.000,00;		0,00	681.035.476,59		

Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas									
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan		Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, Sktjm, DII)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Rp	Rp	Rp		
								1	
9	Kementerian Kesehatan	024	166.556.627,80 \$1.298,20	4. Ditjen Kebudayaan Rp140.054.125,38 dan 5. Seljen Kemencikbud Rp59.209.548,00					Penyeteroran tanggal 3 April 2017 1C71F5TV05=CDNPP
				1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah menunjukkan bukti-bukti atas perhitungan perjalanan dinas luar negeri belum seluruhnya menggunakan penyesuaian atas tarif sesuai ketentuan atas UH;	47.830.060,00	118.726.567,80			
				2. Perjalanan dinas pada Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan format laporan tidak sesuai ketentuan; dan 3. Perjalanan dinas luar negeri belum sepenuhnya mempromitikan UH dan jumlah hari sesuai surat ijin Selneg sebesar Rp200.080.111,00 dan \$742,80, penggunaan kelas penerbangan tidak sesuai dengan golongan perjalanan dinas sebesar Rp482.500,00 dan \$200,00, dan realisasi perjalanan dinas digunakan untuk kegiatan rapat sebesar Rp6.159.500,00					
10	Kementerian Agama	025	1.228.119.020,96	Pembayaran uang transport dan UH perjalanan dinas melebihi ketentuan/SBM	137.208.336,00	1.030.910.684,96	Peryeteroran		
11	Kementerian Ketenagakerjaan	026	470.068.431,57	1. Tiket tidak sesuai harga sebenarnya; 2. Perjalanan dinas tidak dilaksanakan; 3. Biaya perjalanan tidak sesuai kondisi setenangnya; 4. Penginapan tidak sesuai kondisi sebenarnya; dan 5. Perjalanan dinas melebihi SBM	430.071.051,57	30.057.380,00	Peryeteroran		

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas				
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelahiran Pembayaran		Nilai yang Telah Dipeganggajawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, Sktjm, Dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Rp	Rp	
12	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	1.423.766.926,40	Kelebihan pembayaran berasal dari UH, uang penginapan, paket meeting, perjalanan dinas luar negeri, dan sisa perjalanan dinas belum disetor	1.423.766.926,40	0,00	Penyeteran (SSBP)
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	166.750.000,00	Biaya perjalanan dinas sebesar Rp166.750.000,00 dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat			
14	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	27.811.040,00	UH melebihi jumlah hari, perbedaan harga paket meeting dalam kota, biaya hote melebihi SBM	14.652.980,00	13.158.060,00	Penyeteran
15	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	30.895.500,00	Kelebihan pembayaran tiket sebesar Rp21.879.500,002 dan kelebihan pembayaran atas sewa hotel sebesar Rp8.976.000,00.	0,00	30.895.500,00	
16	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	5.922.232.815,61	UH melebihi SBM; <i>fullboard</i> diberikan UH dan kelebihan harga tiket	0,00	5.922.232.813,61	
17	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	152.226.304,00	Kelebihan pembayaran UH perjalanan dinas luar negeri pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp152.226.304,00	146.912.950,00	5.313.340,00	Penyeteran
18	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	160.453.560,00	1. Sewa kendaraan yang dilakukan oleh bukan Pejabat Negara sebesar Rp7.000.000,00; 2. Kelebihan pembayaran UH Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2016 sebesar Rp53.723.590,00; dan 3. Pemborosan kelebihan UH untuk mengikut rapat sebesar Rp99.730.000,00	60.723.590,00	99.730.000,00	Penyeteran
19	Dewan Ketahanan Nasional	052	65.911.328,00	Terdapat kelebihan pembayaran atas uang hotel UH dan uang transportasi taksi yang melebihi standar biaya sebesar Rp65.911.328,00	65.911.326,00		

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas				
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketuntasan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah Dипertanggungjawabkan Rp	Nilai yang Belum Dипertanggungjawabkan Rp	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, Skjm, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
20	Kementerian Agama dan Tata Ruang/Bptn	056	789.639.412,00	1. Perjalanan dinas tidak didukung bukti pembayaran Rp397.050.000,00; 2. Kelebihan biaya pengiriman surat Rp23.810.000,00; 3. Kelebihan belanja perjalanan dinas Rp30.279.900,00; 4. Perjalanan dinas melebihi SBM sebesar Rp58.230.000,00; 5. Kelebihan perjalanan dinas Rp10.171.150,00; 6. Kelebihan perjalanan dinas pada Ka Wil Jateng Rp31.531.500; 7. Kelebihan perjalanan dinas pada dekon NTB Rp28.140.300,00; 8. Kelebihan perjalanan dinas pada Ka Wil NTB Rp13.015.000,00; 9. Kelebihan perjalanan dinas pada kota Samarinda Rp11.002.903,00; 10. Kelebihan perjalanan dinas pada Kap Kutai 27.803.000,00; 11. Kelebihan perjalanan dinas pada kota Balikpapan Rp1.374.554,00; 12. Kelebihan perjalanan dinas pada Kalimantan Timur Rp24.284.205,00; 13. Kelebihan perjalanan dinas pada Tata Ruang Rp3.830.000,00; 14. Kelebihan perjalanan dinas pada dekon pengendalian Rp44.169.650; 15. Kelebihan perjalanan dinas pada kota Cirebon Rp2.280.000,00; 16. Kelebihan perjalanan dinas pada Kap Cirebon Rp4.290.000,00; 17. Kelebihan perjalanan dinas pada Dekon Tata Ruang Rp28.098.250,00; dan	0,00	789.639.412,00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas					Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, Skjgm, Dll)
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan	3 = 1 - 2	
			Nilai temuan (Rp) 1	Keterangan	Rp 2	Rp 3		
21	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	419.760.108,80	18. Kelebihan perjalanan dinas pada pengencalan Jawa Barat Rp49.573.000,00 1. Perjalanan dinas lebih pagu sebesar Rp520.000; 2. Kelebihan pembayaran belanja negara atas perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp3.460.960; 3. Pembayaran U I untuk waktu perjalanan dinas luar negeri tidak sesuai dengan PMK Nomor 164/PMK.06/2015 sebesar Rp405.995.765,00 dan 4. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar negeri diluar kesalahan perhitungan uang harian sebesar Rp9.784.381,00	336.146.560,00	83.622.538,80	Penyeteran	
22	Lembaga Ketahanan Nasional	064	114.443.300,00		29.710.300,00	34.725.000,00	Penyeteran	
23	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	1.197.361.504,00	Perjalanan dinas bukan dari tempat: kedukaan, keperluan pribadi, uang saku RDK yang dilaksanakan pada jam kerja dan perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan mendahului exit permit	0,00	1.197.361.504,00		
24	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	80.825.032,00	Kelebihan pembayaran UH perjalanan dinas luar negeri	80.825.032,00	0,00	Penyeteran	
25	Komisi Pemilihan Umum	076	137.588.972,00	Kelebihan UH dan uang hotel perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri	88.078.931,00	49.512.041,00	Penyeteran	
26	Mahkamah Konstitusi RI	077	4.486.000,00					
27	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	33.109.521,60	1. Oseanografi merupakan kesalahan perjalanan dinas pegawai sehingga UH perjalanan dinas luar negeri kelebihan bayar sebesar Rp11.482.521,60; 2. Metrologi merupakan kesalahan pembayaran kelebihan yang	24.344.121,60	8.465.400,00	1. Untuk perjalanan dinas oseanografi sebesar Rp11.482.522 sudah disetorkan ke kas negara tanggal 24 Maret 2017 NTPN 40F9A13RP2LUKGA0	

Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas							
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, Sktjm, dll)	
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Dipertanggungjawabkan		
					Rp		
			1		2	3 = 1 - 2	
				harian saat perjalanan ke luar negeri sehingga terdapat kelebihan UH sebesar 60% dengan total nilai sebesar Rp7.889.400,00 dan terdapat pemberian uang hotel yang melebihi SBM sebesar Rp576.000,00; dan			
				3. Pada oseanografi terdapat realisasi perjalanan dinas ganda satu orang sebesar Rp13.161.600,00			
28	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	676.935.083,00	1. Realisasi belanja perjalanan dinas paket meeting di BPT melebihi yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 65/KMK.02/2015 sebesar Rp481.345.010; 2. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri tersebut terkait dengan kebijakan pembayaran uang lumpsum harian sebesar 40% pada hari pelaksanaan perjalanan ke dan dari daerah tujuan sebesar Rp215.570.073	223.268.853,00	453.646.230,00	Penyeteran
29	Racana Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/Rig	083	308.854.919,00	1. Kelebihan pembayaran untuk pelaksanaan tugas pergi dan pulang paling tinggi sebesar 40% dari tarif UH dikarenakan tidak menginap sebesar Rp296.246.729,00; dan 2. Kelebihan pembayaran UH perjalanan dinas luar negeri ke New York selama satu hari karena yang bersangkutan telah kembali dari perjalanan dinas lebih awal satu hari dari tanggal pelaksanaan yang tercantum pada surat tugas sebesar Rp12.908.190,00	0,00	308.854.919,00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas				
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah Dิปertanggungjawabkan	Nilai yang Belum Dิปertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, Skdm, Dll)
			Nilai temuan (Rp) 1	Keterangan	Rp 2	Rp 3 = 1 - 2	
30	Lembaga Administrasi Negara	086	7.557.440,00	Pembayaran UH perjalanan dinas melebihi waktu pelaksanaan perjalanan dinas	7.557.440,00	0,00	Penyeteran
31	Arsip Nasional Republik Indonesia	087	95.855.381,00	Perjalanan dinas tidak jadi dilaksanakan, namun tetap dipertanggungjawabkan senilai Rp7.970.000,00 dan pembayaran UH perjalanan pada Tahun 2018 belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PMK Nomor 104/PMK.03/2015 sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp87.885.381,00	95.855.381,00	0,00	Penyeteran
32	Badan Kepegawaian Negara	088	64.680.000,00	Pembayaran uang saku perjalanan dinas paket meeting foliocard melebihi ketentuan sebesar Rp64.680.000,00			
33	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	177.858.000,00		177.858.000,00	0,00	Penyeteran
34	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	63.142.696,00	Pembayaran biaya sewa kendaraan dalam kota kepada pelaksana SPD yang bukan pejabat negara tidak sesuai ketentuan PMK Nomor 65 tentang SBM sebesar Rp63.14 juta	0,00	63.142.696,00	
35	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	20.000.000,00	Pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp20.000.000 yang digunakan untuk menyewa pesawat antar pulau	0,00	20.000.000,00	
36	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	34.242.300,00	Kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp34.242.300, realisasi biaya penginapan tidak sesuai SBM, realisasi UH tidak sesuai SBM, dan yang representasi tidak sesuai ketentuan	25.460.580,00	8.095.720,00	Penyeteran
37	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	261.733.525,00	Perjalanan dinas luar negeri untuk 29 pegawai senilai Rp2.177.621.447,00 dilakukan tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah, yaitu untuk realisasi hari perjalanan melebihi jumlah hari yang diijinkan dengan nilai total pemborosan sebesar Rp261.733.525,00	0,00	261.733.525,00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas					Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, Skdm, DII)
			Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan		Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan Rp 3 = 1 - 2	
			Nilai temuan (Rp) 1	Keterangan	Rp 2			
38	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	221.484.000,00	1. Bukti perjalanan dinas berupa bill hotel tidak benar sebesar Rp153.745.500, perjalanan dinas ganda, tiket transportasi laut tidak benar tiket pesawat untuk perjalanan dinas yang batal belum dikembalikan sebesar Rp22.125.000; dan 2. SPJ perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp45.613.500	133.063.500,00	88.400.500,00	Penyeteroran	
39	Sekretariat Kabinet	114	3.176.000,00	Pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan sebesar Rp1.926.000,00 dan pembayaran biaya representasi sebesar Rp1.250.000,00	0,00	3.176.000,00		
40	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	49.836.550,00	Kelengkapan hari perjalanan dinas (realisasi hari kurang dari yang di SPJ-hari)	44.615.259,00	5.201.300,00	Penyeteroran	
41	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	229.350.000,00	SPJ yang disampaikan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya (dalam hal harga dan jumlah hari)	105.919.900,00	43.430.100,00		
42	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	145.819.006,00	1. Pencairan SP2D atas perhitungan lagihan yang dibayarkan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan, tidak sesuai dengan SBM, dan tanpa dasar pembayaran senilai Rp44.569.006,00; 2. Pembayaran uang saku RDK yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp101.250.000,00 dan 3. Belum ada standar besaran uang transportasi darat antar- kota	0,00	145.819.006,00		

Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas						
No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran		Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, Sktjm, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Rp	
					Rp	
43	Badan Ekonomi Kreatif	121	209.766.749,00	1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp103.024.549,00 pada Depul Pemasaran-Direktorat Pengembangan Pasar Luar Negeri; dan 2. Uji pot k bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas berupa tiket kendaraan dan bill hotel/penginapan diketahui terdapat pembayaran perjalanan dinas yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp103.942.200,00	2 3 = 1 - 2	
TOTAL			20.640.577.799,41 \$1,299.20		4.900.040.357,57 13.786.182.522,76	

Rincian Nama dan Nomor Tiket Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Manifest, Harga Tiket Tidak Sesuai dengan yang Sebenarnya, dan Perjalanan Dinas Fiktif

No.	Kementerian/ Lembaga	B A	Penyimpangan belanja perjalanan dinas						Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			Nama dan Nomor Tiket Tidak Sesuai dengan Manifest Nilai temuan (Rp) 1	Harga Tiket Tidak Sesuai dengan yang Sebenarnya Nilai temuan (Rp) 2	Perjalanan Dinas Fiktif Nilai temuan (Rp) 3	TOTAL Nilai temuan (Rp) 4 = 1 + 2 + 3	Nilai yang Telah Dipertanggungjawabkan Rp 5	Nilai yang Belum Dipertanggungjawabkan Rp 6 = 4 - 5	
1	Dewan Perwakilan Rakyat	002			31.408.900,00	31.408.900,00			
2	Kementerian Sekretariat Negara	007		332.163.170,00		332.163.170,00	14.887.500,00	317.275.670,00	Penyeteran
3	Kementerian Dalam Negeri	010	104.367.602,00			104.367.602,00	0,00	104.367.602,00	
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036			160.808.500,00	160.808.500,00	0,00	160.808.500,00	
5	Kementerian Pariwisata	040		1.693.763.939,77		1.693.763.939,77	382.750.634,00	1.311.013.305,77	Penyeteran
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059		107.540.384,00	33.130.000,00	140.670.384,00	140.670.384,00	0,00	Penyeteran
7	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063		7.478.300,00		7.478.300,00	3.516.000,00	3.962.300,00	Penyeteran
8	Komisi Pemilihan Umum	076			584.541.500	584.541.500,00	667.162.500,00	17.389.000,00	Penyeteran
9	Mahkamah Konstitusi RI	077	3.497.500,00	4.061.000,00		7.558.500,00			
10	Arsip Nasional Republik Indonesia	087		119.222.871,00		119.222.871,00	119.222.871,00	0,00	Penyeteran
11	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	089		30.340.051,00		30.340.051,00	0,00	0,00	
12	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	96.686.700,00	27.748.300,00		126.435.000,00	0,00	126.435.000,00	
13	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109		14.036.700,00		14.036.700,00		14.036.700,00	
14	Lembaga Penyaluran Publik Radio Republik Indonesia	116		158.783.110,00		158.783.110,00	157.411.010,00	1.372.100,00	Penyeteran ke Kas Negara digabung antara dalam negeri dan Luar Negeri
TOTAL			206.551.802,00	2.495.137.815,77	909.889.900,00	3.611.579.517,77	1.485.610.879,00	2.066.660.177,77	

Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya terkait Belanja Modal pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
			1		2		3 = 1 + 2	4	5 = 3+4
1	Mahkamah Agung	005	1.540.223.250,00	1. Alat pengolah data yang belum dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan tujuan pengadaan barang sebesar Rp501.427.000,00 2. Pekerjaan persiapan untuk listrik kerja selama pekerjaan berlangsung dan mobilisasi demobilisasi alat-alat berat sebesar Rp106.810.000,00 tidak didukung dengan bukti yang memadai 3. Hasil pengadaan meubelair belum dimanfaatkan sebesar Rp438.520.000,00 4. Hasil pengadaan diragukan kebenarannya pada PIA Banjarmasin Rp136.344.000,00 5. Bukti pertanggung-jawaban biaya langsung non personil tidak diyakini			1.540.223.250,00		1.540.223.250,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang telah Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
2	Kepolisian Republik Indonesia	006	908.892.500,00	kevajajarannya sebesar Rp196.468.250 3. Pemborosan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor PW Takalar Tahap I sebesar Rp160.654.000,00			908.892.500,00		908.892.500,00
3	Kementerian Pertahanan	012		Penyelesaian sisa pekerjaan yang belum dibayar pada pekerjaan perluasan gedung Kejari Slawi	8.681.829.089.363,00	Pekerjaan tidak dapat diselesaikan per 31/12/2016 karena: 1. Perubahan sasaran/spesifikasi teknis 2. Penyelesaian pekerjaan melebihi 12 bulan; dan 3. Permasalahan import	8.681.829.089.363,00		8.681.829.089.363,00
4	Kementerian Keuangan	015			2.574.203.636,36	Kemahalan nilai kontrak sebesar Rp2.574.203.636,36 pasca pembangunan gedung BDK Pontianak	2.574.203.636,36	0,00	2.574.203.636,36

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggung-jawabkan		Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan	
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp	Rp	Rp
5	Kementerian Perhubungan	022	15.053.838.516,11	1. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan Ro-Ro di Gunung Sitoli, Lintas Sibolga - Gunung Sitoli tahap III pada satker Hubdat Provinsi Sumut senilai Rp322.655.438,41 2. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan arjutan pemtangunan fasilitas pelatihan aut Batang TA 2016 pada kantor UPP kelas III Batang sebesar Rp1.461.805.576,44 3. Potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan fasilitas sisi udara Bandar Udara Ketajati tahap IV - paket apron paca satker Dit. Bandar Udara dan atas pekerjaan penitangunan fasilitas sisi udara			15.053.838.516,11			15.053.838.516,11	

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
				Bandar Udara Kartajat tahap IV - paket Cross Taxiway B pada satker Dit. Bandar Udara sebesar Rp2.351.400.720,44 4. Potensi kelebihan penyiapan akibat kelebihan perhitungan volume pada beberapa paket pekerjaan pembangunan jalan KA layang antara Medan - Bandar Khalipah Lintas Medan - Araskabu - Kualanamu senilai minimal Rp4.971.973.780,82					
3	Kementerian Pendidikan Nasional	023			186.359.191,00	Perencanaan RAB atas pekerjaan rehabilitasi gedung Laboratorium L-MP Jawa Barat kurang cermat (berakibat pemborosan)	186.359.191,20		186.359.191,20
7	Kementerian Kesehatan	024	1.161.235.600,00	1. Terdapat realisasi Belanja Modal melalui penikatan kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan pada 30 satuan kerja di	2.144.340.054,78	1. Terdapat realisasi Belanja Modal melalui penikatan kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan pada 30 satuan kerja di	3.305.575.654,78		3.305.575.654,78

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggungjawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggungjawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
				Kementerian Kesehatan yang belum didukung kartu garansi pada BPFK Makassar dan Poltekkes Manado 2. Terdapat realisasi Belanja Modal melalui perikatan kontrak yang belum sesuai dengan ketentuan pada 30 Satuan Kerja di Kementerian Kesehatan berupa penerapan HPS tidak tepat pada RSUP DR. Cipto senilai Rp1.161.235.600		Kementerian Kesehatan: 2. Jaminan pelaksanaan belum dicairkan pada Pusat Data dan Informasi sebesar Rp53.497.500 3. Jaminan pelaksanaan belum dicairkan pada EBPB Jakarta sebesar Rp54.400.000 4. Kemahalan pada Biro Umum, EBKPM Bandung, RSUP Hasan Sadikin, RS Paru Rotinsjle, RSUP Adam Malik dan RSUP Kandang sebesar Rp1.615.247.682,78 5. Pemecahan kontrak pada RSUP Hasan Sadikin sebesar Rp0 6. Belanja Modal belum dimanfaatkan pada RSUP Marzuki Mahdi sebesar Rp281.919.872 7. Bukti pertanggungjawaban tidak valid pada RSUPD sebesar Rp99.275.000			
3	Kementerian Agama	025	4.594.649.670	PK belum melakukan pencairan jaminan			4.594.649.670,00		4.594.649.670,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kopatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
9	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	028		pelaksanaan 9% dari nilai kontrak	23.626.494,00	Pengadaan barang yang tidak menggunakan metode e-purchasing sehingga berdampak terjadinya selisih harga di bandingkan dengan e-katalog sebesar Rp23.626.494,00	23.626.494,00		23.626.494,00
10	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	C32	1.181.510.000	Pekerjaan pembangunan gerbang dan pagar kelling kampus STP Jurusan penyuluhan perikanan Bogor sebesar Rp1.181.510.000,00 tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya			1.181.510.000,00		1.181.510.000,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)			Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)	TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggungjawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggungjawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)				
11	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	033	77.541.593.283,24	1. Potensi kekurangan penerimaan negara atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.171.522.850,00 jika pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak. Perubahan kontrak dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke TA berikutnya dilakukan setelah jangka waktu kontrak berakhir perpanjangan jaminan pelaksanaan tidak sampai masa kontrak berakhir, amandemen kontrak sesuai prestasi fisik. 2. Pemborosan pekerjaan galian dan timbunan karena pekerjaan timbunan yang dilakukan pada badan sungai sehingga menimbulkan pemborosan senilai Rp101.141.593,17 3. Potensi kelebihan pembayaran pada paket-paket MYC dan/atau belum		77.541.593.283,24	0	77.541.593.283,24	

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
				dibayarkan 100% sebesar Rp523.809.690,18 4. Paket kelebihan pembayaran pada MYC sebesar Rp16.181.530,013 5. Analisis dokumen kontrak menunjukkan terdapat potensi kelebihan pembayaran karena double perhitungan dan/atau pekerjaan menjadi tanggung jawab pelaksana, namun kontrak tersebut baru dibayarkan U/M-nya saja sebesar Rp59.463.589.036,76					
12	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan	034		1. Pengadaan barang di lingkungan Kemenko Polhukam belum sesuai ketentuan dan terdapat ketidakhematan minimal sebesar Rp112.380.552,00, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp18.504.320,00. 2. BPP Kopolnas terlambat menyertakan	177.102.889,00		177.102.889,00		177.102.889,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang telah Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
13	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bptn	05C				Pajak Penghasilan pasal 22.23. dan Pajak Perlambahan Nilai (PPN) atas Belanja Modal sebesar Rp46.217.937.00 yang sudah disetor ke Kas Negara per April 2017 1. Penyusunan CED alas gedung Dijalan Tata Ruang tidak tepat karena bukan milik Kementerian ATN/CPTN, tetapi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kem PUPR) dan tercatat dalam BMN Kem PUPR Rp577.500.000 2. Penyusunan HPS tidak dilakukan secara kredibel sehingga kemahalan harga sebesar Rp50.376.599.50 3. Pengadaan barang melebihi harga dalam e-katalog sebesar Rp126.519.950 4. Belanja Modal tidak sesuai kebutuhan di Balikpapan, dan	1.463.165.215,50		1.463.165.215,50

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
14	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	236.650.000,00	1. Bukti perjanjian dinas dalam kontrak yang tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp173.650.000 (Rp132.350.000 + Rp41.500.000) 2. Bukti perjanjian dinas yang tidak diyakini kewajarannya senilai Rp62.800.000		pengadaan kendaraan operasional roda empat pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Karwil Kaltim dengan jenis SUV tidak tepat Rp202.702.000 5. Pemecahan paket pengadaan pada Kantor Kab. Karawang dengan total nilai Rp560.066.000	236.650.000,00	236.650.000,00	
15	Badan Koordinasi Penanaman Modal	065			2.611.928.000	Pengadaan pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik tahun 2016 telah di serahkan	2.611.928.000,00		2.611.928.000,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>urutan permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>urutan permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Telah Dipertanggungjawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggungjawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Rp	Rp
10	Badan Nasional Narkotika	006	11.123.971.900,00	1. Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Dari Layanan Rehabilitasi secara online pada Direktorat RUP tidak dapat menyajikan informasi seluruh kegiatan dan program rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkoba yang dibiayai oleh BNN 2. Dendahara Pengeluaran belum memungut PPN dan PPh atas pengadaan Bc arja Modal peralatan intelijen pada Dit. Intelijen, senilai Rp8.215.243.864,00 atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran senilai Rp8.044.993.864,00 sehingga sisa pajak yang belum disetor senilai Rp170.250.000,00 yang merupakan FPPH		sebelum dilakukan User Acceptance Test.	11.123.971.900,00		11.123.971.900,00

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
17	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	078	0,00	22 pekerjaan <i>Front end monitoring center</i>	15.100.203.565,00	Pekerjaan lambah melebihi 10% tidak sesuai ketentuan Perpres pengadaan barang/jasa, serta belum didukung kertas kerja justifikasi teknis memadai	15.100.203.565,00	15.100.203.565,00	
18	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	082			9.888.513.000,00	Penunjukkan langsung pengadaan satu unit pesawat LSA J2 dilakukan oleh Satuan Kerja Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) tanpa melibatkan pihak Unit Layanan Pengadaan Kembali	9.888.513.000,00	9.888.513.000,00	
19	Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional/Big	083			138.913.885,00	Selilih harga tiket tersebut adalah selisih harga tiket berdasarkan harga pada bukti tiket hasil konfirmasi maskapai. BPK meminta BIG untuk melakukan pengujian lebih lanjut	138.913.885,00	138.913.885,00	

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya tahap 3 yang Telah Dipertanggungjawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggungjawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
20	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085				apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetor ke kas negara			
21	Badan Pengawas dan Lumpur Sidoarjo (Epls)	005	443.270.420,92	Harga satuan penawaran penyedia lebih besar 110% dibandingkan harga satuan HPS sehingga penambahan volume seharusnya menggunakan harga satuan dalam HPS, dan terdapat kelebihan pembayaran (belum ada penyetoran ke Kas Negara)		Hasil pengadaan berupa software perangkat lunak analisis dinamika fluida belum dimanfaatkan secara optimal karena perencanaan kurang matang	1.766.294.300,00	1.766.294.300,00	443.270.420,92

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggungjawabkan	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggungjawabkan
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)		
22	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106			2.683.324.600	1. Nilai HPS tidak handa dan disusun dari data yang 'tidak' tidak benar; 2. Indikasi persekongkolan antar peserta pelelangan; 3. Pengajuan amandemen kontrak perpanjangan waktu tidak didasarkan pada dokumen yang benar	2.683.324.600,00	2.683.324.600,00	
23	Badan Sar Nasional	107	4.452.360.000	Pengadaan iklan layanan masyarakat Badan SAR Nasional senilai Rp4.452.360.000,00 tidak didukung dengan data berupa bukti tayang, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa iklan layanan masyarakat tersebut memang benar ditayangkan pada media dan durasi yang sesuai			4.452.360.000,00	4.452.360.000,00	
24	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	0,00	Kelemahan pengendalian dalam proses PBJ LPP RRI	95.004.000	Pekerjaan pembelian ruang PPID/ULP tidak tertuang dalam POK SPI TA 2016. Pekerjaan tersebut adalah berdasarkan instruksi secara lisan dari KPA	95.004.000,00	95.004.000,00	

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan signifikan lainnya dalam pelaksanaan kontrak (<i>uraian permasalahan</i>)		Permasalahan signifikan lainnya dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>uraian permasalahan</i>)		TOTAL	Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang telah Dipertanggung-jawabkan		Total Nilai Temuan Permasalahan signifikan lainnya validasi tahap 3 yang Belum Dipertanggung-jawabkan	
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Keterangan		Nilai temuan (Rp)	Rp	Nilai temuan (Rp)	Rp
25	Badan Keamanan Laut	119			430.567.020.414	kepada PPK untuk melaksanakan pekerjaan.	430.567.020.414,00			430.567.020.414,00	
26	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120			1.661.037.227,27	Pengadaan tiga kegiatan Belanja Moda dihentikan transaksi keuangan dan perjanjian kontraknya berdasarkan surat K/PK. Selain itu, BPK menemukan ketidakpatuhan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan tiga kegiatan INL.	1.661.037.227,27			1.661.037.227,27	
TOTAL			118.238.195.140,27		9.152.910.125.901,11	Terdapat biaya langsung personil dan non personil atas pekerjaan jasa konsultasi yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp1.661.037.227,27	9.271.148.321.041,38	0,00		9.271.148.321.041,38	

Rekapitulasi Permasalahan Signifikan Lainnya terkait Belanja Barang pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	70.670.700,00	1. Pelaksanaan Paket Fullboard Meeting Bersamaan dengan Kegiatan Lainnya Rp16.600.000,00 2. RDK Dilaksanakan Bersamaan Dengan Kegiatan Lembur Rp12.605.700,00 3. Lang Saku RDK belum potong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 oleh Bendahara Pengeluaran Rp25.365.000,00 4. Pemberian Uang Saku RDK yang Pelaksanaanya Bersamaan dengan Perjalanan Dinas Luar Kota Rp12.000.000,00 5. Pemberian Uang Saku RDK Ganda Rp3.900.000 6. Terdapat pembentukan tim kegiatan pengeola SAI yang jumlah personilnya melebihi ketentuan dan tidak terdapat penunjukan personil yang jelas Rp0 7. Pengajuan persekot perjalanan dinas belum dilakukan verifikasi yang memadai terkait narasi maupun animatik terdapat dokumen yang diajukan Rp0			
2	Dewan Perwakilan Rakyat	002	12.046.600,000	1. Belanja Uang Representasi kepada Pimpinan Fraksi Tidak Memenuhi Karakteristik belanja Barang Operasional b. Pembayaran Jang Rep'eseriasi Tidak Didukung Ketentuan yang Memadai sebesar Rp1.216.600.000,00 2. Jumlah Kegiatan/Pertemuan yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Kunjungan Kerja tidak sesuai dengan jumlah biaya kegiatan yang diterima sebesar Rp10.630.000.000,00			
3	Mankamah Agung	005	2.368.241.180,52	1. Peralatan dinas dalam negen tidak diyekini kebenarannya karena bukti perjalanan dinas tidak lengkap dan tidak diyekini kebenarannya, yaitu sebesar Rp822.544.937,00. 2. Biaya BPJS belum dibayarkan oleh rekening sebesar Rp45.648.000,00.	317.780.000 00	2.048.461.180,52	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	2	Nilai temuan (Rp)	3 = 1 - 2	
			1						
				3. Pertanggungjawaban belanja belum didukung bukti yang memadai pada saiker EUA Rp510.000.000,00, saiker PA Jaklim Rp68.000.000,00, dan saiker PTUN Jambi Rp33.250.000,00; 4. Pertanggungjawaban belanja pembelian keperluan perkantoran pada PTUN Bandung senilai Rp11.655.000,00 belum didukung bukti yang memadai. 5. PPh dan PPh atas transaksi belanja barang kurang pungut dan setor sebesar Rp51.673.704,52; 6. Pelaksanaan rapat di dalam kantor tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp429.500.000,00; 7. Indikasi penggunaan kartu RFID BBM yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp44.645.939,00; 8. Belanja pemeliharaan tanpa perikatan SPK atau Kontrak atas pelaksanaan pembangunan Kantor Sementara PN Pematang Siantar sebesar Rp31.543.600,00, dan 9. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor belum dicatat PPh Pasal 21 sebesar Rp317.780.000,00					
4	Kejaksaan Republik Indonesia	006	3.380.668.010	1. Tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak didukung dokumen yang memadai Rp.3.380.668.010,00 a) Terdapat belanja barang untuk pemeliharaan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp64.983.900,00 pada Kejari kotamobagu, Minahasa utara dan Bitung. Atas kondisi tersebut, saiker terkait sudah melengkapi bukti pertanggungjawaban b) Terdapat: pertanggungjawaban biaya persara pidsus yang digunakan untuk membiayai persidangan tahun 2017 dan bukti pertanggungjawaban belanja penanganan perkara dibuat hanya untuk memenuhi administrasi					

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	1		2	3 = 1 - 2		
5	Kementerian Dalam Negeri	010	526,462,050.00		Dokumen pertanggungjawaban kegiatan untuk penyelesaian kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada BPSPDM tidak sesuai ketentuan				
6	Kementerian Luar Negeri	011	9,249,726,620.50		1. Kegiatan paket meeting melebihi SPM dan jumlah paket meeting melebihi jumlah peserta berdasarkan undangan dan surat tugas sebesar Rp819.214.382,00 2. Kelebihan pembayaran biaya atas representasi home staf bulan Juni 2016 sebesar Rp10.160.943,50 3. Kegiatan representasi tidak terbelah dahulu mengajukan izin secara tertulis kepada Kepala Perwakilan dan tidak ada persetujuan tertulis dari Kepala Perwakilan terkait penggunaan representasi sebesar Rp324.131.295 4. Pengadaan dokumen imigrasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 8.096.220,00 5. Kemenlu belum melakukan kajian terhadap pembayaran iuran kontribusi organisasi internasional yang selama ini membahani anggaran Kemenlu	0,00	9,249,726,620,50		
7	Kementerian Keuangan	015	4,692,185,300		1. Terdapat Pekerjaan Mendahului Kontrak atas Pekerjaan Pemeliharaan Trace Detector sebesar Rp4.692.185.300,00 2. Pemilihan jenis kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada pemeliharaan Hi-Co Scan di DJRC tidak tepat				
8	Kementerian Pertanian	018	217,521,000		1. Penyaluran bantuan Asintan belum didukung SKCPCL, tidak sesuai kebutuhan lokasi, belum diterima seluruhnya s.d. tanggal pemeksaan lapangan selesai, dan pemanfaatan belum memadai 2. Pengadaan asintan cadangan bim didukung perencanaan memadai, kontrak pengadaan belum menuat klausul parikuan asintan cadangan, dan penatausahaan dokumen serta monitoring penyaluran kurang memadai 3. Konstruksi celak sawah tidak berdasarkan SID, pelaksanaan SI CPCL tidak sesuai pedoman, KAK dokumen perencanaan				

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	2	Nilai temuan (Rp)	3 = 1 - 2	
			1						
				belum lengkap, terdapat poktan yang tidak layak, lahan belum dimanfaatkan, dll. Rp165.046.000 4. Jaminan Pelaksanaan alas Pengerjaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi kepada Kelompok Penggerak Pembangunan Horikultura belum dicairkan. Rp52.975.000					
9	Kementerian Perindustrian	019	10,644,450,000.00	1. SK tidak sesuai ketentuan 2. SK tidak sesuai ketentuan					

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Keterangan		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan		Bentuk Perangungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	1			Nilai temuan (Rp)	2	Nilai temuan (Rp)	3 = 1 - 2	
10	Kementerian Kesehatan	024	69.071.992.837	1.	Perencanaan dan Pelaksanaan Belanja Barang pada Tiga Saker Belum Terfika. Perhitungan Resaran Remunerasi pada RSUP dr. Kariadi Semarang Tidak Sesuai Dengan Pedoman Remunerasi 2. Pelaksanaan Pekerjaan Panitia/Pejabat Pemilihan Hasil Pekerjaan Belum Memadai (Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan) 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Program Nusantara Sehat pada Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusrengun) Belum Memadai <i>Tidak Dikomisi / Temuan SPI2</i> 4. Terdapat pemecatan kontrak pengadaan pada tiga saker Kemenkes yaitu: Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPD Harkit) senilai Rp31.855.500.000. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular senilai Rp458.000.000.000. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar senilai Rp2.217.307.053.003. Sepuluh saker di Kemenkes kelebihan membayar kepada pihak ketiga atas pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan yaitu: Pusat Data dan Informasi senilai Rp75.150.000.00 (telah disetor/c. senilai Rp84.504.000.00 (telah disetor/c. Direktorat Giz Masyarakat senilai Rp127.381.239.00 (telah disetor/d. RSUP H. Adam Malik senilai Rp885.945.000.00 dan Rp189.357.300.00e. RSUP Dr. Kariadi senilai Rp94.902.476.68f. Direktorat P2ML senilai Rp2.656.113.443,88 (telah disetor/g. Badan Litbangkes senilai Rp176.052.545.45.00h. BBPK Jakarta senilai Rp2.486.932.00i. Poltekkes Manado senilai Rp7.711.000.00 (telah						

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	
			1	2	3 = 1 - 2
				ciseterji). BBPK Makassar senilai Rp318.956.760,00 (telah disetor) 6. Pihak ketiga melaksanakan pekerjaan tahun anggaran 2016 pada empat satker Kemenkes tidak sesuai spesifikasi kontrak dan/atau ketentuan yang berlaku. a. Terdapat obat-obatan yang diterima dengan masa kadaluarsanya dua tahun sebesar Rp3.921.340.878,00 b. Terdapat hasil pekerjaan video edukasi dan ILM diabetes, peningkatan filler peningkatan posbindu PTM yang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan senilai Rp300.000.000,00 serta terdapat hasil pengadaan reagen yang tidak memenuhi spesifikasi terkait masa kadaluarsa sebesar Rp15.200.000,00 pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. c. Terdapat obat-obatan dan vaksin hasil pengadaan pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan senilai Rp55.707.034.168,00 7. Proses perubahan kontrak pembuatan dan promosi iklan layanan masyarakat PIN polio di media pada Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Tidak Tertit6. Proses lelang pengadaan reagen ziehl neelsen Tuberculosis pada Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular belum tertib 8. Perencanaan pengadaan tidak cermat pada dua kegiatan pengadaan barang yaitu pada: a. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (EAST) hasil pekerjaan dibuat mendahului barang datang, perencanaan pengadaan tidak cermat, kemasan tidak dilengkapi	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			1	Keterangan	2	3 = 1 - 2
			1	identifikasi dan pencatatan atas komponen pendukung tidak dilakukan) b. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (BAST) hanya diadani 2 orang dari 7 orang Panitia Penitipaan Hasil Pekerjaan, pelaksanaan kegiatan yang telah selesai tidak dapat dilakukan migrasi dan dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Pajak Penghasilan atas pekerjaan pengadaan langganan internet sebesar Rp6.906.000,00 9. Jaminan pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan minimal sebesar Rp1.008.964.956,50 belum dicairkan10. Realisasi belanja Poltekkes Makassar untuk pembelian BBM tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah		

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	1		Nilai temuan (Rp)	2		
11	Kementerian Agama	025	22.385.856.420	1	1. Realisasi belanja barang untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah belum didukung laporan sebesar Rp3.298.250.000 2. Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban Rp8.816.355.255 3. Belanja bantuan pereliharaan dan Bantuan Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat belum dipertanggungjawabkan. Rp1.519.957.200 4. Kekurangan Pembayaran THR Pelugas Pengamanan dan Kebersihan oleh Penyedia Jasa Rp248.371.000 5. Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan 6. Sisa Dana atas Belanja Barang Belum Disetorkan ke Kas Negara Rp1.116.354.366 7. Pembayaran Uang Saku Kegiatan Rapat Paket Meeting Belum Diungkap PPh Pasal 21 Rp276.084.995	117.251.245.00	22.268.605.175.00	Penyeteroran atas PPh Pasa 21 atas uang saku Rp117.251.245	
12	Kementerian Sosial	027	34.377.000.00		Jaminan Uang Pelaksanaan pada Waprestasi Pekerjaan Pengadaan Barang Rompi Tagana yang Tidak Dicairkan				
13	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	606.895.000.00		1. Rp538.935.000 belum didukung bukti pertanggungjawaban 2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Memboroskan Keuangan Negara sebesar Rp67.950.000.00 paca Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	0.00	606.895.000.00		
14	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	403.687.000		Perbedaan harga antara realisasi pembayaran dengan SBM tahun anggaran 2106				
15	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	201.818.190		BPP Kompolnas terlambat menyeterorkan Pajak Penghasilan pasal 22, 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong/diupungut sebesar Rp248.036.187.00 (Pajak atas Belanja Modal sebesar Rp46.217.997,00 dan Pajak atas Belanja Barang sebesar Rp201.818.190,00) seluruh	201.818.190.00	0.00	Disetorkan ke Kas Negara	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyetoran, SKT JM, dll)
			1 Nilai temuan (Rp)	Keterangan	2 Nilai temuan (Rp)	3 = 1 - 2 Nilai temuan (Rp)	
16	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	375,745,954,00	keterlambatan penyetoran pajak sudah disetorkan ke Kas Negara per April 2017 1. Rp339.307.300 ketidakhormatan (Rp192.500.000,00 ketidakhormatan sewa madbook air dan Rp146.807.300,00 ketidakhormatan dalam perolehan harga tiket perjalan Luar Negeri) 2. Terdapat biaya senilai Rp36.438.654,00 yang ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas personil tambahan yang tidak termasuk dalam kontrak pekerjaan.	36.438.654,00	339.307.300,00	Penyetoran ke Kas Negara
17	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	2.350,401,541,00	1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) dan dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja pengadaan obat tidak valid sebesar Rp179.999.400,00 2. Pajak belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.821.500.000. 3. Empat paket pengacaan jasa konsultan belum didukung dengan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan sebagai dasar klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil sebesar Rp161.500.000,00 4. Pemborosan alas Pentyaran Paket Fullboard sebesar Rp15.400.000,00 5. Pajak belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp20.500.000,00. 6. Sisa penggunaan dana swakelola belum dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp7.999.850,00. 7. Sisa Dana Swakelola sampai dengan 31 Desember 2016 belum disetor/dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp216.525.114,00. Pajak yang Telah Dipotong Sebesar Rp5.724.000,00 Namun Belum Disetor ke Kas Negara. 8. Pajak Tahun 2016 pada Salter Revolusi Mental Belum Disetor sebesar Rp90.141.677,00.			

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan keputusan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
			1		2	3 = 1 - 2	
18	Kementerian Pariwisata	040	4.043.926.475,45	9. Pengeluaran belum didukung bukti peranggungjawaban yang lengkap sebesar Rp1.651.000.000,00			
19	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	401.637.100,00	1. Kelebihan bayar dari kesalahan penetapan nilai kontrak yang mengikuti harga penawaran penyedia (yang nilainya lebih tinggi) bukan berdasarkan pada harga hasil negosiasi 2. Penginapan pada perjalanan dinas yang dibiayai pihak ketiga oleh BUMN bersubsidi menimbulkan benturan kepentingan seharusnya dibebankan pada DIPA Kementerian BUMN minimal sebesar Rp240.920.000,00 3. Pembayaran uran jaminan pensiun tidak diatur dalam kontrak 4. Persetujuan tertulis PPK atas perubahan personel tidak didukung pengujian kualifikasi, perencanaan tidak memadai, PPK tidak melakukan survei harga secara memadai, indikasi adanya pengaturan pemenang	348.826.562,00	4.405.069.913,45	
20	Dewan Ketahanan Nasional	052	527.613.521,00	1. Terdapat pajak yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yang terdiri dari: PPN Rp5.202.273 2. PPh pasal 21 Rp510.723.900 3. PPh pasal 22 Rp6.463.548 4. PPh pasal 23 Rp5.133.800			
21	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	11.435.408.405	1. Honor SK Tim tidak sesuai ketentuan: a. tidak sesuai SBM b. melebihi batas jumlah SK sebulan 2. RDK tidak sesuai ketentuan: a. tidak sesuai SBM (tidak didukung bukti yang lengkap) b. waktu pelaksanaan RDK tidak sesuai SBM c. tidak memenuhi syarat peserta 3. Perijin tidak bersifat koordinatif 4. Lisensi = proses pengadaan tidak sesuai ketentuan			

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Keterangan	Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	1		Nilai temuan (Rp)	2	Nilai temuan (Rp)	3 = 1 - 2	
22	Kementerian Komunikasi dan Informatika	050	74.260.990.930,70	1.	1. Kelalaian penyedia dalam kontrak belum diberikan sanksi sesuai peraturan. 2. Lokasi layanan akses internet tidak sesuai dengan kontrak. 3. Bentuk kontrak belum memadai dan menjamin pelaksanaan pekerjaan. 4. Perencanaan program layanan akses internet tidak dilakukan dengan memadai. 5. Indikasi Persaingan Tidak Sehat antar Peserta Lelang atas Pengadaan Sewa Kendaraan Komisiner dan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia senilai Rp1,96 Miliar. 6. BPK belum memperoleh SK Tim Monitoring dan Evaluasi Program Satu Jula Domain; tidak terdapat dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Satu Jula Domain. 7. PPK dan penanggung jawab program tidak menyampaikan SK tim pendamping dan laporan hasil pendampingan sehingga BPK tidak dapat meyakini eksistensi fungsi pendampingan. 8. Verifikasi yang dilakukan oleh unit pendataan belum didasarkan pada suatu ikatan berupa surat keputusan/surat tugas/perjanjian kerjasama Dengan demikian, tanggung jawab unit pendataan tidak jelas. 9. Direktorat e-Business tidak memiliki Pedoman Umum Pelaksanaan Program. 10. Pembayaran atas pengadaan sewa hosting senilai Rp3.417.921.800,00 belum didukung dengan jaminan pembayaran. 11. Pembayaran Akses Internet tidak mempertimbangkan downtime dari SLA tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp66.865.786.719,28. 12. Tidak terperuhnya tujuan pengadaan layanan akses internet pada 307 (226+41) lokasi senilai Rp12.202.763.400,30					

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan 2 Nilai temuan (Rp)	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan 3 = 1 - 2	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKTJM, dll)
			1 Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
23	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	36.952.050,00	(Rp) 9.584.860.000,00 Rp2.638.103.400,00). Duplikasi tumpeng tindi pembayaran honor kegiatan pada Polres Donggala Dit. Sabnara, Polda Sulteng, Polres Kendari, Polres Kupang, Polresta Bandar Lampung	0,00	36.952.050,00	
24	Badan Pengawas Obat Dan Makanan	063	51.304.929,00	1. Terdapat dua item barang hasil Pengadaan Standard sed Kit pada Deputy III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang belum diserahkan sehingga belum dapat dimanfaatkan Rp20.710.000 2. Terdapat dokumen pertanggungjawaban pembelian BBM hanya terdiri dari nota pembelian bensin dan kuitansi berdehara pengeluaran tanpa adanya informasi nama pembeli, nomor polisi kendaraan dan tujuan perjalanan	0,00	51.304.929,00	
25	Lembaga Ketahanan Nasional	064	6.766.000,00	Belanja honor lebih pungut pajak dan belanja barang kurang pungut pajak			
26	Badan Narkotika Nasional	066	5.001.091,695	1. Permasalahan signifikan lainnya (Kecurangan /fraud) Belanja Barang pada BNNP DKI Jakarta yang meliputi: a. Dana di luar mekanisme APBN (dana taklis) sebesar Rp1.562.015.403 (telah dilakukan penyetoran senilai Rp938.498.154,00) b. Belanja tidak diyakini sebesar Rp2.433.366.714 2. Permasalahan signifikan lainnya (DRPP tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban keuangan) sebesar Rp1.010.600.655 3. Permasalahan signifikan lainnya (Belanja Barang Tidak Sesuai Spesifikasi) yang meliputi: a) Masa kedaluwarsa reagen hasil pengadaan Reagen pada Balai Besar Rehabilitasi BNN sebesar Rp109.677.500 b) Masa kedaluwarsa reagen hasil pengadaan reagen pada Balai Rehabilitasi Narkotika Baduka Makassar sebesar	1.394.193.972,00	3.606.897.723,00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			1	Keterangan	2	3 = 1 - 2	
				Rp189.411.749 c) Masa kedaluwarsa reagen hasil pengadaan reagen pada Loka Rehabilitasi Narkoba Batam sebesar Rp160.822.00 4. Bendahara Pengeluaran Belum memungut PPN dan PPh atas pengadaan Belanja Pemeliharaan Peralatan Intelijen pada Dit. Intelijen, senilai Rp454.695.818,00 atas hal tersebut telah dilakukan penyeroran seluruhnya senilai Rp454.695.818,00			
27	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	31.332.855.000,00	pembayaran belanja barang dan jasa untuk disalurkan kepada masyarakat/ahak ketiga pada direktorat sarana dan prasarana di daerah tertinggal tidak sah dan tidak sesuai mekanisme perundangan sebesar Rp31.332.855.000			
28	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	6.109.326.062	1. Denda atas pesanan e catalog yang tidak dikerjakan oleh rekanan sebesar Rp170.241.600 2. Pencatatan kegiatan belanja barang advokasi dan KIE, Momentum, serta Sosialisasi Program KBPK, belum didukung dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp6.023.084.462 3. Temuan SPI senilai Rp0,- karena tidak adanya pencatatan kartu kendali atas pembelian suku cadang kendaraan dengan waktu berdekatan	170.241.600,00	6.023.084.462,00	
29	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	333.338.216,00	1. Pengelola uang kas Komnas Perempuan bukan merupakan BPP yang ditunjuk. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui terdapat ketekoran kas pada Komnas Perempuan sebesar Rp71.877.010,00 2. Terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp261.451.206,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban	0,00	333.338.216,00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Nilai temuan (Rp)	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Nilai temuan (Rp)	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
30	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	2,300,657,744.61	1. Teknisi yang melaksanakan Pemeliharaan tidak sesuai dengan dokumen penawaran tanpa ada persetujuan resmi dari PPK 2. Pelaksanaan pemeliharaan tidak sesuai kontrak namun pembayaran dilakukan seluruhnya walau pekerjaan pemeliharaan telah selesai 3. Telah disetorkan ke kas negara : 1. Perbedaan teknis Rp340.230.909,10 2. Tidak sesuai kontrak Rp593.059.581,82 sehingga yang belum disetor berupa Perbedaan Teknisi Rp1.367.387.273,73	933.290.470.92	1.367.367.273.69	
31	Komisi Pemilihan Umum	076	675,259,617.03	1. Untuk PPN pekerjaan pengadaan perlengkapan bahan kampanye PPN senilai Rp336.460.536,58 sudah dilakukan penyeteroran, PPH senilai Rp50.439.050,45 sudah dilakukan penyeteroran 2. PPh 21 pada tujuh salur telah disetor senilai Rp41.930.000,00	428.859,617.03	246.400.000.00	
32	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	45,181,185.80	1. Potongan atas denda layanan tidak sesuai kontrak sebesar Rp7.577.292.80 2. Denda layanan internet tidak sesuai kontrak belum ditagihkan sebesar Rp1.053.893.00 3. Kelebihan pembayaran biaya langsung non personil jasa konsultasi sebesar Rp36.550.000,00		45,181,185.80	1. Potongan atas denda layanan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp7.577.292.80 (pemborosan) 2 Denda layanan internet tidak sesuai kontrak belum ditagihkan sebesar Rp1.053.893 3. Kelebihan pembayaran non personil jasa konsultasi sebesar Rp36.550.000
33	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	53,505,600	Penentuan jenis makanan pada pengadaan makanan dan minuman untuk penambah daya tahan tubuh tidak sesuai ketentuan			
34	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	21,600,000	1. Realisasi belanja barang untuk kegiatan strategi pemasaran Tecno Park dan kegiatan pengembangan dan penerapan strategi pemasaran yang anggaran terdapat pada Salur Pusanter, namun dilaksanakan oleh Salur/unit di luar Pusanter dan tidak terdapat personil dari Pusanter yang terlibat dalam kegiatan			

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			1	Keterangan	2	3 = 1 - 2	
				tersebut, serta realisasi belanja tersebut merupakan tupoksi dari masing-masing unit yang melaksanakan kegiatan (Biro SDM, Biro HKH dan Pusbandkiat) 2. Pembelian dan pendistribusian kupon BBM yang tidak sesuai dengan surat Keputusan Kepala Pusyartek dan Pengadministrasian distribusi BBM yang tidak terb sebesar Rp2.1.500.000			
35	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/Big	063	2.213.072.752	1. Delanja sewa kendaraan dinas tahun 2016 sebesar Rp1.92. Miliar tidak terb. Keterangan: tidak ada penyeteroran/pertanggungjawaban karena pemborosan bukan kelebihan pembayaran 2. Seisih pembayaran perjalanan dinas. Keterangan: selisih tersebut adalah selisih harga tiket berdasarkan konfirmasi maskapai. BPK meminta BIG untuk melakukan pengujian lebih lanjut, apabila terdapat kelebihan pembayaran agar disetor ke kas negara			
36	Arsip Nasional Republik Indonesia	007	56.550.000,00	Terdapat tiga kegiatan yang tidak bersial koordinatif baik antar eselon 1 atau kementerian. ketiga kegiatan tersebut telah dibayarkan honornya total sejumlah Rp56.550.000,00	0,00	56.550.000,00	
37	Badan Kepegawalan Negara	006	39.505.207	Bukti pertanggungjawaban belanja pemeliharaan kendaraan tidak sesuai dengan faktur dari pihak rekanan. Atas permasalahan tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp39.505.207,00 pada tanggal 12 Mei 2017	39.505.207,00	0,00	Penyeteroran
38	Kementerian Perdagangan	000	216.000,000	realisasi ELP senilai Rp216.000.000,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai	0,00	216.000.000,00	
39	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	2.514.203.782	Belanja fasilitas kegiatan PEPARNAS XV Th 2016 di Jabar yang belum dibayarkan sebesar Rp1.052.130.000,00 baru dibayar sebesar Rp1.140.133.000,00 disetorkan ke kas negara tgl 11 april 2017. Pajak belum disetor sebesar Rp332.030782	1.140.133.000,00	1.374.160.782,00	Penyeteroran

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan Nilai temuan (Rp)	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan Nilai temuan (Rp)	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteran, SKT, JM, dll)
			Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016	Keterangan	1	2	3 = 1 - 2
40	Komisi Pemberantasan Korupsi	093	603.633.701.00	1. Terdapat pembayaran Belanja Pengadaan Jasa Percetakan Tahun 2016 dipungut PPh Pasal 22 dengan besaran tarif 1.5%. Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, jasa percetakan merupakan objek pajak yang termasuk bagian dari jasa lainnya pada Pasal 23 dengan besaran tarif 2% sehingga terdapat kurang pungut PPh atas masing-masing transaksi sebesar Rp12.577.443,00. 2. Terdapat kelebihan pembayaran atas peningkatan harga satuan pada item pekerjaan yang tidak merubah spesifikasi pekerjaan sebesar Rp152.407.130,00 dan nilai pembayaran yang tidak sesuai addendum kontrak sebesar Rp440.000,00. 3. Terdapat pemborosan Belanja Bahan Konsumsi pemeriksaan saksi minimal sebesar Rp54.688.622,00. 4. Bukti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel minimal sebesar Rp35.378.000,00. 5. Pengadaan jasa lainnya sehanusnya dihitung dari harga satuan per jumlah barang yang memuat seluruh biaya tes/seleksi. Sewa ruangan les yang terjadi dapat dikategorikan biaya non personil yang berpengaruh pada pertanggungjawaban belanja kegiatan tersebut. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran atas biaya sewa ruangan sebesar Rp308.202.500,00.	13.772.422.000	1. Pengendalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tidak terlibat merupakan belanja pemeliharaan peralatan kantor: a. Sebesar Rp145.580.500,00 yang merupakan beban belanja TA 2015 namun dibebankan pada TA 2016 (pekerjaan tersebut telah diselesaikan pada TA 2015 namun realisasi pembayaran baru	
41	Dewan Perwakilan Daerah (Dpd)	095					

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan			
			1		2		
				dilaksanakan pada TA 2016, namun pada LK TA 2015 tidak disajikan dalam hutang) b. sebesar Rp23.875.500,00 yang merupakan beban TA 2016 namun belum dibayarkan dan LK TA 2016 unaudited telah dilakukan koreksi atas hutangnya sehingga pada LK TA 2016 audited belanja yang belum terbayarkan tersebut telah disajikan pada hutang. 2. Pertanggungjawaban biaya sewa kendaraan bagi pimpinan dan anggota DPD yang sedang melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat tidak terbit sebesar Rp13.474.806,00 3. Realisasi pekerjaan pengadaan buku booklet deskripsi perjuangan DPD: Menuju amandemen UUD 1945 dan Rukhu perdoman tata naskah dinas sekretariat Jenderal DPD tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebesar Rp127.160.000,00			
42	Komisi Yudisial RI	100	756.575.360,00	1. Belum dipungut PPh pasal 21 atas penerimaan uang saku rapat di dalam kantor Rp79.860.000 2. Bukti pertanggungjawaban tidak memacai Rp515.758.400 3. Kekurangan iuran BPJS sebesar Rp160.956.960,00 belum disetorkan kepada pihak BPJS oleh PT SIMS Services International			
43	Radian Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	17.030.000,00	Pemborosan sebesar Rp17.080.000,00 atas kelebihan pembayaran kegiatan paket meeting di Yogyakarta sebesar Rp6.880.000,00 dan paket meeting di Semarang sebesar Rp10.200.000,01			
44	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	4.088.972.960,00	Jasa pelayanan kebersihan melalui penunjukan angsumg, penyusunan HPS tidak memadai, mekanisme kontrak payung, dsb			

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Pemmasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyetoran, SKTJM, dll)
			1 Nilai temuan (Rp)	Keterangan	2 Nilai temuan (Rp)	3 = 1 - 2 Nilai temuan (Rp)	
45	Badan Sar Nasional	107	201.284.045.45	1. Pembayaran UP untuk belanja pemeliharaan bangunan/gedung kantor, kendaraan, atau pembelian ATK yang pemungutan pajaknya belum disetor ke Kas Negara; dan 2. Belanja barang berupa belanja pemeliharaan kendaraan, pembelian ATK/obat-obatan dan lain-lain yang PPN nya tidak dipungut.	0.00	201.284.045.45	
46	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	64.218.170.00	Pertanggungjawaban belanja barang selain perjalanan dinas belum lengkap, antara lain terdiri dari honorarium narasumber, sewa kendaraan, belanja bahan, Perubahan nilai temuan karena adanya dokumen pertanggungjawaban yang discrehkan KPPU pada saat pelaporan. Sudah dilengkapi selama periode pelaporan sebesar Rp64.218.170.00 dan sisa yang belum dilengkapi sebesar Rp39.124.000.00	64.218.170.00	39.124.000.00	Dokumen pertanggungjawaban
47	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	815.477.727.50	1. Hasil pengadaan belum dimanfaatkan Rp729.000.000 2. Terdapat kerusakan pembangunan bronjong pengaman pilar batas wilayah negara Desa Lamaksenu pada Masa Pemeliharaan Pekerjaan Sebesar Rp53.165.227,50 3. Tenaga ahli melakukan dua kontrak jasa konsultansi pada periode yang sama Rp33.312.500,00 4. Dokumen Rampung perjalanan dinas belum di verifikasi			
48	Sekretariat Kabinet	114	314.061.100	Pembayaran uang satu RDK yang tidak didukung daftar hadir sebesar Rp70.800.000,00 dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak layak ini kebenarannya sebesar Rp243.261.100,00			
49	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	427.500.275.00	1. Kelemahan pengendalian dalam proses pengadaan barang dan jasa LPP RRI 2. Pekerjaan tidak dilaksanakan 3. Sub kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan 4. Belum dihayarkan kepada penyedia barang/bertak	0.00	427.500.275.00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan	Nilai yang belum dipertanggungjawabkan	Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	Nilai temuan (Rp)	
50	Badan Keammanan Laut	119	5,881,124,971.00	Realisasi Belanja Barang Non Operasional lainnya berupa pembelian BBM belum didukung bukti	0.00	5,881,124,971.00	
51	Kementerian Koordinator Kemanitman	120	1,834,317,703	1. Terdapat jasa konsultasi personil tanpa dasar dan jasa konsultasi non personil tanpa GPJ sebesar Rp44.150.000,00 2. Terdapat pengembalian belanja dari mekanisme pembayaran secara LS Dendehara belum terkontrol Rp1.027.431.006,00 3. Dokumen pertanggungjawaban tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp736.370.213,00 4. Terdapat pertanggungjawaban atas kegiatan Dharma Wanita Kemenko Maritim senilai Rp26.500.000,00 5. Pertanggungjawaban GU dan TUP yang belum dipungut/dipotong pajak dan kesalahan perhitungan Rp1.836.394,00 6. Belum ada SOF terkait pengelolaan barang dan jasa 7. Proses verifikasi terhadap dokumen hak tagih belum berjalan dengan baik 8. Pengarsipan dokumen hak tagih belum dikelola dengan baik	1,028,960,676.00	805,357,027.00	
52	Badan Ekonomi Kreatif	121	23,331,555,468	1. sisa dana Kegiatan London Design Biennale Pada Deputi Pemasaran sebesar Rp218.665.000,00 2. Kelebihan Pembayaran karena tumpang tindih pekerjaan dengan rekanan lainnya atas Pekerjaan Produksi Pada Kegiatan Pendukung Pekan Produk Budaya Indonesia Rp49.750.000,00 3. Terdapat Sisa Dana atas Pekerjaan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dan Fasilitas Pendaftaran Intelektual Bagi Pelaku Kreatif pada Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan mgulasi sebesar Rp486.022.859,00 4. terdapat sisa dana atas 2 kegiatan swakejela pada Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri			

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam Belanja Barang TA 2016		Nilai yang telah dipertanggungjawabkan		Nilai yang belum dipertanggungjawabkan		Bentuk Pertanggungjawaban (Penyeteroran, SKTJM, dll)
			Nilai temuan (Rp)	Keterangan	Nilai temuan (Rp)	2	Nilai temuan (Rp)	3 = 1 - 2	
			1	masing-masing sebesar Rp331.927.838,00 dan Rp304.283.567,00. 5. Terdapat kegiatan pada Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2016 yang belum diajukan untuk dibayarkan kepada KPPN sekurangnya sebesar Rp1.198.276.500,00 6. hasil kegiatan perumusan, penyusunan direktori pelaku kreatif dan peningkatan konten aplikasi dan promosi digital pada deputi pemasaran direktorat pengambatan pasar dalam neger belum diserahkan 7. Belanja Barang dan Jasa Rp20.742.629,704,00 belum dapat diyekini kewajarannya baik dari harga maupun hasil pekerjaannya					
	TOTAL		333.340.811.564,57		6.221.517.363,95		59.719.712.129,41		

Rekapitulasi Permasalahan Dalam Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/ Lembaga	BA	Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos					
			Belanja bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak	Kelebihan Belanja Bansos belum disetor ke Kas Negara	Dana Bansos Belum ada pertanggungjawaban	Kurang Volume/Kelebihan Pembayaran atas penggunaan Dana Bansos	Belum dikenakan denda keterlambatan atas kegiatan dari Dana Bansos	Penggunaan dana Bansos tidak tertib/tidak sesuai ketentuan
			Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)
1	Kementerian Pendidikan Nasional	023	8.373.600.000,00					3.845.740.456,00
2	Kementerian Agama	025			78.450.000,00			281.834.951,00
3	Kementerian Sosial	027	41.177.645.543,36	1.136.000.000,00			111.900.000,00	
4	Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi	042	2.483.010.003,00	10.067.250,00		14.400.000,00		
5	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103				162.350.000,00		
TOTAL			452.034.859.546,36	1.146.867.250,00	78.450.000,00	176.750.000,00	111.900.000,00	4.107.584.407,00

Rincian Nilai dan Keterangan Belanja Bansos Yang Belum Disalurkan Kepada Yang Berhak pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos	
			Belanja Bansos yang Belum Disalurkan kepada yang Berhak	
			Nilai Tomuan (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Pendidikan Nasional	023	8.373.600.000,00	SK penyaluran ke 28 pada Direktorat PSD per 31 Desember 2016 belum tersalurkan kepada 20.705 penerima dengan nilai bantuan sebesar Rp8.373.600.000,00
2	Kementerian Sosial	027	441.177.849.543,36	Sisa Dana PKH tahun 2016 yang belum disalurkan oleh PT Pos Indonesia kepada KSM per 31 Desember 2016
3	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	2.483.610.003,00	Retur Bioteknologi belum disalurkan oleh Bank
TOTAL			452.034.859.546,36	

Rincian Nilai dan Keterangan Kelebihan Belanja Bansos Belum Disetor Ke Kas Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.		Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos		
Kementerian/Lembaga		Kelebihan Belanja Bansos Belum Disetor ke Kas Negara		
		Nilai Temuan (Rp)	Keterangan	
1	Kementerian Sosial	027	1.136.000.000,00	Kelebihan Belanja Bansos TA 2016 senilai Rp1.136.000.000,00 baru disetor ke Kas Negara tanggal 08/03/2017 sesuai Eukti Pembualar Tagihan pada SIMFONI Kode Billing 820170308550231, NIPN No.C07CB30BP7JK5A29
2	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	10.867.250,00	
TOTAL			1.146.867.250,00	

Rincian Nilai dan Keterangan Dana Bansos Belum Ada Pertanggungjawaban pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Agama	025	78.450.000,00	Pengelolaan dana kegiatan bantuan sosial Beasiswa Bidikmisi tidak didukung bukti pertanggungjawaban

Rincian Nilai dan Keterangan Kekurangan Volume/Kelebihan Pembayaran atas Penggunaan Dana Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos	
			Kurang Volume/Kelebihan Pembayaran atas Penggunaan Dana Bansos	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	14.400.000,00	Disalurkan untuk mahasiswa ADK (double penyaluran)
2	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	152.350.000,00	Kekurangan volume pekerjaan fisik dana siap pakai di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Aceh Besar terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp58.159.000,00
TOTAL			176.750.000,00	

Rincian Nilai dan Keterangan Permasalahan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan atas Kegiatan Dana Bansos pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos	
			Belum Dikenakan Denda Keterlambatan atas Kegiatan dari Dana Bansos	
1	Kementerian Sosial	027	Nilai Teinuan (Rp)	Keterangan **
			111.900.000,00	Perhitungan dengan keterlambatan penyaluran bantuan Tahap I minimal : 5 hari x 1/1000 x Rp22.380.000.000,00

Rincian Nilai dan Keterangan Penggunaan Dana Bansos Tidak Tertib/Tidak Sesuai Ketentuan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Pendidikan Nasional	023	3.845.749.456,00	1. Dijen Dikdasmen belum mampu memisalkan saldo PIP 2015 dengan 2016 2. Terdapat perbedaan saldo print out R/K dengan Surat Keterangan BRI 3. Pengembalian Belanja Bansos di DITPSMA sebesar Rp3.500.000.000,00 tidak sesuai akun 4. Bansos PIP di DIT.PSD sebesar Rp19.700.000,00 tidak tepat sasaran 5. Penyaluran bansos PIP belum optimal 6. Usia anak sekolah tidak sesuai ketentuan dan anak sekolah tidak punya NISN 7. Terdapat retur KIP 122.071 buah senilai Rp114.600.000,00 8. Penyaluran PIP diluar jam kerja bank penyalur 9. Terdapat selisih hari penyaluran PIP antara anggal SPPN dengan SP2D 10. Identitas ganda pada database penyaluran PIP
2	Kementerian Agama	025	261.834.951,00	Realisasi belanja bantuan sosial Bid kmisi belum dapat dimanfaatkan penerima bantuan
TOTAL			4.107.584.407,00	